

daftar isi *contents*

Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>	Penelitian & Pengembangan <i>Research & Development</i>
Visi dan Misi Perusahaan <i>Company Vission and Mission</i>	Pengembangan SDM <i>Human Resources Development</i>
Kebijakan Mutu Perusahaan <i>Company Quality Policy</i>	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>
Sambutan Komisaris <i>Commissioners Message</i>	Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance</i>
Sambutan Direktur Utama <i>President Director Message</i>	Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility</i>
Aktifitas Manajemen <i>Management Activities</i>	Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i>
Klasifikasi Kapal <i>Ship Classification</i>	Komisaris, Direksi dan Staf <i>Commissioners, Director and Staff</i>
Persetujuan Gambar <i>Drawing Approval</i>	Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I) <i>The Consultative Committee of Indonesian Classification</i>
Aktifitas Survey Klasifikasi <i>Classification Survey Activities</i>	Kerjasama <i>Cooperation</i>
Aktivitas Jasa Industri <i>Industrial Services Activities</i>	Jaringan Operasional <i>Operational Network</i>
Survey Statutoria <i>Statutory Survey</i>	Daftar Kontak <i>List Of Contact</i>
Otorisasi Statutoria <i>Statutory Authorization</i>	Laporan Auditor Independen <i>Independent Auditors Report</i>
Konsultasi & Supervisi <i>Consultancy & Supervision</i>	

Profil Perusahaan

Company Profile

Biro Klasifikasi Indonesia, juga dikenal sebagai BKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan tujuan mulia untuk mendukung kemandirian industri perkapalan dan pelayaran nasional melalui pelayanan jasa klasifikasi dan jasa-jasa lainnya yang terkait. BKI dalam pelayanan jasanya melakukan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (Rules & Regulation) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survey maritim terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Rules & Regulation yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Lingkup kerja dari BKI adalah melaksanakan survey dan sertifikasi untuk menjamin bahwa Rules & Regulation yang telah dikembangkan, diterapkan pada saat pembangunan kapal baru dan kapal yang sudah jadi. Untuk mempertahankan kondisi kapal tersebut, maka dalam prosesnya kapal diharuskan melakukan perawatan dan perbaikan yang terjadwal, dimana pelaksanaan ini akan dimonitor terus oleh BKI dengan melakukan survey periodik dalam mempertahankan klasifikasinya.

Penilaian kondisi kapal dilakukan berdasarkan survey yang profesional dan independen oleh surveyor klasifikasi yang memiliki kompeten dalam melakukan penilaian kondisi kapal. Hasil dari pemeriksaan dan penilaian ini berupa laporan dan sertifikat yang dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Pe-

Biro Klasifikasi Indonesia, also known as BKI is a State Owned Company which was founded with the noble aim to support the independence of the shipping industry and the national shipping via the classification services and other services related. In the service, BKI researching, publishing and implementing technical standards (Rules & Regulations) by doing the design, construction and maritime survey related to floating facilities, including ships. This standard is prepared and issued by BKI as technical publications. Rules & Regulations are not only developed the structure of the hull construction, but also includes safety equipment, machinery and electrical installations.

The scope of work of BKI carries out the survey and certification to ensure that the Rules & Regulations have been developed and implemented during the construction of new ships and ships in service. To maintain the condition of the vessel, then in the process vessel is required to perform scheduled maintenance and repairs, where the implementation will be monitored closely by carry out periodic surveys to maintain its class.

The assessment of the condition of the vessel based on a survey conducted independently by professional and a competent surveyor in assessing the condition of the vessel. The results of the examination and assessment are reports and certificates used as a reference by the parties concerned, including Ship's

milik Kapal, Pihak Asuransi, Pemilik Cargo, Pencharter, Galangan Kapal, Pemerintah / Syahbandar / PSC dll.

Kegiatan usaha pada awal berdirinya BKI adalah kegiatan dalam bidang klasifikasi kapal (sebagai bisnis utama) dimana usaha ini dilaksanakan secara nirlaba, namun sejalan dengan perkembangan usaha, maka saat ini selain kegiatan di atas, juga melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan kegiatan bidang jasa non klasifikasi, yaitu kegiatan usaha jasa konsultasi & supervisi. Sehingga saat ini kegiatan usaha BKI ada 2 (dua) kegiatan usaha, yaitu Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria dan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi & Supervisi.

Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria mencakup:

- Pemeriksaan konstruksi kapal, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas, registrasi kapal dan konstruksi lepas pantai.
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen.
- Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las lainnya.
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain.
- Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing / konsultan asing.
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.

Sedangkan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi & Supervisi mencakup :

- Jasa konsultansi & supervisi di bidang maritim dan industri serta teknik lainnya.
- Studi kelayakan di bidang teknologi maritim dan industri lainnya.
- Jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang minyak, gas dan ketenagakerjaan.
- Rekayasa teknik dan supervisi di bidang minyak dan gas.
- Pengujian DT dan NDT.
- Konsultansi sesuai standar nasional dan internasional.

Owner, Insurance Party , Cargo Owner, charterer, Shipyard, Government / Harbour Master / PSC etc.

At the beginning business activity of BKI is ship classification (as the main business) as a non-profit business, but in line with the growth of the business, today in addition to the above activities, as well as to diversify its business by developing non-class service sector activity, namely business consulting and supervision services. So, the current business activities in BKI there are 2 (two) business activities, the Business Classification & Statutory Services and Business Supervision & Consultancy Services.

Classification & Statutory Services includes :

- *Examination of ship construction, survey and testing also issuance of class certificate and ship registration.*
- *Inspection and testing of floating facilities and offshore construction facilities.*
- *Testing and certification of materials and components.*
- *Testing and certification of welder's qualification, welding inspectors and other welding experts.*
- *Carry out the inspection and the certification in the field of statutory based on the authorization of the Government of Republic of Indonesia and from other governments.*
- *Acting as an agent or representative of foreign classification / foreign consultants.*
- *Carry out the certification according to international standards.*

Supervision & Consultancy Services includes:

- *Consultancy and supervision services in the maritime and industrial fields as well as other technical services.*
- *Feasibility study in the maritime fields technology and other industries.*
- *Inspection and certification services in the oil& gas and labor field.*
- *Engineering and technical supervision in the oil and gas field.*
- *DT and NDT Testing.*
- *Consultancy according to national and international standards.*

- Pelatihan keahlian di bidang teknik.
- Tank cleaning & sludge processing.
- Pencegahan korosi.

Setelah beroperasi selama 47 tahun, BKI telah mencapai keberhasilan dan kondisi sebagai berikut :

- Berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 21 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di 1 (satu) cabang di Singapore.
- Telah memiliki kerja sama dengan hampir semua badan klasifikasi asing anggota IACS.
- Menerbitkan Rules & Regulation di bidang klasifikasi kapal dan setiap tahun menerbitkan Register Kapal dan Register ISM Code & ISPS Code
- Telah mendapatkan pelimpahan tugas / wewenang dari Pemerintah Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria.
- Telah mendapat penunjukan inspeksi dan sertifikasi dari Pemerintah cq Direktorat Jenderal Migas dan Departemen Tenaga Kerja.
- Telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 : 2008 dan telah mendapatkan sertifikat mutu ISO 9001 : 2008 dari badan sertifikasi internasional.
- Telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SNI 19-17020 (akreditasi perusahaan jasa inspeksi teknik) dan SNI 19-17025 (akreditasi laboratorium).

- *Training for technical expertise.*
- *Tank cleaning and sludge processing.*
- *Prevention of corrosion.*

After operating for 47 years, BKI has achieved success and the following conditions:

- *Headquartered in Jakarta and has 21 branches all around Indonesia, including 1 (one) branch in Singapore.*
- *Has had cooperation with almost all the Classification members of IACS.*
- *Issuing Rules & Regulations of ship classification and annually publishes Ship Register and Register of ISM Code and ISPS Code*
- *BKI has been delegated by the Government of the Republic of Indonesia, cq Directorate General of Sea Transportation Ministry of Transportation to carry out the statutory survey and certification.*
- *Has received the designation of inspection and certification from the Government cq the Directorate General of Oil and Gas and the Department of Labor.*
- *BKI has implemented a Quality Management System based on ISO 9001: 2008 and have gained the Quality Certificate ISO 9001: 2008 from International Agency.*
- *BKI has been implemented and certified SNI 19-17020 (accrediting technical inspection services company) and SNI 19-17025 (laboratory accreditation).*



Visi & Misi Perusahaan

Company Vision & Mission

Visi Perusahaan | *Company Vision*

Menjadikan BKI sebagai perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas sumber daya manusia dan kinerja perusahaan.

Making BKI as a reliable service company and be the best at product quality, the best quality of human resources and corporate performance.

Misi Perusahaan | *Company Mission*

- Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya.
 - Pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik.
 - Membentuk citra perusahaan bahwa jasa BKI dibutuhkan dan menjadi standar keselamatan dan kualitas.
 - Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk berpartisipasi melalui pengembangan pengetahuan serta penerapannya.
 - Membantu peningkatan pendapatan negara baik dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing.
- Give priority to ensuring safety of the people and objects in the sea and environmental protection through the development and examination of ships standard and other related facilities.*
- Manage the companies effectively and efficiently by applying the Good Corporate Governance.*
- Establish a corporate image that BKI services are needed and become a standard of safety and quality.*
- Provide an opportunity for nationwide marine experts to participate through the development of knowledge and its application.*
- Helps to increase revenues in the form of Rupiahs and foreign currencies.*

Kebijakan Mutu Perusahaan

Company Quality Policy

Sebagai perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2008, BKI memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (customer satisfaction) dan terus melakukan penyempurnaan (continuous improvement). Kebijakan Mutu Perusahaan adalah "mengutamakan pelayanan jasa bagi para pengguna jasa berdasarkan kepedulian yang tinggi terhadap masalah Keselamatan dan Mutu".

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, BKI memiliki Nilai - nilai Perusahaan yang diterapkan pada seluruh jajaran organisasi, meliputi :

- Moto perusahaan "TERPERCAYA", yang berarti jasa yang diberikan adalah berkualitas, dapat diandalkan, efisien, tepat waktu dan memiliki reputasi.
- Nilai - nilai perusahaan yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Pengguna Jasa, Kepemimpinan dan Penghargaan pada Karya / Prestasi Karyawan.
- Budaya Perusahaan "TERTIB" (Taqwa kepada Tuhan YME; Etos kerja yang tinggi; Reputasi yang senantiasa ditingkatkan; Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen dan sikap pribadi; Ilmu pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai; Baik dalam pelayanan dan hasil kerja).

Manajemen BKI menjamin :

- Persyaratan mutu berorientasi kepada standar mutu Internasional sesuai dengan ISO 9001:2008 dan pemenuhan pencapaian sasaran mutu perusahaan serta senantiasa melakukan penyempurnaan yang menerus terhadap mutu.

As company that implement quality management systems based on ISO 9001:2008, BKI has a commitment to give satisfaction to the user (customer satisfaction) and continue to make improvements (continuous improvement). Company Quality Policy is a "Priority of service for users based on high concern to the Safety and Quality".

In realizing these commitments, BKI has the Company's Value are applied throughout the organization, including:

- *The motto of the company is "TERPERCAYA / RELIABLE", which means the service provided is high quality, reliable, efficient, timely and reputable.*
- *The value of the company are : Integrity, Professionalism, Service User Satisfaction, and Leadership, and Employee Achievement.*
- *Corporate Culture "TERTIB" (Taqwa to God Almighty; high work ethic; enhanced of reputation; Orders in implementing management policies and personal attitudes; Science and Technology held; Good in service and result of work).*

BKI management ensures:

- *Quality requirements oriented to the international quality standard ISO 9001:2008 in the fulfillment of the achievement of the quality objectives of the company and make continuous improvements of quality.*

- Penerapan Sistem Mutu dan nilai-nilai perusahaan tersebut dalam seluruh kegiatan jasa.
- Tanggap terhadap kebutuhan pemakai jasa / masyarakat umum dan mengutamakan kepuasan pelanggan dan aspek keselamatan.
- Semua personil selalu diberi pemahaman tentang sistem mutu melalui pelatihan yang berkesinambungan serta penerapan sistem mutu di dalam semua jajaran organisasi.

Pemenuhan terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk kerja adalah hal yang mutlak dan mengikat bagi semua karyawan. Mutu adalah tanggung jawab semua karyawan yang bekerja di jajaran BKI.

- *Implementation of Quality System and the company values in all service activities.*
- *Responsiveness to the needs of users / public and customer satisfaction and safety aspect.*
- *All personnel are always given an understanding of the quality system through continuous training and implementation of quality systems in all ranks of the organization.*

Compliance to the policies, procedures and work instructions is an absolute and binding for all employees. Quality is the responsibility of all employees working in the ranks of BKI.



Sambutan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Message

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang terhormat,

Secara umum perekonomian Indonesia mencatat perkembangan yang cukup baik, bahkan Pemerintah menilai kinerja perekonomian pada 2011 merupakan terbaik setelah krisis 1998 meskipun menjelang akhir tahun dibayangi oleh krisis perekonomian di Eropa. Hal ini ditandai dari realisasi inflasi hanya 3,79% dan pertumbuhan ekonomi yang menembus 6,5% yang didukung oleh konsumsi domestik dan investasi, yang tentunya dihasilkan dari arus barang dan modal antar pulau maupun antar negara melalui perdagangan internasional.

Kondisi tersebut di atas mendorong PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tahun 2011 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 334 miliar atau naik 18% dari tahun sebelumnya, dan laba (rugi) komprehensif sebesar Rp 51 miliar atau naik 41% dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan kinerja pelayanan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dapat terus terjaga setiap tahunnya. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan Pemegang Saham untuk tahun 2011 sebagian besar dapat tercapai dan jumlah kontribusi pajak dan dividen meningkat kepada Negara serta tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar dapat terlaksana dengan baik. Hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono menyatakan wajar dalam semua hal yang material dan tingkat kesehatan perusahaan "AAA" sesuai indikator penilaian kesehatan BUMN.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Stakeholders of PT. Biro Klasifikasi Indonesia and gentlemen,

In general, Indonesia's economy developed quite a good record, even the Government assess the economic performance in 2011 is the best after the 1998 crisis, although towards the end of the year was overshadowed by the economic crisis in Europe. It is characterized from only 3.79% inflation and economic growth through the 6.5%, supported by domestic consumption and investment, which certainly result from the flow of goods and capital across the island and across the country through international trade.

The conditions mentioned above encourage PT. Biro Klasifikasi Indonesia in 2011 successfully posted revenue of Rp 334 billion or an increase 18% from the previous year, and earnings (loss) comprehensive of Rp 51 billion or an increase of 41% from the previous year. This achievement reflects the service performance to maintain customers trust each year. In general, the performance targets set for 2011 Shareholders can largely be achieved and the amount of contributions tax and dividend increases to the State as well as corporate social responsibility to the neighborhood can be done well. The audit results of financial statements by Public Accountant Office Puradiredja Kanaka, Suhartono state fair in all material respects and the health of the company is "AAA" according to State Owned Enterprise (SOE) health assessment indicators.

Kinerja tersebut di atas tidaklah untuk membuat insan jajaran perusahaan cepat berpuas diri. Sebagai penyedia layanan jasa klasifikasi dan jasa teknik terkait, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berupaya lebih meningkatkan profesionalisme dan integritasnya untuk memberikan pelayanan jasa prima, terpercaya dan beretika. Perusahaan juga perlu terus melanjutkan kiprah aktifnya dalam sidang IMO dan semakin mensejajarkan dirinya dengan klasifikasi asing lainnya di Asia melalui forum ACS (Asian Classification Societies) Executive Meeting untuk belajar dan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Dalam bidang konsultansi & supervisi, perusahaan juga tetap memperkuat eksistensinya dengan meraih pasar dari kebutuhan jasa industri swasta dan memperlengkapi infrastruktur serta kompetensi SDM untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa.

Secara umum, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi akan menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan nilai perusahaan secara jangka panjang. Perusahaan perlu mengimbangi kegiatan perusahaan dengan upaya pengembangan melalui investasi pada sumber daya manusia, kegiatan riset dan pengembangan, memperkuat database perusahaan serta pemenuhan mutu layanan yang berorientasi pada standar mutu internasional. Demikian juga, pemanfaatan IT untuk inovasi pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional harus terus dilanjutkan.

Seluruh pencapaian perusahaan di tahun 2011 dapat diraih atas rahmat dan karuniaNya semata, oleh karena itu Dewan Komisaris memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kepada jajaran Direksi dan staf yang mampu mempersempitkan kinerja perusahaan yang baik sesuai dengan visi dan misi perusahaan, Dewan Komisaris juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Demikian juga kepada stakeholders atas kepercayaannya kepada perusahaan, Pemegang Saham yang senantiasa memberikan saran dan arah pengelolaan perusahaan serta kepada Komite Audit yang telah bekerja sama dalam upaya pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita dalam melanjutkan kesuksesan PT. Biro Klasifikasi Indone-

Performance mentioned above is not to make a quick company ranks human complacency. As a provider of classification services and related engineering services, PT. Biro Klasifikasi Indonesia seeks further enhance the professionalism and integrity to deliver excellent services, reliable and ethical. The company also needs to continue its active pursuit in IMO assembly and align itself with the other foreign classification in Asia through a forum ACS (Asian Classification Societies) Executive Meeting to learn and improve their competence and capacity. Within field of consultancy and supervision, the company also continued to strengthen its presence in the market reach of the service needs of private industry and equipping of infrastructure and human resource competencies to improve service to service users.

In general, the Board of Commissioners together with the Board of Directors will emphasize the importance of maintaining growth in the long term corporate value. Companies need to offset the company's activities with development efforts through investment in human resources, research and development activities, strengthening the company's database as well as the fulfillment of quality oriented services of international quality standards. As well the utilization of IT for innovation and improved service effectiveness and efficiency of operations should be continued.

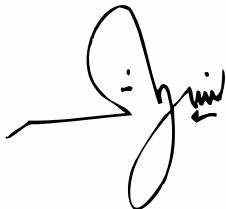
The whole company's achievements in 2011 can only be achieved by His mercy and grace alone, therefore, the Board of Commissioners offer gratitude to the presence of Almighty God. To the Board of Directors and staff who able to present a good corporate performance in accordance with the vision and mission, the Board of Commissioners also expressed our thanks and high appreciation. As well to the company's shareholders for thrustiness who continues to provide advice and direction of the management company and to the Audit Committee who have worked together in efforts to implement the task of the Board of Commissioners.

May God the Almighty guide us in the continuing success of PT. Biro Klasifikasi Indonesia in the future

sia (Persero) di masa mendatang serta secara konsisten mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

and consistently able to apply the principles of Good Corporate Governance.

a.n. Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
Komisaris Utama
On behalf of the Board of Commissioners of PT. Biro Klasifikasi Indonesia
President Commissioner



Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA

Profil Dewan Komisaris

Commissioners Profile



Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP.155/MBU/2009 tanggal 28 Juli 2009, adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Utama :
Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA
2. Komisaris :
Drs. Riyadi Widiasmoro, MSi
3. Komisaris :
Liliek Mayasari, SE

Board of Commissioners based on Keputusan Menteri BUMN No. KEP.155/MBU/2009 on July 28, 2009, are as follows:

1. President Commissioner :
Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA
2. Commissioner :
Drs. Riyadi Widiasmoro, MSi
3. Commissioner :
Liliek Mayasari, SE

Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA

Komisaris Utama; Usia 61 tahun, Pendidikan : Akademi Ilmu Pelayaran (1974), Mualim I Pelayaran Besar/ ANT. I (1980), Marine Inspector A (1985), Kesyahbandaran Kelas I (1986), Port State Control (1996), International Safety Management (1997), STIA LAN RI / Strata 1 (1997), AIMS (ADM) / Strata 2 (2000). Pengalaman : Mualim s/d Nakhoda kapal niaga (1974 – 1982); Departemen Perhubungan (1983 – 2009), antara lain di Adpel Kelas I Sorong (2002 – 2004), Adpel Utama Makassar (2004 – 2007), Direktur Perkapalan dan Kepelautan (2007 – 2009); Project Manager Penyusunan Standar Kapal Non Konveksi (NCVS) Indonesia (2009); Liasion Officer pada Project NCVS Indonesia (2009 – sekarang).



President Commissioner; 61 years old, Education: Pilotage Academy (1974), Ocean Going Shipping 1st Navigator / ANT. I (1980), Marine Inspector A (1985), First Class Kesyahbandaran (1986), Port State Control (1996), International Safety Management (1997), STIA LAN RI / S 1 (1997), AIMS (ADM) / S 2 (2000). Experience Merchant Ship Chief Officer - Master (1974 - 1982); Department of Transportation (1983 - 2009), among others in Adpel Class I Sorong (2002 - 2004), Adpel Makassar (2004 - 2007), Director of Shipping and Sea Fearer (2007 - 2009); Project Manager preparation of Non Convention Vessel Standard (NCVS) Indonesia (2009); Liason Officer at NCVS Indonesia Project (2009 - present).

Drs. Riyadi Widiasmoro, MSi

Komisaris; Usia 60 tahun; Pendidikan : STIA LAN RI (1978), Universitas Indonesia / Magister Sains (1995). Pengalaman : Departemen Keuangan (1972), Dosen STIA LAN RI (1995 – sekarang), Direktur Operasi PT. Kliring Berjangka Indonesia (2000 – 2002), Direktur Perencanaan & Pengembangan PT. Bhanda Ghara Reksa (2002 – 2009).



Commissioner; 60 years old; Education: STIA LAN RI (1978), University of Indonesia / Master of Science (1995). Experience: Ministry of Finance (1972), Lecturer of STIA LAN RI (1995 - present), Director of Operations PT. Kliring Berjangka Indonesia (2000 - 2002), Director of Planning & Development PT. Bhanda Ghara Reksa (2002 - 2009)



Liliek Mayasari, SE

Komisaris; Usia 41 tahun; Pendidikan : Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (1994). Pengalaman : Ditjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (1996 – 1998), Kementerian BUMN (1998 – sekarang).

Commissioner; 41 years old; Education: Master of Economy, Gajah Mada University(1994). Experience: Coaching for State-owner Corporations Enterprises , Ministry of Finance (1996 - 1998), State Minister for State-owner Corporation (1998 - present).



Sambutan Direktur Utama

Message from President Director

Awali perbuatan baik dengan niat baik sehingga keinginan mewujudkan hari ini menjadi lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini bisa terwujud. Itulah kata-kata bijak yang memotivasi kami dan seluruh karyawan untuk terus memberikan yang terbaik bagi BKI serta bagi para pemakai jasa dan seluruh pemangku kepentingan.

Sudah selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam tahun 2011 ini banyak hal baik yang berhasil diraih dan diwujudkan oleh BKI. Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 yang menegaskan pemberlakuan azas cabotage di Indonesia telah memberikan dorongan dan kekuatan bagi bangkitnya dunia pelayaran dan industri perkapalan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Register BKI membukukan adanya pertumbuhan positif jumlah kapal yang diklasikan sepanjang 2011. Hasil ini tentunya tidak lepas dari upaya konsisten BKI untuk membangun dan menjaga kepercayaan para pemakai jasa dan pemangku kepentingan, terutama kalangan asuransi, para pemilik dan operator kapal, serta instansi pemerintah terkait. Kepercayaan yang semakin baik itu harus terus dijaga karena merupakan modal terpenting dalam membangun reputasi sebuah badan klasifikasi. Upaya kami menjaga kepercayaan itu adalah dengan selalu menjaga kualitas cara dan hasil kerja, meningkatkan kecepatan pelayanan, mening-

Start the good deeds with the good intentions that embody the desire that today better than yesterday and tomorrow better than today could be realized. That's the wise words which motivate us and our employees to continue to provide the best for BKI, shareholder and stakeholder.

It's a must that we have to prayed and thanked to Lord Almighty, because in the 2011 was a lot of good things that we achieved and realized . Presidential Instruction No. 5 - 2005 regarding National Sailing Industry Empowerment and Admiralty Law No. 17 - 2008 which was followed by Government Regulation No. 22 - 2011 which confirmed the application of the principle of cabotage in Indonesia had given impetus and strength to the rise of shipping business and shipbuilding industries nationwide. In line with this, the Register BKI posted a positive growth of number of the ships classed throughout 2011. These results are certainly not out of BKI consistent effort to build and maintain the confidence of users and stakeholders, especially among insurers, ship owners and operators, as well as related government agencies. The trust must be maintained as it is the most important asset in the building of reputation of an entity of classification body. Our efforts to maintain the trust is always maintain the quality of the way and the work, increase the speed of service, improve the competence and capabilities of human resources, and improve operational efficiency and effectiveness

katkan kompetensi dan kapabilitas SDM, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui penerapan sistem berbasis teknologi informasi.

Dalam tahun 2011 ini kami mencatat beberapa hal signifikan baik eksternal maupun internal yang dilakukan BKI. Dalam kancang internasional, BKI memantapkan eksistensi dan peranannya dalam forum Asian Classification Societies Executive (ACS) Meeting dengan secara konsisten mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Technical Management Group ACS. BKI juga menghadiri forum pertemuan Asean Shipbuilding Expert Forum (ASEF) dan seminar yang diselenggarakan Korean International Cooperation Agency (KOICA) yang diadakan di Korea Selatan. Dalam kesempatan lain BKI juga bergabung dalam delegasi pemerintah RI menghadiri Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) untuk mendukung pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C.

Kerjasama dengan class partner American Bureau of Shipping dan Nippon Kaiji Kyokai juga memasuki babak baru terkait dengan proyek prestisius pembangunan kapal Floating LNG Plan and Storage Inpex Masa-la. Dengan dukungan penuh BP Migas BKI diminta untuk bermitra dengan ABS dalam melakukan kajian Front End Engineering Design FLNG Inpex Masela tersebut. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi kemajuan dan reputasi BKI karena pihak pemerintah RI melalui BP Migas memberikan dorongan dan kepercayaan kepada badan klasifikasi nasional untuk terlibat dalam proyek berteknologi tinggi yang menjadi incaran badan-badan klasifikasi ternama dunia.

Dalam lingkup nasional BKI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk pengembangan sistem E-Audit, dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi untuk pengembangan kerjasama penelitian proses dan material kapal fiberglass, dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk pengembangan kerjasama pemanfaatan fasilitas dan SDM, dan dengan TUV Rheinland Indonesia yang merupakan bagian dari lembaga pemeriksa dan sertifikasi terkemuka dari Jerman untuk pengembangan kerjasama pemeriksaan dan sertifikasi produk-produk import.

through the application of information technology-based systems.

In 2011 we recorded some significant external and internal committed by BKI. In the international arena, BKI established the existence and role in the Asian forum Executive Classification Societies (ACS) Meeting with consistently supported and participated in the Technical Management Group ACS. BKI also attended the meeting of ASEAN Shipbuilding Expert Forum (ASEF) and a workshop organized by Korean International Cooperation Agency (KOICA) held in South Korea. On another occasion BKI also joined the government delegation to attend the Board Meeting of the International Maritime Organization (IMO) to support the come back of Indonesia as a member of the IMO Council Category C.

Cooperation with the class partner American Bureau of Shipping and Nippon Kaiji Kyokai also entered a new phase of development associated with prestigious projects Floating LNG ships and Storage Inpex Masela. With the full support of BP Migas, BKI asked to partner with ABS in reviewing the Front End Engineering Design FLNG Inpex Masela. This is of course an added value for the progress and reputation BKI because the government of Indonesia through the BP Migas gives encouragement and confidence to the national classification bodies to engage in high-tech project that became the target of world-renowned classification bodies.

In the national scope BKI signed MOU with BPKP for the development of E-Audit, with BPPT for the development of cooperative research processes and materials of fiberglass boat, with Human Resources Development - Ministry of Transportation for the development of joint use of facilities and human resources, and with TUV Rheinland Indonesia, which is part of the inspection and certification agencies from Germany leading to the development of co-operation inspection and certification of imported products.

Berkaitan dengan sinergi antar BUMN, BKI juga mengembangkan sinergi dengan PT. PANN (Persero) dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk supervisi perawatan armada kapal kedua perusahaan tersebut.

Di lingkup internal bidang pengembangan organisasi dan SDM BKI melakukan penyempurnaan sistem operasi berbasis Teknologi Informasi yang mengintegrasikan Classification Operation System (CopS), Financial Operation System (FinOpS), dan Consultancy & Supervision Operation System (CSOpS) ke dalam sistem on line yang terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas mekanisme input, proses, dan output sekaligus meningkatkan aspek monitoring serta ketepatan dan kecepatan pelaporan. Program pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan in-house training, refreshing dan up grading course terpadu bagi para Surveyor dan Inspektor, serta mengirimkan kader-kader BKI untuk tugas belajar mengambil program pasca sarjana di ITS Surabaya, World Maritime University di Malmo, Swedia, Osaka University Jepang, serta mengikuti training-training pendek di kantor pusat Nippon Kaiji Kyokai di Tokyo, Jepang.

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada bidang usaha klasifikasi, jumlah kapal dengan klas berlaku yang tercatat dalam Register kapal BKI pada akhir tahun 2011 sebanyak 7.528 unit dengan total tonase 11.948.154 GT, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 6.400 unit dan 9.594.091 GT.

Kondisi sosial dan perekonomian nasional selama 2011 yang relatif stabil dan kondusif menjadikan BKI mampu mempertahankan kinerja usahanya. Realisasi pendapatan kotor meningkat dari Rp 282,23 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 335,12 miliar, yang berasal dari kontribusi bidang usaha klasifikasi sebesar Rp 215,27 miliar yang meningkat 19,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan bidang usaha Konsultansi dan Supervisi sebesar Rp 119,85 miliar yang meningkat 17,28 persen. Untuk realisasi laba setelah PPh Badan, BKI berhasil membukukan angka sebesar Rp 51,28 miliar atau di atas tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 36,22 miliar.

Related to the synergies among BUMN, BKI also develops synergies with PT. PANN (Persero) and PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) for fleet maintenance supervision of the two companies.

Internally, Organizational Development and HR BKI make improvements based on IT operating system that integrates Operation Classification System (CopS), Financial Operation System (FinOpS), and Consultancy & Supervision Operation System (CSOpS) into an integrated system on line to improve efficiency and effectiveness of the mechanism of input, process, and output while improving aspects of monitoring and the speed and accuracy of reporting. Development and improvement program of HR competencies conducted by in-house training, refreshing and an integrated up grading course for the Surveyors and Inspectors, as well as personnel sent to the task of learning to take graduate courses at ITS Surabaya, World Maritime University in Malmo - Sweden, Japan Osaka University, and follow the short trainings in Nippon Kaiji Kyokai headquarters in Tokyo- Japan.

As has mentioned above, in the classification business, the number of ships with the valid class registered in the Register BKI at the end of 2011 is 7528 units with a total tonnage of 11,948,154 GT, an increase compared from 2010 which amounted to 6400 units and 9,594,091 GT.

Social conditions and the national economy during 2011 is relatively stable and conducive to making BKI able to maintain its performance. Realization of gross revenues increased from Rp 282.23 billion in 2010 to Rp 335.12 billion , which comes from the contribution of the business classification Rp 215.27 billion, increasing 19.57 percent over the previous year and from the business Consultancy and Supervision Rp 119.85 billion, increasing 17.28 percent. For the realization of profit after income tax agency (PPh Badan), BKI managed Rp 51.28 billion over the previous year, amounting to Rp 36.22 billion.

Berdasarkan standard penilaian Kementerian BUMN dan hasil audit Kantor Akuntan Publik, BKI kembali dapat mempertahankan tingkat kinerja manajemen "Sehat AAA". Keberhasilan ini tidak terlepas dari angka Net Return on Equity (Net ROE) yang mencapai 41,58 persen dan Return on Asset (ROA) yang mencapai 31,58 persen. Bila dibandingkan suku bunga rata-rata bank yang berlaku pada akhir 2011 sebesar 6-7 persen per tahun, maka angka-angka ini menunjukkan kinerja manajemen dalam memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham atau terhadap total asset dapat dikategorikan cukup baik.

Mencermati segala yang berhasil kita raih, sudah sepantasnya kita mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih-sayang, pentunjuk, lindungan, dan ridho-Nya sehingga BKI dapat merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2011 dengan hasil yang baik.

Mewakili Direksi dan segenap jajaran BKI kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Negara BUMN c.q. Deputi Menteri Bidang Usaha Jasa beserta jajarannya serta kepada Menteri Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut beserta jajarannya atas segala bantuan, dukungan, dan arahan yang diberikan.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan pula kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan, arahan, dan koreksi serta peranannya sebagai mitra kerja yang konstruktif sehingga Perusahaan dapat merealisasikan program kerjanya dan memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara.

Kepada seluruh karyawan dan karyawati BKI baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, Direksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangsih, dedikasi, dan produktivitas yang telah diberikan dalam ikut mensukseskan realisasi program kerja Perusahaan di tahun 2011.

Mengakhiri pesan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan atas segala kepercayaan, dukungan, ban-

Based on the standard assessment of the Ministry of BUMN and audit of Public Accounting Firm, BKI back to maintain the level of performance management "Sehat AAA". The success rate is including the Net Return on Equity (ROE Net), which reached 41.58 percent and Return on Assets (ROA), which reached 31.58 percent. When compared to the average interest rate applicable bank in late 2011 of 6-7 percent per year, these figures demonstrate the performance of management in maximizing profits for shareholders or to total assets can be considered quite good.

Looking at all the success we achieve, we have to thankful to the Lord Almighty, for all the grace, compassion, directions, protection, and His blessing so that BKI can realize the good Corporate Work Plan and Budget 2011.

On behalf of Board of Directors and all staff, we would like to express our appreciation and gratitude to the State Owned Enterprises Minister c.q. Deputy Minister of State Business Services and the staff, to the Transportation Minister c.q. Director General of Sea Transportation and the staff for all their help, support, and referrals provided.

Our appreciation and thanks also to convey to the Board of Commissioners who have provided input, guidance, and correction as well as its role as a constructive partner so that the company can realize its work program and make a positive contribution to the nation and state.

To all BKI employee in Head Office and Branch Offices, Directors expressed thanks and appreciation for all the contributions, dedication, and productivity that have been granted in part the success of the realization of the Company's work program in 2011.

An end to these messages, we want to thank you and appreciation to the stakeholders for all the confi-

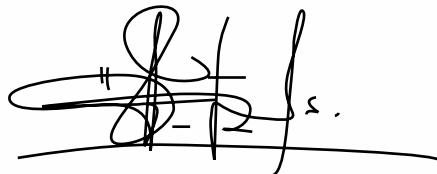
tuan, dan partisipasinya dalam ikut memberdayakan dan memajukan BKI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi niat baik dan usaha kita.

dence, support, assistance, and participation in part to empower and advance the BKI.

May Lord Almighty bless our good intentions and efforts.

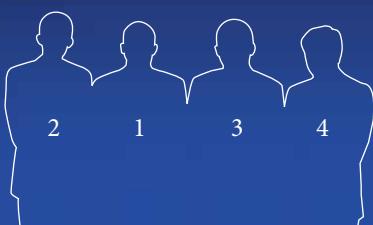
A.n. Direksi
Direktur Utama
On Behalf of Board of Directors
President Director



Capt. Purnama, MM

Profil Direksi

Board of Directors Profile



1. **Purnama Sembiring Meliala** (Direktur Utama / President Director)
2. **Edy Cahyono** (Direktur Keuangan dan Personalia / Director of Finance and Personnel)
3. **Ajatiman** (Direktur Teknik dan Pengembangan / Director of Technical and Development)
4. **Setudju Dangkeng** (Direktur Operasi dan Pemasaran / Director of Operations and Marketing)

Purnama Sembiring Meliala



Usia 56 tahun menjabat sebagai Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia sejak tanggal 8 Desember 2010. Beliau memulai karirnya di PT. Samudera Indonesia Tbk dan kemudian sebagai pegawai di Kementerian Perhubungan. Jabatan yang beliau emban sebelumnya antara lain pada periode 2007 - 2009 sebagai Kepala Sub Direktorat Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pada periode 2009 - 2010 menjabat sebagai Administrator Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Beliau meraih gelar Sarjana bidang Nautika di Lembaga Pendidikan Tinggi Maritim Jakarta dan meraih gelar Master Manajemen di bidang pemasaran pada Institut Pengembangan Kewirausahaan Indonesia (1997).

56 years old served as President Director of PT. Biro Klasifikasi Indonesia on December 8, 2010. He began his career at PT. Samudera Indonesia Tbk and then as an employee in the Kementerian Perhubungan. His previous positions entailed, among others, in the period 2007 - 2009 as Head of Sub Direktorat Pemanduan dan Penundaan Kapal - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, and in the period 2009 - 2010 served as the Administrator of Teluk Bayur Port- Padang. He holds a Bachelor's degree in the Nautical Maritime in Lembaga Pendidikan Tinggi Maritim Jakarta and Management Master's degree in marketing at Institut Pengembangan Kewirausahaan Indonesia (1997).

Edy Cahyono



Usia 43 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Personalia PT. Biro Klasifikasi Indonesia sejak tanggal 8 Desember 2010. Beliau memulai karirnya sebagai Ahli Geologi di PT. Kaltim Prima Coal (1994 - 1995) dan kemudian sebagai pegawai di Direktorat Jenderal BUMN Departemen Keuangan (2001 - 2002). Jabatan yang beliau emban sebelumnya antara lain sebagai Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan (2002 - 2006), Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Jasa Logistik dan Pariwisata (2008 - 2010). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Master of Science dari Universitas Indonesia.

43 years old served as Director of Finance and Personnel PT. Biro Klasifikasi Indonesia on December 8, 2010. He began his career as a Geologist in the PT. Kaltim Prima Coal (1994 - 1995) and later as an employee in the Direktorat Jenderal BUMN Departemen Keuangan (2001-2002). His previous positions entailed, among others as Head of Business Restructuring and Privatization of the Banking and Financial Services (2002 - 2006), Head of Restructuring and Privatization Logistics Services and Tourism (2008-2010). He holds a Bachelor of Engineering Geology from the Universitas Gajah Mada, Yogyakarta and Master of Science from the Universitas Indonesia.

Ajatiman



Usia 58 tahun menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia sejak tanggal 8 Desember 2010. Beliau memulai karirnya di BKI sejak tahun 1980 dan telah menduduki jabatan di berbagai posisi, antara lain Kepala Cabang Cirebon (1984 - 1987), Kepala Seksi Klasifikasi dan Sertifikasi, Divisi Survey (1991 - 1993), Kepala Seksi Pelaporan dan Sertifikasi, Divisi Survey (1993 - 1997), Kepala Divisi Survey (1997 - 2000), Kepala Satuan Perencanaan (2000 - 2003), Kepala Unit Konsultansi & Supervisi (2007 - 2010). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya.

58 years old served as Director of Technical and Development PT. Biro Klasifikasi Indonesia on December 8, 2010. He began his career at BKI since 1980 and has held positions in various positions, including Cirebon Branch Head (1984-1987), Head of Classification and Certification Section, Survey Division (1991-1993), Head of Reporting and Monitoring Section, Survey Division (1993 - 1997), Head of Survey Division (1997 - 2000), Head of Planning Unit (2000 - 2003), Head of Consultancy & Supervision Unit (2007-2010). He holds a Bachelor of Shipping Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Setudju Dangkeng



Usia 57 tahun menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran PT. Biro Klasifikasi Indonesia sejak tanggal 8 Desember 2010. Beliau memulai karirnya di BKI sejak tahun 1986 dan telah menduduki jabatan di berbagai posisi antara lain Kepala Cabang Bitung (1996 - 2002), Wakil Kepala Cabang Utama Balikpapan (2002 - 2003), Kepala Cabang Singapore (2003 - 2008), Kepala Cabang Utama Batam (2008 - 2010). Beliau meraih gelar Sarjana Mesin Universitas Hasanuddin, Makassar dan gelar Sarjana Ekonomi di Manado, Sulawesi Utara.

57 years old served as Director of Operations and Marketing of PT. Biro Klasifikasi Indonesia on December 8, 2010. He began his career at BKI since 1986 and has held positions in various positions including Bitung Branch Head (1996-2002), Deputy Head of the Balikpapan Main Branch (2002-2003), Head of Singapore Branch (2003-2008), Head of the Batam Main Branch (2008-2010). He holds a Bachelor of Engineering from Universitas Hasanuddin and a Bachelor of Economics in Manado, North Sulawesi.

Aktifitas Manajemen

Management Activity

Kegiatan Manajerial dan Implementasi GCG

Pelantikan Pejabat



Managerial Activities and Implementation of GCG

The official inauguration



Salah satu hal yang dilakukan oleh Manajemen BKI untuk menjamin kinerja manajemen dan organisasi pada tingkat yang baik adalah dengan secara berkala melakukan penyegaran organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut Manajemen BKI dalam tahun 2011 melakukam dua kali penyegaran organisasi yaitu dalam bulan Januari dan September. Tujuan penyegaran organisasi ini adalah untuk tour of duty dan juga pembinaan pola karier pegawai. Selain itu sekaligus pula untuk menjaga agar Manajemen BKI selalu siap menghadapi perubahan, tantangan, peluang, dan persaingan usaha yang semakin ketat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para pemakai jasa dan pemangku kepentingan.

One of the things that have been done by BKI Management to ensure the performance of management and organization at a good rate is to periodically conduct refresher organization. In this connection BKI Management in 2011 to double the organization's refresh in January and September. The purpose of this organization is to refresher tour of duty and also coaching career patterns of employees. In addition it is also well to keep the BKI Management always ready to faces the changes, challenges, opportunities, and competition is getting tougher and able to provide better services for users and stakeholders.

Rapat Staf**Staff Meeting**

Manajemen BKI secara berkala mengadakan Rapat Staf yang diikuti oleh Direksi dan para pejabat terkait Perseroan. Selain sebagai sarana bagi Direksi untuk memberikan pengarahan, dalam Rapat Staf ini juga dilakukan evaluasi dan pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dari masing-masing unit kerja.

BKI Management regularly held staff meetings attended by Directors and relevant officials of the Company. Than as a means for the Board to provide guidance, in a staff meeting was also carried out an evaluation and discussion related to the execution of daily tasks of each work and production unit.

Rapat Evaluasi Kinerja**Performance Evaluation Meeting**

Untuk menjamin agar Perseroan berjalan sesuai rencana serta mencapai tujuan dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan, pada setiap pertengahan tahun Manajemen BKI menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Semester I. Dalam acara rapat yang diikuti seluruh pejabat dan kepala unit produksi Perseroan itu dibahas pencapaian target, kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi dan kebijakan manajemen untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam praktik di lapangan.

To ensure that the Company goes according to plan and achieve goals and targets set out in the Work Plan Budget and Revenue, on any mid-year meeting held BKI Management Performance Evaluation of Semester I. In the meeting that followed by all officials and heads of production units of the Company's achievement of the targets discussed, obstacles encountered, and solutions and management policies to address problems that occur in practice in the field.

Management Meeting and Technical and Opera-

Rapat Kerja dan Technical and Operational Meeting Surveyor and Inspector (TOMSI)



Manajemen BKI menetapkan Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan (RKAP) Perusahaan untuk tahun yang akan datang dalam acara Rapat Kerja yang diadakan pada pertengahan semester II tahun berjalan. Dalam acara Rapat Kerja yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural Perseoran yang terkait itu juga dibahas realisasi target pendapatan dan kinerja korporasi dalam tahun berjalan beserta taksasi pencapaian target yang diproyeksikan dapat diraih. Setelah acara Rapat Kerja kegiatan dilanjutkan dengan Technical and Operational Meeting Surveyor and Inspector (TOMSI) yang membahas berbagai permasalahan teknis yang terkait dengan pelaksanaan operasional dan pelayanan jasa di bidang klasifikasi dan konsultansi dan supervisi sebagai bidang usaha utama Perseroan.

Technical and Operational Meeting Surveyor and Inspector (TOMSI)

BKI Management set a Work Plan Budget and Revenue (RKAP) of the Company for the coming year in the event of the Management Meeting held in the middle of the second semester of the current year. In the event attended by officials associated structural also discussed the realization of revenue targets and corporate performance in the current year and a projected target achievement. After the Management Meeting, continued with the Technical and Operational Meeting Surveyor and Inspector (TOMSI) that address various technical issues related to the implementation of operational and service activities in the field of classification and consultancy and supervision as the main business of the Company.

Audit Sistem Manajemen Mutu



Quality Management System Audit

sesuai standar ISO 9001:2008 secara berkala dilakukan audit oleh auditor eksternal dari Global Group Registrar. Audit dilakukan pada unit-unit kerja yang disyaratkan baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang secara sampling.

Audit Implementasi GCG



Perseroan juga telah menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau yang dikenal sebagai Prinsip Good Corporate Governance (GCG). Terkait dengan hal tersebut Manajemen Perseroan juga telah memenuhi persyaratan tentang perlunya dilakukan audit atas pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG di BKI. Direksi Perseroan bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan pihak Auditor bersama-sama membahas hasil temuan audit untuk perbaikan implementasi GCG di Perseroan.

Kerjasama dengan Pihak Terkait

Dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT)



ards ISO 9001:2008, Company's periodically audited by external auditors of the Global Group Registrar. Audit conducted on units of work that required both at Head Office and Branch Office in sampling.

GCG Implementing Audit

The Company also implementing the Principles of Good Corporate Governance known as GCG. In regard of the GCG, Company's management has been fullfill the requirements of audit of the implementation of the GCG Principles in BKI. Board of Directors together with the Board of Commissioners and the Auditor together to discuss the audit findings to the improvement in the Company's implementation of GCG.

Cooperation with Related Parties

Cooperation With Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT)

teknologi terkait ketentuan dan proses pembuatan kapal fiberglass di Indonesia, Manajemen Perseroan telah menandatangani kerja sama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Melalui kerjasama ini selain menyediakan staf teknik dan peraturan yang terkait, Perseroan juga mendapat manfaat dari hasil studi yang dilakukan yang terkait dengan misi Perseroan untuk membantu industri kapal fiberglass dalam meningkatkan kualitas dan memenuhi standar persyaratan konstruksi yang berlaku.

Dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pelaksanaan audit keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjalin kerjasama dengan Kementerian BUMN melalui Nota Kesepahaman tentang penyedian informasi keuangan secara elektronik untuk kepentingan audit. Berkaitan dengan hal tersebut Direktur Utama Perseroan bersama dengan para Direktur Utama BUMN lainnya telah menandatangani Nota Kesepahaman Electronic Audit (E-Audit) dengan BPK. Dengan adanya nota kesepahaman ini nantinya BPK dapat mengakses data dan informasi keuangan Perseroan secara elektronik sehingga dapat mempercepat dan mempermudah dalam pengumpulan data dan melakukan review berkaitan dengan audit yang akan dilaksanakan.

provision of related technologies and process of making fiberglass boats in Indonesia, the Management has entered into cooperation with BPPT. Through this partnership in addition to providing technical staff and associated regulations, the Company also gets a benefit from the results of studies carried out related to the Company's mission to help the fiberglass boat industry to improve quality and meet the construction requirements of the applicable standards.

Cooperation With Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



To optimize the function of supervision and implementation of state financial audit, the State Audit Board (BPK) has formed a partnership with the Ministry of BUMN through a Memorandum of Understanding (MOU) on the provision of financial information electronically for audit purposes. In this regard the Director of the Company together with the Managing Director of another BUMN has signed a Memorandum of Understanding of Electronic Audit (E-Audit) with BPK. With this MOU, BPK will be able to access data and company financial information electronically so that it can speed up and simplify the data collection and review relating to the audit to be carried out.

Dengan TUV Rheinland

Di tahun 2011 ini Perseroan juga memperluas kerjasama dengan mitra kerja badan akreditasi dan sertifikasi internasional TUV Rheinland yang berpusat di Jerman. Melalui perluasan kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk saling memanfaatkan sumber daya masing-masing berkaitan dengan rencana pengembangan kegiatan sertifikasi produk-produk import.

Cooperation With TUV Rheinland

In 2011, the Company also expanded cooperation with partners of international accreditation and certification bodies TUV Rheinland, based in Germany. Through the expansion of this cooperation both parties agree to mutually utilize their respective resources associated with the development plan certification activities of imported products.

Dengan Korean Ship Safety Technology Authority (KST)

Dalam rangka mengembangkan studi tentang standar dan teknologi keselamatan kapal serta meningkatkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia Perseroan di bidang tersebut, Direktur Utama Perseroan juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Korean Ship Safety Technology Authority (KST). Dengan adanya Nota Kesepahaman ini BKI dan KST sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan kajian dan pengembangan standar dan peraturan keselamatan untuk kapal-kapal yang berlayar domestik.

Cooperation With Korean Ship Safety Technology Authority (KST)

In order to develop the study of ship safety standards and technologies and increase the competence and expertise of human resources , Director has signed a Memorandum of Understanding with Korean Ship Safety Technology Authority (KST). With this MOU, BKI and KST agreed to cooperate in conducting the study and development of standards and safety regulations for the domestic ship.

Kontribusi Bagi Para Pemangku Kepentingan

Round Table Discussion Badan Litbang Perhubungan



BKI secara aktif ikut serta dalam berbagai upaya edukasi, diskusi, dan seminar untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan berkaitan dengan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim. Upaya itu antara lain diwujudkan melalui partisipasi Manajemen Perseroan baik sebagai pembicara maupun pembahas dalam forum Round Table Discussion yang secara berkala diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan.

Contributions for Stakeholders

Round Table Discussion with Badan Litbang Perhubungan

BKI is actively participating in various educational efforts, discussions, and seminars to improve understanding of the stakeholders related to the safety of ships and maritime environmental protection. These efforts, among others, realized through the participation of the Company's management as both a speaker and a discussant in a Round Table Discussion forums are regularly held by the Research and Development Agency –Ministry of Transportation.

Kunjungan Peserta Kursus Marine Underwriter



Manajemen Perseroan secara aktif juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para peserta kursus marine underwriter. Diharapkan melalui sosialisasi dan edukasi ini para marine underwriter akan semakin memahami tugas dan peranan badan klasifikasi sebagai lembaga independen yang melakukan pemeriksaan

Participants of The Marine Underwater Course

Company management also actively disseminate and educate the participant on the Marine Underwriter Course. Hopefully, through socialization and education, the marine underwriter will understand the duties and role as an independent classification body to conduct the examination and assessment of the fea-

dan penilaian kelaikan konstruksi lambung dan instalasi permesinan suatu kapal dikaitkan dengan kepentingan perasuransian.

Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO)



Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO) dikenal sebagai forum para praktisi dan pemerhati yang memperjuangkan penerapan azas cabotage secara konsisten dan menyeluruh di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Pelayaran nomor 20 Tahun 2008. Forum ini beranggotakan para tokoh dunia maritim, kalangan, akademisi, praktisi, asosiasi terkait dan pendukung sektor transportasi laut termasuk BKI. Sebagai komponen bangsa yang terkait langsung dengan sektor maritim, BKI secara aktif mendukung langkah dan kegiatan yang digagas oleh Incafo. Direktur Utama Perseroan secara khusus diudang oleh Incafo untuk bersama-sama memberikan advokasi implementasi azas cabotage ini berkaitan dengan kesiapan BKI sebagai badan klasifikasi nasional di depan para anggota Komisi V DPR RI.

Acara Talkshow Keselamatan Kapal Penyeberangan



sibility of hull construction and installation of machinery of a vessel associated with insurance interests.

Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO)

Indonesian Cabotage Advocation Forum (Incafo) known as the forum of practitioners and observers of the fight for the implementation of cabotage principle consistently and thoroughly in Indonesia according to the mandate of Undang-Undang Pelayaran No 20- 2008. This forum consists of the maritime leaders, community groups, academics, practitioners, related associations and supporting marine transportation sector, including BKI. As a component of a nation directly related to the maritime sector, BKI actively support the activities initiated by INCAFO. The President Director is specially invited by INCAFO together to gives the implemenation advocation of the cabotage principle related to the readiness of BKI as national classification bodies in front of the members of the Komisi V DPR RI.

Talkshow Events of The Safety of Ferry Boats

Perseroan mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan sosialisasi berbagai regulasi dan standar yang terkait dengan keselamatan pelayaran. Manajemen Perseroan bersama-sama Manajemen PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendampingi Dirjen Perhubungan Laut sebagai nara sumber dalam acara talkshow di TV yang mengangkat tema aspek keselamatan kapal penyeberangan.

The Company supports the efforts of the Government, cq. Directorate General of Sea Transportation in information dissemination regulations and standards related to safety of sea transportation. Management jointly Management of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) assist the Director General of Sea Transportation as a resource in talk show on TV of the theme the safety aspects of the ferryboat.

Seminar Tenik BKI – KR



Technical Seminar BKI – KR



Perseroan bekerjasama dengan mitra badan klasifikasi anggota International Association of Classification Society (IACS), Korean Register of Shipping (KR) menyelenggarakan seminar teknik bersama yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan. Dalam seminar itu disampaikan berbagai perkembangan standar dan teknologi terkait bidang keselamatan kapal serta hasil penelitian KR yang relevan.

Company in collaboration with partner agencies classifications member of the IACS, Korean Register of Shipping (KR) held a joint technical seminar is intended for all stakeholders. The seminar was delivered some variety of standards and technology developments related to the ship safety and KR relevant research results.

Seminar Teknik Bersama BKI – KR – IPERINDO



Joint Technical Seminar BKI - KR - IPERINDO



Dalam rangka upaya mengembangkan rencana kerjasama pembangunan kapal, Perseroan bersama Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (IPERINDO) dan class partner Korean Register of Shipping (KR) mengadakan seminar teknik bersama. Dalam seminar ini pihak KR membagi pengalamannya berkaitan dengan industri galangan kapal dan hal-hal yang dapat dikerjasamakan di antara para pihak.

In an effort to develop a joint plan of ship building, the Company together with the Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (IPERINDO) and class partner Korean Register of Shipping (KR) held a joint technical seminar. In this seminar the KR share their experiences related to shipbuilding and the things can be cooperating between the parties.

Pengembangan Usaha

Penjajagan Kerjasama dengan Mitra Usaha di Republik Rakyat China



Business Development

Possibility of the cooperation with business partners in the People's Republic of China



Salah satu negara yang memiliki industri maritim dan galangan kapal yang maju adalah RRC dan banyak pengusaha pelayaran Indonesia yang membangun atau membeli kapal dari RRC. Sejalan dengan hal tersebut Manajemen Perseroan melakukan kunjungan ke RRC untuk menjajagi kemungkinan kerjasama dengan mitra setempat untuk pembukaan kantor perwakilan BKI di Shanghai. Diharapkan dengan adanya kantor perwakilan BKI di RRC ini nantinya pelayanan BKI kepada para pengusaha nasional akan lebih cepat dan dapat pula memberikan jasa sertifikasi material dan komponen yang diimport dari RRC yang akan digunakan oleh galangan kapal dalam negeri.

A country that has leading maritime industry and advanced shipbuilding is the PRC , which many Indonesian shipping businesses build or buy ships. In line with this, the Management Company made a visit to the PRC to explore possible cooperation with local partners to open a BKI representative office in Shanghai. It is expected that a representative office in the PRC can provide faster services to the nationwide bussinessman and also provide certification services of materials and components imported from the PRC to be used by domestic shipyards.

Temu Pelanggan**Customer Gathering**

Manajemen Perseroan secara berkala menjalin komunikasi langsung dengan para pemakai jasa melalui acara temu pelanggan. Dalam acara temu pelanggan ini Manajemen Perseroan selain berdialog dan menampung keluhan berkaitan dengan pelayanan jasa BKI juga menyampaikan berbagai informasi terkini berkaitan dengan regulasi dan aspek teknik terkini yang terkait dengan keselamatan kapal.

Company's management periodically to establish direct communication with customer through customer gathering. In the gathering, the Company's Management hold a dialogue with service-related complaints and also deliver a range of current information related to the regulatory and technical aspects related to the safety of the ship.

Presentasi Bidang Klasifikasi di Staf Komando Logistik TNI AL**Classification Presentation in the Navy Logistics Command Staff**

Perhatian kepada BKI datang bukan hanya dari kalangan pengusaha pelayaran yang memiliki dan mengoperasikan kapal-kapal niaga tetapi juga dari TNI AL. Staf Komando Logistik Angkatan Laut (SKOGAL) mengundang dalam tahun 2011 mengungan Manajemen BKI untuk melakukan presentasi berkaitan dengan notasi klasifikasi kapal. Dalam kesempatan itu Manajemen BKI memaparkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan menyangkut titik-titik lemah kon-

Attention to the BKI came not only from the business that owns and operates cruise ships but also from the navy. The Navy Logistics Command Staff (SKOGAL) in 2011 invite BKI Management to make a presentation relating to the ship classification notations. On that occasion BKI Management describes the various aspects that need to be considered weak spots concerning ship construction. For the future the Navy will prepare a plan for BKI to inspect and supervise

struksi kapal. Untuk ke depannya TNI AL akan menyiapkan rencana mengandeng BKI untuk melakukan pengawasan armada kapalnya yang dibangun di galangan nasional.

Menerima Kunjungan Pejabat INPEX Masela Ltd. Jakarta



Kepercayaan terhadap Perseroan terus tumbuh sejalan dengan reputasi baik dan kiprahnya dalam bidang keselamatan kapal dan industri maritim yang berhasil dibukukan. Manajemen INPEX Masela Ltd. Jakarta selaku pemilik dan operator kapal FLNG Masela yang akan dioperasikan di Blok Masela melakukan kunjungan ke Kantor Pusat BKI untuk mengetahui kesiapan Perseroan dalam melakukan pemeriksaan dan pengklasan kapal tersebut bersama class partner American Bureau of Shipping (ABS).

Menerima Kunjungan Pejabat BP Migas



Kepala Divisi Penunjang Operasi BP Migas melakukan kunjungan ke BKI untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan Perseroan dalam menangani proyek-proyek

their fleet was built in national shipyards.

Receive an Official Visit from INPEX Masela Ltd. Jakarta

Confidence to the Company growing continuously in line with a good reputation on ship safety and marine industries which successfully posted. INPEX Masela Management Ltd. Jakarta as the owner and operator of Masela FLNG will be operated in Masela Block, visited BKI Headquarters to find out the readiness of the Company in conducting examinations and classed the ship in class - partner with the American Bureau of Shipping (ABS).

Receive an official visit from BP Migas



Head of BP Migas Operations Support Division made a visit to BKI to find out the readiness and capability in handling project of oil and gas projects. BP Migas

Migas. BP Migas dalam berbagai kesempatan selalu berupaya mempromosikan dan mendukung keterlibatan industri dalam negeri dalam kegiatan eksplorasi dan operasional bidang Migas. Dalam kesempatan itu Manajemen Perseroan mempresentasikan hal-hal yang terkait dengan pengalaman dan kesiapan BKI dalam menangani pekerjaan di sektor Migas baik untuk klasifikasi maupun konsultansi dan supervisi.

Menerima Kunjungan Delegasi Industrial and Trade Chamber Turki



Dalam kesempatan mengikuti kunjungan kenegaraan presiden Turki, Kamar Dagang dan Industri Turki Kompartemen Maritim melakukan kunjungan ke BKI sebagai institusi yang dinilai banyak mengetahui dan memahami industri perkapalan di Indonesia. Manajemen BKI memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup tugas, kompetensi, dan pengalaman BKI serta perkembangan industri galangan kapal di Indonesia dan pihak Turki pun menawarkan kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang dapat dikembangkan di antara kedua negara.

Kontrak Proyek Dengan CNOOC SES Ltd.



on various occasions are always working to promote and support the involvement of the domestic industry in exploration and oil and gas field . On that occasion the Company's management presented matters related to the experience and readiness of BKI in handling both jobs at Oil and Gas sector for classification as well as consultation and supervision.

Receive Delegation Visits Industrial and Trade Chamber Turkey



On the opportunity to follow the state visit of President of Turkey, The Marine Compartment as part of Turkish Chamber of Commerce and Industry visited BKI as an institution that valued a lot to know and understand the shipping industry in Indonesia. BKI management gives an explanation of the scope of duties, competence, and experience as well as development of Shipbuilding Industry in Indonesia and the Turkey side offers the possibilities of developed in co-operation between the two countries.

Project Contract With CNOOC SES Ltd.



Salah satu pengakuan penting industri Migas kepada Perseroan adalah kepercayaan China National Offshore Oil Company South East Sumatra (CNOOC SES) Ltd untuk menyerahkan assessment dan sertifikasi klas untuk single point mooring system yang digunakannya kepada BKI. Penandatanganan kontrak proyek tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Utama CNOOC SES Ltd di Jakarta.

One of the important recognition of the oil and gas industry to BKI is the trust of China National Offshore Oil Company South East Sumatra (CNOOC SES) Ltd to deliver their assessment and class certification for single point mooring system to BKI. The signing of the contract project undertaken by the President Director of BKI and the President Director of CNOOC SES Ltd in Jakarta.

Sinergi Dengan PT. PANN (Persero)



Perseroan senantiasa mendukung upaya-upaya mewujudkan sinergi antar BUMN. Menjelang akhir tahun 2011 Manajemen menandatangani Nota Kesepahaman pengembangan Sinergi Antar BUMN dengan PT. PANN (Persero) dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Negara BUMN. Melalui Nota Kesepahaman kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kerjasama konsultasi dan supervisi pemeliharaan kapal-kapal milik PT. PANN (Persero).

Synergy with PT. Pann (Limited)



The Company continually support efforts to achieve synergies among BUMN. Towards the end of 2011 Management signed a MOU for the development of Synergies Between BUMN with the state-owned PT. PANN (Persero), witnessed by the Deputi Bidang Usaha Jasa – Kementerian BUMN. Through a MOU both parties agree to develop cooperation in consultation and supervised the maintenance of ships owned by PT. PANN (Persero).



Activities

Klasifikasi Kapal	<i>Ship Classification</i>
Persetujuan Gambar	<i>Drawing Approval</i>
Aktifitas Survey Klasifikasi	<i>Classification Survey Activities</i>
Aktivitas Jasa Industri	<i>Industrial Services Activities</i>
Survey Statutoria	<i>Statutory Survey</i>
Otorisasi Statutoria	<i>Statutory Authorization</i>
Konsultasi & Supervisi	<i>Consultancy & Supervision</i>
Pengujian & Laboratorium	<i>Testing & Laboratory</i>
Rekayasa Teknik	<i>Engineering Design</i>
Inspeksi & Supervisi Maritim	<i>Marine Inspection & Supervision</i>
Pelatihan publik	<i>Public Training</i>

Klasifikasi Kapal

Ship Classification

Dampak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan Permenhub KM. 20 tahun 2006 tentang kewajiban kapal bendera Indonesia memiliki klasifikasi dari BKI menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan register kapal kelas BKI, meskipun masih di dominasi penerimaan kelas bangunan sudah jadi dibandingkan dengan penerimaan kelas bangunan baru.

Jumlah kapal yang diregister pada akhir Desember 2011 berjumlah 14.754 unit atau 111,29% lebih besar dibandingkan tahun 2010 dengan total Gross Tonnage mencapai 18.775.872 GT. Jumlah penambahan kapal yang diregister pada tahun 2011 adalah 1.497 unit atau 3.188.086 GT.

Kapal Register tahun 2007-2011
Ships Registered from 2007 to 2011

Year	Unit	GT
2011	14.754	18.775.872
2010	13.257	15.587.786
2009	12.436	13.652.223
2008	11.281	11.561.461
2007	10.601	10.524.808

Impact of the INPRES No.5- 2005 on the empowerment of the national shipping industry and Permenhub KM. 20- 2006 on the obligations of the Indonesia flag ship classed to BKI has resulted in increasing acceptance of BKI registered class ships, though still dominated by Existing Ships Admission Class (PKBL) compared to the New Building Admission Class.

The number of vessels registered at the end of December 2011 amounted to 14 754 units or 111.29% higher than in 2010 with a total Gross Tonnage reached 18,775,872 GT. The number of additional vessels registered in 2011 was 1497 units or 3,188,086 GT.

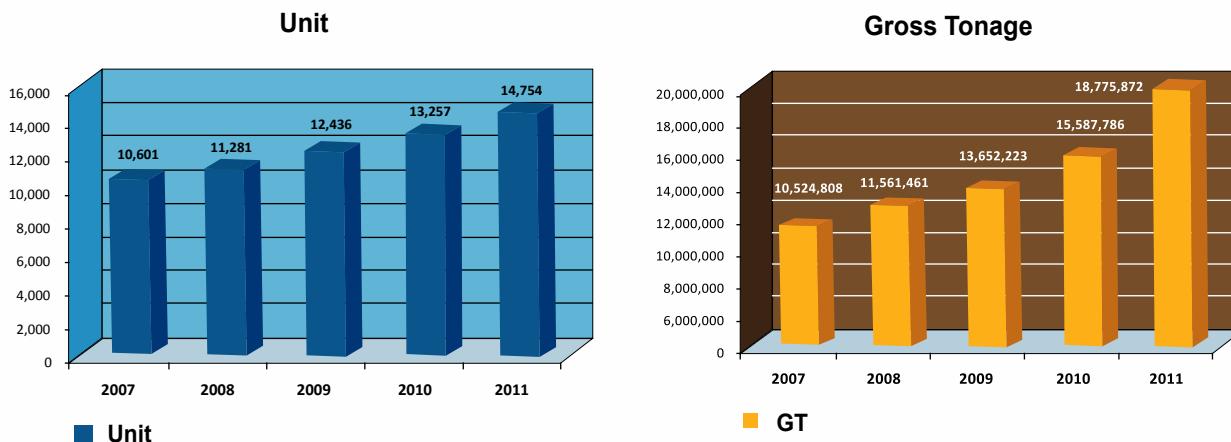
Kapal Kelas Valid sesuai umur
Valid Class Ships by ship age

Ship Age	Unit	GT
0-5	2.661	3.987.434
6-10	1.246	1.341.155
11-15	815	1.040.304
16-20	868	1.453.595
21-25	618	1.290.578
>25	1.355	2.939.934

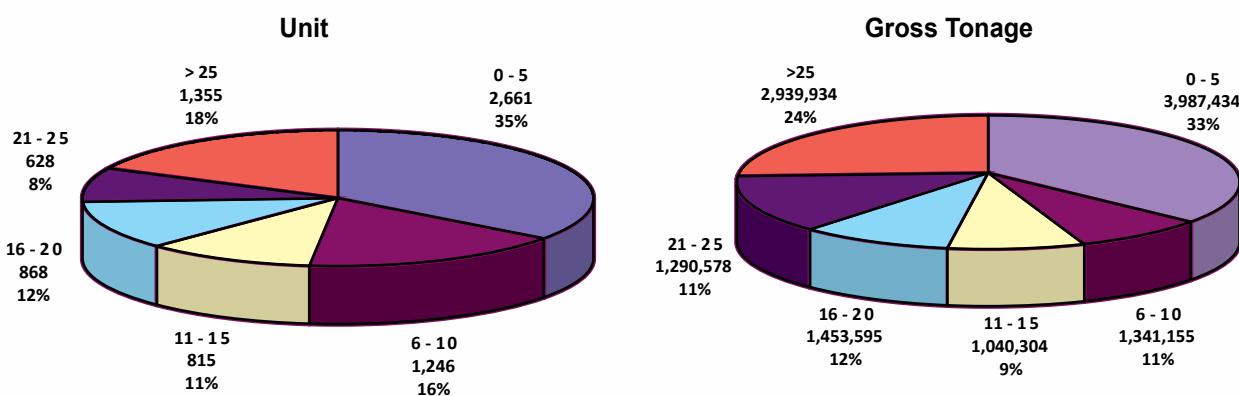
Kapal yang dicabut kelasnya sampai dengan tahun 2011 adalah 7.226 unit atau 6.827.718 GT. Pencabutan kelas ini dengan alasan tidak memenuhi persyaratan Rules & Regulation dengan mulai diterapkannya Automatic Class Suspension, pindah ke badan klasifikasi lain, tenggelam, discrapp atau permintaan dari pemilik kapal. Sehingga kapal kelas BKI dengan status klas berlaku (valid class), meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 6.400 unit dengan tonase total 9.594.091 GT menjadi 7.528 unit dengan tonase total 11.948.154 GT.

Class withdrawn ship in 2011 was 7226 units or 6,827,718 GT. The reason of this class withdrawn were failure to fulfill Rules & Regulations as starting the implementation of Automatic Class Suspension, change of classification bodies, sinking, scrapping or request from the ship's owner. So that, the BKI class ships with valid class status increase from amounted of 6400 units with total tonnage of 9,594,091 in 2010 into 7528 units with total tonnage of 11,948,154 GT in 2011.

Kapal Register 2007 – 2011



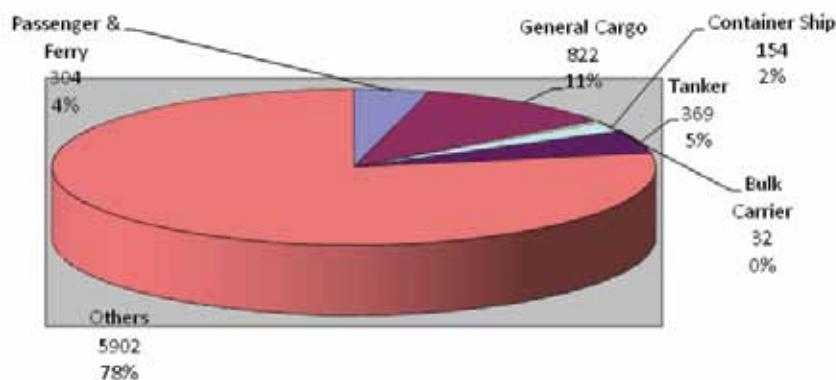
Kapal Kelas Valid sesuai umur (unit)



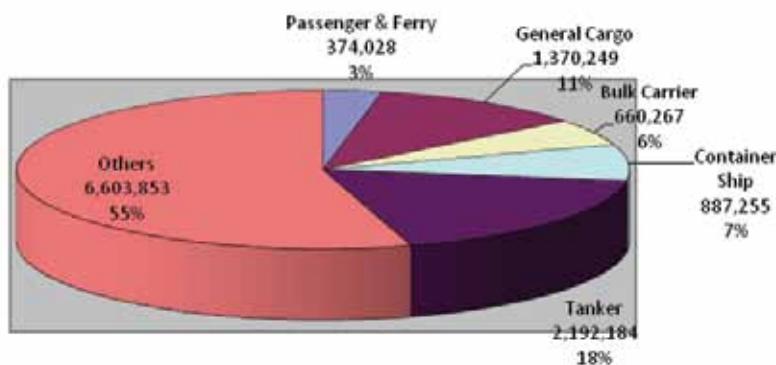
Rincian Tipe Kapal yang diregister
Breakdown of type of ships

Ship Type	Unit total	GRT Total
Passenger & Ferry	304	374.028
General Cargo	822	1.370.249
Bulk Carrier	32	660.267
Container Ship	154	887.255
Tanker	369	21.92.184
Others	5902	6.603.853

Rincian Tipe Kapal yang diregister (Unit)
Breakdown of type of ships



Rincian Tipe Kapal yang diregister (GT)
Breakdown of type of ships





Daftar Penerimaan Kelas Bangunan Baru Tahun 2011

List of Admission of New Building 2011

Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (m)	Pemilik	Galangan
Tanjung Buyut 2-212	Kapal Tunda	291	26.88 x 9.4 x 4.5	PT. Pelindo II (Persero) Cabang Palembang	PT. Daya Radar Utama
Daya 12	Kapal Tunda	153	21.98 x 7.3 x 3.2	PT. Daya Bahtera Sumatera	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Kalindo Permai 3	Kapal Tunda	148	21.65 x 7.32 x 3.2	PT. Pelayaran Nautica Pacific	PT. Karya Teknik Utama
Satria Laksana 248	Kapal Tunda	148	21.79 x 7.32 x 3.2	PT. Artha Gunung Mas	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Bahar 1291	Kapal Tunda	167	22.32 x 7.6 x 2.8	PT. Habco Primatama	PT. Cahaya Samudera Shipyard
Lintas XXI	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Lintas Samudra Borneo Line	PT. Karya Teknik Utama
Kwan 1	Kapal Tunda	148	21.65 x 7.32 x 3.2	PT. Kwan Samudera Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
Marco	Kapal Tunda	163	23.37 x 8 x 3.3	PT. Ekawira Swadaya Abadi	PT. Alima Usaha Samudera
Dabo 103	Kapal Tunda	116	19.25 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Dabo 20	Kapal Tunda	153	21.98 x 7.3 x 3.2	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
L.L.B Sukses 8	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.1	PT. Pelayaran Laju Lintas Bahari	PT. Nongsa Jaya Buana
Oasis IX	Kapal Tunda	163	22.32 x 7.6 m x 2.8	PT. Pelayaran Nasional Armada Sumber Rezeki	PT. Cahaya Samudera Shipyard
Del 01	Kapal Tunda	251	25.82 x 8.6 x 4.3	PT. Del Navigia	PT. Karya Teknik Utama
Marina 2433	Kapal Tunda	222	27.36 x 8 x 3.7	PT. Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Adhi 1	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.1	PT. Adhimix Pelayaran Internusa	PT. Nongsa Jaya Buana
Buana Power VI	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	Nil
Karya Pacific 11	Kapal Tunda	207	24.26 x 8.2 x 4	PT. Karya Pacific Shipping	PT. Karya Teknik Utama
Sanle 21	Kapal Tunda	80	17.28 x 5.8 x 2.7	PT. Whs Global Mandiri	PT. Alima Usaha Samudera
Dabo 605	Kapal Tunda	66	16.2 x 5.5 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Eti 103	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
Sinar Sejahtera 128	Kapal Tunda	137	21.69 x 7.32 x 3.2	PT. Sinar Tanjung	PT. Karyasindo Samudra Biru Shipyard
Oni XII	Kapal Tunda	112	19.53 x 6.5 x 2.75	PT. Oni	PT. Sumber Samudra Makmur
Perkasa 3	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Sanditia Perkasa Maritim	PT. Karya Teknik Utama
Kyk 01	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Kyk Lines	PT. Karya Teknik Utama
Eti 304	Kapal Tunda	207	24.67 x 8.2 x 4	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama

Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (m)	Pemilik	Galangan
KKS 1281	Kapal Tunda	186	23.94 x 8 x 3.65	Wiwik Masluha	Nil
Kalindo Permai 2	Kapal Tunda	148	21.65 x 7.32 x 3.2	PT. Nautica Pacific	PT. Karya Teknik Utama
LL.B Sukses 6	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.1	PT. Pelayaran Laju Lintas Bahari	PT. Nongsa Jaya Buana
SPGM 1288	Kapal Tunda	137	21.69 x 7.32 x 3.2	PT. Megah Mandiri Sukses Sejati	PT. Karyasindo Samudra Biru Shipyard
Tirtayasa IV 216	Kapal Tunda	296	27.93 x 9.5 x 3.8	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Daya Radar Utama
Oni V	Kapal Tunda	102	19.48 x 6.5 x 2.75	PT. Oni	PT. Sumber Samudra Makmur
Mts III	Kapal Tunda	148	21.32 x 7.31 x 3.2	PT. Mitra Tujuh Samudra	PT. Bandar Victory Shipyard
Lotus 22-07	Kapal Tunda	245	27.98 x 9 x 3.8	PT. Pelayaran Syukur Citra Prima	PT. Mangkupalas Mitra Makmur
Bahar 79	Kapal Tunda	99	17.42 x 5.8 x 2.96	PT. Habco Primatama	PT. Batam Expresindo Shipyard
Tanjung Buyut 3-212	Kapal Tunda	291	26.88 x 9.4 x 4.5	PT. Pelindo II (Persero) Cabang Palembang	PT. Daya Radar Utama
Eti 306	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
Dabo 601	Kapal Tunda	66	16.2 x 5.5 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Aditya 01	Kapal Tunda	222	27.36 x 8 x 3.7	PT. Pasifik Bintan Indo Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Dabo 607	Kapal Tunda	80	16.2 x 5.5 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	Nil
Buana Power II	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	PT. Nongsa Jaya Buana
Bintan Karisma III	Kapal Tunda	88	19.39 x 6.1 x 2.75	PT. Pelayaran Nasional Bintan Karisma Line	PT. Nongsa Jaya Buana
Maju Daya 35	Kapal Tunda	185	24.28 x 8 x 3.65	PT. Pelayaran Asia Mega Lines	PT. Bandar Abadi Shipyard
Dabo 806	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Buana Power III	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	PT. Nongsa Jaya Buana
Buana Power IV	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	PT. Nongsa Jaya Buana
Buana Power V	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	PT. Nongsa Jaya Buana
BSP X	Kapal Tunda	138	21.16 x 7.32 x 3.2	PT. Budi Samudra Perkasa	PT. Sumber Samudra Makmur
Perkasa 1	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Sanditia Perkasa Maritim	PT. Karya Teknik Utama
Mitra Kencana XI	Kapal Tunda	138	21.88 x 7.32 x 3.2	PT. Sumber Surya Kencana Inhu	PT. Sumber Samudra Makmur
Marina 29	Kapal Tunda	222	27.36 x 8 x 3.8	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Trans Pacific 203	Kapal Tunda	211	26.88 x 8 x 3.7	PT. Trans Pacific Jaya	PT. Galangan Mercusuar
Miduk Ocean	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Mitsu Citra Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
Titan 03	Kapal Tunda	255	26.25 x 8.6 x 4.3	PT. Nusantara Terminal Terpadu	PT. Bandar Abadi Shipyard
Tirtayasa III-216	Kapal Tunda	296	27.93 x 9.5 x 3.8	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Daya Radar Utama
Sei Deli	Kapal Tunda	347	30.24 x 9.8 x 4.6	PT. Pelindo I (Persero)	PT. Dok & Perkapalan Surabaya
Cakra 1	Kapal Tunda	95	17.42 x 5.8 x 2.96	PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya	PT. Batam Expresindo Shipyard
Maiden Island	Kapal Tunda	188	24.35 x 8 x 3.65	PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera	PT. Waruna Nusa Sentana
Dabo 802	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Bintan Karisma II	Kapal Tunda	88	19.39 x 6.1 x 2.75	PT. Technics Offshore Jaya	PT. Nongsa Jaya Buana
Baruna 1	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Baruna Power Line	PT. Karya Teknik Utama
BSI III	Kapal Tunda	185	24.3 x 8 x 3.65	PT. Berjaya Samudera Indonesia	PT. Bandar Abadi Shipyard
Dabo 805	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard

Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (m)	Pemilik	Galangan
Buana Power III	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	PT. Nongsa Jaya Buana
Buana Power IV	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	PT. Nongsa Jaya Buana
Buana Power V	Kapal Tunda	65	15.55 x 6.1 x 2.44	PT. Buana Transperindo Wahana Internasional	PT. Nongsa Jaya Buana
BSP X	Kapal Tunda	138	21.16 x 7.32 x 3.2	PT. Budi Samudra Perkasa	PT. Sumber Samudra Makmur
Perkasa 1	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Sanditia Perkasa Maritim	PT. Karya Teknik Utama
Mitra Kencana XI	Kapal Tunda	138	21.88 x 7.32 x 3.2	PT. Sumber Surya Kencana Inhu	PT. Sumber Samudra Makmur
Marina 29	Kapal Tunda	222	27.36 x 8 x 3.8	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Trans Pacific 203	Kapal Tunda	211	26.88 x 8 x 3.7	PT. Trans Pacific Jaya	PT. Galangan Mercusuar
Miduk Ocean	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Mitsu Citra Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
Titan 03	Kapal Tunda	255	26.25 x 8.6 x 4.3	PT. Nusantara Terminal Terpadu	PT. Bandar Abadi Shipyard
Tirtayasa III-216	Kapal Tunda	296	27.93 x 9.5 x 3.8	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Daya Radar Utama
Sei Deli	Kapal Tunda	347	30.24 x 9.8 x 4.6	PT. Pelindo I (Persero)	PT. Dok & Perkapalan Surabaya
Cakra 1	Kapal Tunda	95	17.42 x 5.8 x 2.96	PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya	PT. Batam Expresindo Shipyard
Maiden Island	Kapal Tunda	188	24.35 x 8 x 3.65	PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera	PT. Waruna Nusa Sentana
Dabo 802	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Bintan Karisma II	Kapal Tunda	88	19.39 x 6.1 x 2.75	PT. Technics Offshore Jaya	PT. Nongsa Jaya Buana
Baruna 1	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Baruna Power Line	PT. Karya Teknik Utama
BSI III	Kapal Tunda	185	24.3 x 8 x 3.65	PT. Berjaya Samudera Indonesia	PT. Bandar Abadi Shipyard
Dabo 805	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Tirtayasa II-212	Kapal Tunda	269	27.93 x 9.5 x 3.8	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Daya Radar Utama
Berkat Mandiri II	Kapal Tunda	150	21.99 x 7.32 x 3.2	PT. Mandiri Line	PT. Alima Usaha Samudera
Ocean Venture III	Kapal Tunda	88	19.39 x 6.1 x 2.75	PT. Ocean Venture	PT. Nongsa Jaya Buana
Ocean Venture II	Kapal Tunda	88	19.39 x 6.1 x 2.75	PT. Ocean Venture	PT. Nongsa Jaya Buana
Batavia II 216	Kapal Tunda	269	28.42 x 9.5 x 3.8	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Daya Radar Utama
Dabo 803	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
BSI I	Kapal Tunda	185	24.3 x 8 x 3.65	PT. Berjaya Samudera Indonesia	PT. Bandar Abadi Shipyard
Bintan Karisma I	Kapal Tunda	88	19.39 x 6.1 x 2.75	PT. Technics Offshore Jaya	PT. Nongsa Jaya Buana
Tirtayasa I-212	Kapal Tunda	269	27.93 x 9.5 x 3.8	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Daya Radar Utama
Bangun 1	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Renjani Maritim Transportasi	PT. Karya Teknik Utama
Dabo 801	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Eti 102	Kapal Tunda	211	26.88 x 8 x 3.7	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Galangan Mercusuar
Prima Power 02	Kapal Tunda	211	27.12 x 8 x 3.7	PT. Lintas Prima Perkasa	PT. Galangan Mercusuar
Cavalo Marinho 01	Kapal Tunda	185	24.12 x 8 x 3.65	PT. Segara Transindo Mandiri	PT. Bandar Abadi Shipyard
Rayyan Salumbung 2200-1	Kapal Tunda	220	24.85 x 8.2 x 4	PT. Barru Bahari Lines	PT. Karya Teknik Utama
Putra Rupat III	Kapal Tunda	226	26.78 x 9 x 4.16	PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari	PT. Citra Shipyard
Kalindo Permai 1	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Kalindo Utama	PT. Karya Teknik Utama
Eti 101	Kapal Tunda	211	27.12 x 8 x 3.7	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Galangan Mercusuar
Tanair XI	Kapal Tunda	189	23.52 x 7.32 x 3.2	PT. Pelayaran Tanair Pratama Nusantara	PT. Galangan Mercusuar

Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (m)	Pemilik	Galangan
Putra Rupat V	Kapal Tunda	226	26.78 x 9 x 4.16	PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari	PT. Citra Shipyard
Titan 05	Kapal Tunda	254	26.2 x 8.6 x 4.3	PT. Nusantara Terminal Terpadu	PT. Bandar Abadi Shipyard
Prima 10	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Maritim Prima Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
Batavia I-216	Kapal Tunda	269	27.93 x 9.5 x 3.8	PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok	PT. Daya Radar Utama
Eti 301	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
Pasifik 188	Kapal Tunda	108	19.53 x 6.5 x 2.75	PT. Pasifik Bintan Indo Shipping	PT. Alima Usaha Samudera
Ghitha 02	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Global Samudra Nusantara	PT. Karya Teknik Utama
Nusa 1	Kapal Tunda	214	24.85 x 8.2 x 4	PT. Cakrawala Nusa Bahari	PT. Karya Teknik Utama
Putra Rupat VI	Kapal Tunda	226	26.78 x 9 x 4.16	PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari	PT. Citra Shipyard
Terus Daya 33	Kapal Tunda	259	26.2 x 8.6 x 4.3	PT. Pelayaran Asia Lestari Lines	PT. Bandar Abadi Shipyard
Ghitha 01	Kapal Tunda	209	24.85 x 8.2 x 4	PT. Global Samudra Nusantara	PT. Karya Teknik Utama
Masada 09	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Masada Jaya Lines	PT. Karya Teknik Utama
Daya 11	Kapal Tunda	148	21.79 x 7.32 x 3.2	PT. Daya Bahtera Sumatera	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Muarajati 01	Kapal Tunda	129	22.08 x 7.1 x 3.1	PT. Pelindo II Cabang Cirebon	PT. Sanur Marindo Shipyard
Sumber Jasa	Kapal Tunda	79	17.28 x 5.8 x 2.7	PT. Sumber Daya CiPTa Alam	PT. Alima Usaha Samudera
Perkasa 2	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Sanditia Perkasa Maritim	PT. Karya Teknik Utama
Dabo 603	Kapal Tunda	66	16.2 x 5.5 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Dabo 606	Kapal Tunda	80	16.2 x 5.5 x 2.85	Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Farel 01	Kapal Tunda	220	24.85 x 8.2 x 4	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Karya Teknik Utama
Mitra Kencana XII	Kapal Tunda	188	23.23 x 8 x 3.65	PT. Batulicin Nusantara Maritim	PT. Sumber Samudra Makmur
Eti 303	Kapal Tunda	220	24.85 x 8.2 x 4	PT. Sumber Surya Kencana Inhu	PT. Karya Teknik Utama
Samudra Bintan 89	Kapal Tunda	105	19.58 x 8.6 x 4.3	PT. Energy Transporter Indonesia Su Meng Liang	PT. Alima Usaha Samudera
Farel 02	Kapal Tunda	220	24.85 x 8.2 x 4	PT. Batulicin Nusantara Maritim	PT. Karya Teknik Utama
Marina 30	Kapal Tunda	222	27.36 x 8 x 3.8	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Marina 31	Kapal Tunda	222	27.36 x 8 x 3.7	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Eti 302	Kapal Tunda	207	24.19 x 8.2 x 4	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
Eti 305	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.2 x 4	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
Dabo 602	Kapal Tunda	66	16.2 x 5.5 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Dabo 101	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.6 x 3.1	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
Prima Power 05	Kapal Tunda	211	26.88 x 8 x 3.7	PT. Lintas Prima Perkasa	PT. Galangan Mercusuar
Arya Chandra	Kapal Tunda	207	24.67 x 8.2 x 4	PT. Duta Bahari Menara Line	PT. Karya Teknik Utama
Bada Leon	Kapal Penyeberangan	616	40.6 x 12 x 3.2	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard
Marsela	Kapal Penyeberangan	616	40.6 x 12 x 3.2	Ditjen Perhubungan Darat	Nil
Siginjai	Kapal Penyeberangan	616	40.6 x 12 x 3.2	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard
Muyu	Kapal Penyeberangan	370	35.04 x 10.5 x 2.8	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Industri Kapal Indonesia
Manta	Kapal Penyeberangan	627	40.6 x 12 x 3.2	Dishub Kaltim	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari
Arar	Kapal Penyeberangan	617	40.6 x 12 x 3.2	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia
Kalibodri	Kapal Penyeberangan	1823	61.8 x 14 x 4.1	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Noahu Shipyard
Tanjung Madlahar	Kapal Penyeberangan	500	35.04 x 10.5 x 2.8	Ditjen Perhubungan Darat, Direktorat LLASDP	PT. Daya Radar Utama

Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (m)	Pemilik	Galangan
Cantika Anugerah	Kapal Penyeberangan	246	35.8 x 6.7 x 2.55	PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur	PT. Sukses Bahari Nusantara
Napan Wainami	Kapal Penyeberangan	560	40.6 x 12 x 3.2	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Mariana Bahagia
Tanjung Api	Kapal Penyeberangan	616	40.6 x 12 x 3.2	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard
Lome	Kapal Penyeberangan	534	40.7 x 12 x 3.2	Ditjen Perhubungan Darat	PT. Mariana Bahagia
Gilicat Enterprise	Crew Boat	70	18 x 5.82 x 2.25	PT. Samudera Ekspedisi Aman	Nil
Pegasus	Crew Boat	11	0 x 3.4 x 1.55	PT. Sahabat Samudra Sejahtera	Nil
Tunas Terafulk 1	Crew Boat	179	27.45 x 7 x 3.2	PT. Tunas Terafulk Lines	PT. Bintang Timur Samudera
Ina Sela	Crew Boat	207	32.1 x 7 x 3.4	PT. Sillo Maritime Perdana	PT. Vista Maritim Indonesia
KPC Selat Kijang 02	Kapal Pandu	29	12.2 x 4 x 2.2	PT. Pelindo I (Persero)	Nil
MPW AC 02	Kapal Pandu	24	13 x 4 x 1.6	PT. Bintang Timur Samudera	PT. Bintang Timur Samudera
KPC Selat Kijang 01	Kapal Pandu	29	12.2 x 4 x 2.2	PT. Pelindo I (Persero)	Nil
KPC Selat Durian	Kapal Pandu	29	12.2 x 4 x 2.2	PT. Pelindo I (Persero)	PT. Tesco Indomaritim
KPC Sei Nunang 02	Kapal Pandu	29	12.2 x 4 x 2.2	PT. Pelindo I (Persero)	Nil
KPC Sei Nunang 01	Kapal Pandu	29	12.2 x 4 x 2.2	PT. Pelindo I (Persero)	Nil
MPA C 01	Kapal Pandu	26	0 x 4.6 m x 0	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Eka Multi Bahari
MPA C 02	Kapal Pandu	26	0 x 4.6 x 1.8	PT. Pelindo II (Persero)	PT. Eka Multi Bahari
MPAC 001	Kapal Pandu	17	10.88 x 4 x 1.55	PT. Pelindo II (Perseo) Cabang Pelabuhan Panjang	PT. Eka Multi Bahari
Kapuas 265	Tongkang Minyak	2312	77.54 x 20.73 x 5.49	PT. Pelayaran Kapuas Jatratama	PT. Bandar Abadi Shipyard
Citra Mandiri 2015	Tongkang Air	889	52.66 x 17.06 x 3.65	PT. Pelayaran Josh Tирто	PT. Karyasindo Samudra Biru Shipyard
Hafar Neptune	Tongkang Kerja	5606	81.92 x 24.38 x 5.49	PT. Hafar Capitol Nusantara	PT. Asl Shipyard Indonesia
Naga Biru	Tongkang Kerja	1442	58.52 x 18.29 x 3.66	PT. Dowell Anadrill Schlumberger	PT. Nanindah Mutiara Shipyard
Tirta Samudra XXIII	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	2007	85 x 15.6 x 4.6	PT. Pelayaran Tirtacipta Mulyapersada	Nil
Graha Dua Dua	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	542	47.52 x 9.6 x 4.4	PT. Pelayaran Karbindo Alam Mulya	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Galangan III
Tirta Samudra XXV	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	2007	85 x 15.6 x 4.6	PT. Pelayaran Tirtacipta Mulyapersada	Nil
Tirta Samudra XXI	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	1908	85.12 x 15 x 4.6	PT. Pelayaran Tirta Cipta Mulya Persada	Nil
Tirta Samudra XXII	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	2261	85.12 x 15.6 x 4.6	PT. Pelayaran Tirtacipta Mulyapersada	Nil
Seroja I	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	1869	83.16 x 15.6 x 4.14	PT. USDA Seroja Jaya	PT. Usda Seroja Jaya
Clement II	Tongkang Minyak Nabati	1935	67.34 x 26.71 x 5.18	PT. Pelayaran Pandupasifik Karismaraya	PT. Bandar Abadi Shipyard
BSP XI	Tongkang Minyak Nabati	1861	73.15 x 19.5 x 4.87	PT. Budi Samudra Perkasa	PT. Sumber Samudra Makmur
BSP IX	Tongkang Minyak Nabati	1861	73.15 x 19.5 x 4.87	PT. Budi Samudra Perkasa	PT. Sumber Samudra Makmur

Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (m)	Pemilik	Galangan
Mitra Bahari VIII	Tongkang Minyak Nabati	2578	73.15 x 19.5 x 4.87	PT. Mitra Kencana Bahari	PT. Sumber Samudra Makmur
Metro 01	Tongkang Minyak Nabati	2085	73.15 x 19.5 x 4.87	PT. Segara Transindo Mandiri	PT. Bandar Abadi Shipyard
Sejahtera D12	Tongkang Minyak Nabati	2150	72.27 x 20.11 x 5.48	PT. Aneka Atlanticindo Nidyatama	PT. Karyasindo Samudra Biru Shipyard
BSI IV	Tongkang Minyak Nabati	2666	76.07 x 21.33 x 6.09	PT. Berjaya Samudera Indonesia	PT. Bandar Abadi Shipyard
Luminor 1	Tongkang Minyak Nabati	2150	72.27 x 20.11 x 5.48	PT. Maxima Liners	PT. Karyasindo Samudra Biru Shipyard
Idecwood	Tongkang Minyak Nabati	290	35.1 x 12.19 x 2.43	PT. Idec Abadi Wood Industries	PT. Karya Teknik Utama
Kapuas Jaya 271	Tongkang Minyak Nabati	2690	79 x 22.23 x 6.1	PT. Pelayaran Kapuas Jaya Samudera	PT. Bandar Abadi Shipyard
Luminor 2	Tongkang Minyak Nabati	2150	72.27 x 20.11 x 5.48	PT. Maxima Liners	PT. Karyasindo Samudra Biru Shipyard
Sumber Kencana V	Tongkang Minyak Nabati	2583	80.76 x 21.33 x 5.48	PT. Sumber Surya Kencana Inhu	PT. Sumber Samudra Makmur
Calvin II	Tongkang Minyak Nabati	2666	76.07 x 21.54 x 6.1	PT. Pelayaran Pandupasifik Karismaraya	PT. Bandar Abadi Shipyard
CPT 2702	Tongkang Minyak	2214	79.66 x 18.3 x 5.5	PT. Cahaya Perdana Transalam	PT. Bandar Victory Shipyard
Aquarius Star 5	Tongkang Minyak	1042	52.66 x 17.06 x 4.26	PT. Pelayaran Karya Pulau Nusantara	PT. Karya Teknik Utama
Persada 2551	Tongkang Minyak	2280	74.88 x 22 x 5.3	PT. Persada Lines	PT. Usda Seroja Jaya
Persada 2552	Tongkang Minyak	2087	74.88 x 22 x 5.3	PT. Persada Lines	PT. Usda Seroja Jaya
Miduk 03	Tongkang Minyak	2111	67.3 x 19.51 x 6.1	PT. Mitsi Citra Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
CPL 235	Tongkang Minyak	1961	67.3 x 19.51 x 5.48	PT. Cindara Pratama Lines	PT. Karya Teknik Utama
Sahoya	Tongkang Minyak	2539	79 x 21.33 x 5.48	PT. Sinar Alam Duta Perdana	PT. Karya Teknik Utama
Ratu Juwita	Tongkang Minyak	2290	73.15 x 21.33 x 5.48	PT. Barokah Gemilang Perkasa	PT. Karya Teknik Utama
Sabuk Nusantara 32	Kapal Penumpang & Barang	1202	57.9 x 12 x 4	Ditjen Perhubungan Laut	PT. Daya Radar Utama
Sabuk Nusantara 31	Kapal Penumpang & Barang	1202	57.9 x 12 x 4	Ditjen Perhubungan Laut	PT. Daya Radar Utama
Sabuk Nusantara 28	Kapal Penumpang & Barang	1158	53.76 x 12 x 4.5	Ditjen Perhubungan Laut	PT. Daya Radar Utama
Sabuk Nusantara 27	Kapal Penumpang & Barang	784	46.84 x 10.4 x 4.2	Ditjen Perhubungan Laut	PT. Daya Radar Utama
Sabuk Nusantara 30	Kapal Penumpang & Barang	1202	57.9 x 12 x 4	Ditjen Perhubungan Laut	PT. Daya Radar Utama
Bahari Jaya Lestari	Kapal Pendatar/Tangki Minyak	627	42.85 x 12 x 3.7	PT. Segara Laju Perkasa	PT. Caputra Mitra Sejati
Royal Palma XX	Tongkang Geladak & Tongkang Minyak Nabati	2436	74.88 x 22 x 5.3	PT. Deli Muda Nusantara	Nil

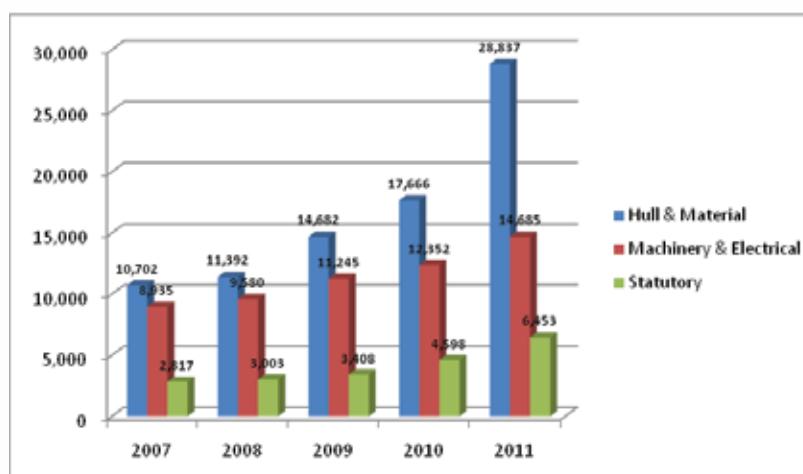
Persetujuan Gambar

Drawing Approval

Pada tahun 2011, BKI menerima permintaan untuk drawing / plan approval yang terdiri dari 1.922 kontrak dan 49.975 gambar / perhitungan. Diantaranya adalah 28.837 gambar kontruksi lambung, 14.685 gambar permesinan / listrik serta 6.453 gambar / perhitungan statutoria.

In 2011, BKI accepted for drawing / plan approval consisting of the 1.922 contract and 49. 975 drawings/ calculations. Among them are 28. 837 hull construction drawings, and 14. 685 machinery / electrical drawings and 6.453 statutory drawings / calculations.

Division	2007	2008	2009	2010	2011
Hull & Material	10.702	11.392	14.682	17.666	28.837
Machinery & Electrical	8.935	9.580	11.245	12.352	14.685
Statutory	2.817	3.003	3.408	4.598	6.453
Total	22.454	23.975	29.335	34.616	49.975



Aktifitas Survey Klasifikasi

Class Survey Activities

Dalam pelaksanaan survey di lapangan, BKI menerima 17.233 permintaan survey yang terdiri dari 1.763 survey dalam rangka penerimaan kelas dan 15.470 survey dalam rangka mempertahankan kelas. Perincian jenis survey yang dilakukan adalah sebagai berikut :

In implementing field survey, BKI received 17.233 application for survey consisting of 1.763 surveys for admission to class and 15.470 surveys for maintaining of class. The breakdown of kind of survey carried out, are as follows:

Kind Survey	2007	2008	2009	2010	2011
Renewal Survey	921	882	878	913	1.028
Annual Survey	3.619	3.576	3.660	3.855	4.409
Intermediate Survey	618	579	748	766	831
Docking Survey	2.514	2.300	2.439	2.525	2.786
Shaft Propeller Survey	1.114	1.155	1.158	1.216	1.226
Boiler Survey	208	181	167	180	183
Automation Survey	25	20	17	20	17
Continuous Survey	489	354	284	231	369
Class Extension Survey	238	227	202	6.807	4.346
Condition Survey	4.227	5.484	5.824	320	275
New Building Admission Class Survey	178	258	219	430	695
Existing Ship Admission Class Survey	753	621	735	759	850
Re-class Survey	100	68	123	172	218
Total	15.004	15.705	16.454	18.195	17.233

Aktivitas Jasa Industri

Industrial Services Activities

Sebagai bagian dari survey klasifikasi kapal, BKI melaksanakan pengawasan pada sistem mutu dari perusahaan manufaktur dan jasa yang berhubungan dengan pembangunan kapal. Pengawasan pada sistem mutu tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk maupun jasa yang disuplai oleh perusahaan yang terlibat dalam klasifikasi kapal memiliki konsistensi mutu sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan Rules.

Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai pembuat atau pelaksana jasa akan di periksa berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dan peraturan standart mutu. Assessment dilakukan pada Sistem Manajemen Mutu, Standar Mutu, Kontrol Mutu, Rencana Mutu dan Prosedur Kerja yang dirancang oleh perusahaan pemohon. Bila dari hasil assessment dinyatakan bahwa perusahaan pemohon telah mampu untuk mempertahankan mutu secara konsisten sesuai dengan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia maka akan diterbitkan Sertifikat Persetujuan.

Untuk mengawasi konsistensi standar mutu perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Persetujuan, dilakukan pemeriksaan secara periodik pada sistem mutu dan dokumentasi catatan mutu perusahaan.

As a part of the ship classification survey, BKI carried out supervision on quality system of manufacturers and service companies related to ship building. Supervision of the quality system is undertaken to ensure that the products and services supplied by companies involved in the classification of the vessel has the consistency of quality in accordance with the specifications required by Rules.

Companies that have applied to get approval as a service maker or executor will be examined in accordance to BKI rules and quality standard regulation. Assessment carried out in accordance to Quality management System, Quality Standard, Quality Control, Quality Plans and Work Procedures design by the applicant company. When the assessment accepted and the applicant company able to maintain the consistency of the quality in accordance to BKI regulation, then Certificate of Approval will be issued.

To monitor the consistency of quality standards of the approved company, periodical checks on the quality system and documentation of quality records will be conducted.



Survey Statutoria

Statutory Survey

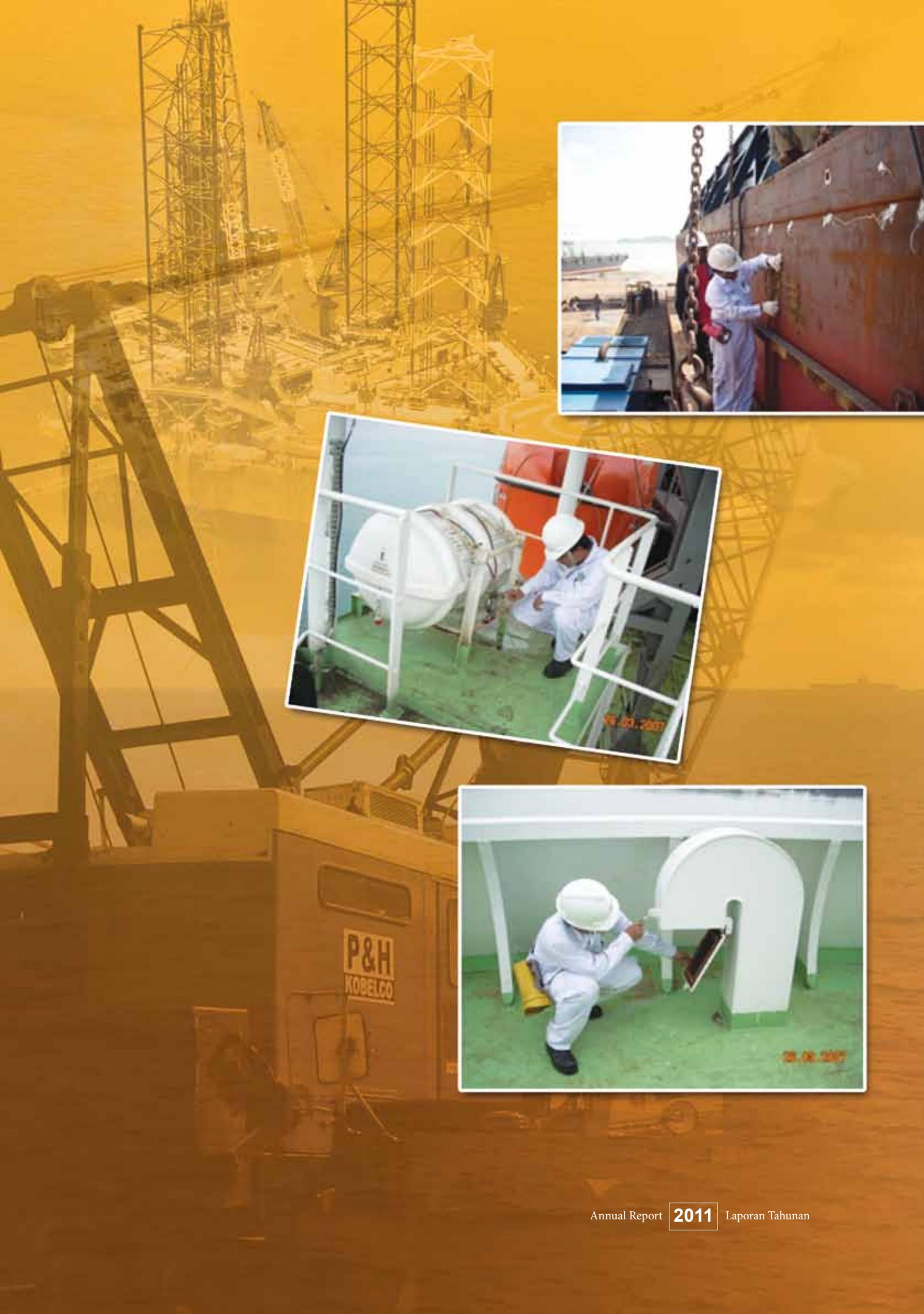
BKI sebagai Badan Klasifikasi telah memenuhi persyaratan teknis dan kriteria sesuai dengan IMO Resolusi A.739(18) dan A.789(19) sebagai Recognized Organization (RO) untuk ditunjuk melaksanakan survey kapal-kapal berbendera Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia cq Ditjen Perhubungan Laut.

BKI telah memiliki jumlah safety auditor 71 yang berkualifikasi untuk melaksanakan audit ISM Code dan 80 auditor untuk melaksanakan audit ISPS Code. BKI juga menerbitkan Register ISM Code & ISPS Code yang dipublikasikan melalui media cetak maupun akses melalui website BKI.

As a Classification Society BKI has comply with technical requirements and criteria as a Recognized Organization (RO) according to IMO Resolution A.739 (18) and A.789 (19) to be appointed to carry out surveys Indonesian-flagged vessels on behalf of the Government of Indonesia cq. Directorate General of Sea Transportation.

BKI has had 71 of qualified safety auditors to carry out ISM Code audit and 80 to audit the ISPS Code. BKI has also publishes the Register of ISM Code and ISPS Code, published through print media as well as access via BKI website.

Audit Activity	2007	2008	2009	2010	2011
1. ISM Code – Initial Audit	109	94	185	212	162
2. ISM Code – Annual Audit	85	90	84	105	104
3. ISM Code – Intermediate Audit	153	66	101	199	165
4. ISM Code – Renewal Audit	193	182	183	61	81
5. ISM Code – DOC issued	45	37	41	78	42
6. ISM Code – SMC Issued	251	342	201	300	203
7. ISPS Code – Initial Audit	34	32	107	96	54
8. ISPS Code – Intermediate Audit	91	34	14	14	26
9. ISPS Code – ISSC issued	41	39	90	88	68
10. Load Line	-	-	6.191	6.596	5.530
11. CAS	-	-	9	8	9
12. Anti Fouling System	-	-	5	5	6
13. Sewage Approval	-	-	2	2	2
14. Fire Control	-	-	-	2	2
15. IAPP (Marpol Annex VI)	-	-	4	1	1
16. ISPP (Marpol Annex II)	-	-	4	4	4
17. SMPEP (Marpol Annex II)	-	-	1	1	1
Total	15.004	15.705	16.454	18.195	17.233



Otorisasi Statutoria

Statutory Authorization

Hingga tahun 2011, otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI dibidang klasifikasi kapal dan statutoria adalah :

- Obligation of Indonesian flagged ships to have classification certificate from BKI.
- Survey Authorization to survey of loadline marks and issue loadline certificates (IPLT & PGMI) for Indonesian flagged ships.
- Survey Authorization and Certification for Container.
- Survey Authorization and Certification of Safety Construction, Marpol Annex I & II and Fitness of Chemical Carrier & Gas Carrier in Bulk for Indonesian flagged ships at a tonnage more than 500 GT.
- Audit Authorization and Certification of ISM Code for Indonesian flagged ships.
- As a Recognized Security Organization (RSO), conducting audit and certification of ISPS Code for Indonesian flagged ships.
- Survey Authorization and Certification of Annex VI Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.
- Survey Authorization and Certification of Condition Assessment Scheme (CAS) in accordance with Annex I Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.
- Statutory Authorization from MMA (Mongolia Maritime Administration)

Sedangkan otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI di bidang minyak & gas, panas bumi, kelistrikan dan ketenagakerjaan adalah :

Until 2011, the authorization entrusted to BKI for ship classification and statutory are :

- *Obligation of Indonesian flagged ships to have classification certificate from BKI.*
- *Survey Authorization to survey of loadline marks and issue loadline certificates (IPLT & PGMI) for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification for Container.*
- *Survey Authorization and Certification of Safety Construction, Marpol Annex I & II and Fitness of Chemical Carrier & Gas Carrier in Bulk for Indonesian flagged ships at a tonnage more than 500 GT.*
- *Audit Authorization and Certification of ISM Code for Indonesian flagged ships.*
- *As a Recognized Security Organization (RSO), conducting audit and certification of ISPS Code for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Annex VI Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Condition Assessment Scheme (CAS) in accordance with Annex I Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Statutory Authorization from MMA (Mongolia Maritime Administration)*

While the authorization entrusted to the BKI in oil & gas, geothermal, electricity and man power sectors are:

- Technical Inspection of Feasibility of Combined Facility Certificate from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Crane from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Pressure Vessel from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Pipeline from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Platform Construction from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Electrical Equipment from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Rotating Equipment from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Storage Tank from Directorate General of Oil and Gas.
- Inspection and Testing of Crane from Ministry of Manpower and Transmigration.
- Inspection and Testing of Boiler and Pressure Vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.
- Inspection and Testing of Electric Equipment from Ministry of Manpower and Transmigration.
- BKI Laboratory for NDT and DT of material, equipment relating to boiler and pressure vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.
- Inspection and Testing of Crane, Pressure Vessel and Boiler onboard ship and at Harbour from Directorate General of Sea Transportation.
- Inspection of Helideck from Directorate General of Air Transportation.
- Sertifikat Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Las dari Lembaga Sertifikasi Profesi Las.
- Lembaga Inspeksi Tipe A dari Komite Akreditasi Nasional.
- Laboratorium Pengujian dari Komite Akreditasi Nasional.
- Penunjukan sebagai lembaga inspeksi teknik dalam rangka pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- Penunjukan sebagai badan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Penunjukan pelaksanaan pengujian, inspeksi teknik dan sertifikasi di lingkungan proyek-proyek per-
- *Technical Inspection of Feasibility of Combined Facility Certificate from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Crane from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pressure Vessel from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pipeline from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Construction Platform from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Electrical Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Rotating Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Storage Tanks from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Inspection and Testing of Crane from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Boiler and Pressure Vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Electric Equipment from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *BKI Laboratory for NDT and DT of material, equipment relating to boiler and pressure vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Crane, Boiler and Pressure Vessel onboard ship and at harbour from Directorate General of Sea Transportation.*
- *Inspection of Helideck from Directorate General of Air Transportation.*
- *Test Place of Verification Certificate of Welding Competency from Lembaga Sertifikasi Profesi Las.*
- *Type A Inspection Body of the National Accreditation Committee.*
- *Testing Laboratory of the National Accreditation Committee.*
- *Designation as an inspection technique in order to check the installation and testing of electrical power from the Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Electricity and Energy Utilization.*
- *The appointment of a safety management system audit bodies and health from the Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *The appointment of the implementation of the test-*

tambangan mineral dan batu bara dari Kementerian ESDM - Ditjen MinerbaPabum.

- Penunjukan sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian menara telekomunikasi di wilayah kota Pekanbaru dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

ing, inspection and certification in environmental engineering projects and coal mining industries of the Ministry of ESDM - DG MinerbaPabum.

- *The appointment as the executor of the inspection and testing of telecommunications towers in the area of Pekanbaru from the Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pekanbaru .*

Konsultansi & Supervisi

Consultancy & Supervision

Inspeksi & Sertifikasi

BKI juga memberikan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap industri di lingkungan minyak dan gas serta ketenagakerjaan. BKI dipercaya untuk melakukan inspeksi dan sertifikasi berbagai proyek / pekerjaan, meliputi inspeksi dan sertifikasi atas nama Ditjen Migas, meliputi SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, SKPI.

Inspection & Certification

BKI also provide inspection and certification services to industry in the oil and gas as well as employment. BKI trusted to do the inspection and certification of various projects , including inspection and certification on behalf of Ditjen MIGAS, including SKPP, Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, SKPI.

Sektor Mineral Batu Bara Panas Bumi

Rotating Equipment	2
Electrical Equipment	2
Storage Tank	2
Pressure Safety Valve	2
WPS And Welder Test	0
SKPI	11
Pressure Vessel	6
Crane	42
Pipeline	4
PJIT Rig	0
Pengujian Peralatan Rigging/Lifting Device	0
NDT	3
SIO Crane	1
Jumlah	75

Sertifikasi BKI

Cementing Test	4
Alat Angkat Angkut	138
Rigging/Lifting Gear	231
Penangkal Petir	3
Gas Emisi	4
Surface Testing	1
PSV (Katup Pengaman)	24
SIO Crane	121
VSD Transport Skid	1
Container Metal Box	0
Pengujian Cathodic Protection	0
Inspeksi Menara Telkom	1
Inspeksi Peralatan WTU	2
Verifikasi Capaian TKDN	0
Inspeksi Tubing Casing (Pipa Bor)	0
Inspeksi Busket (Jaring/Metal(Logam))	10
Inspeksi Welding Machine (Pengelasan Machine)	4
Inspeksi Skid And Spreader Bar (Alat Bantu Angkat Barang)	26
Initial Inspection of Box Crossover Thread	1
Periodical Inspection Of Pressure Gauge/Mooring System	4
Initial Inspection of 8% ACME Bowen Box	1
Supervisi Repair Tank (Tangki Timbun)	5
Sertifikasi Tangki Transport	22
Sertifikasi Pressure Vessel	0
Sertifikasi Mesin Bor	0
Sertifikasi Pompa, Kompresor & Penggeraknya	0
Jasa Inspeksi Peralatan Kilang	0
Rental Holiday Detector & Operator	0
Welder Qualification	0
Welding Procedure Specification	0
Jetty (Dermaga Kecil) Harus Ada AMDAL	0
Manual System ISM (DOC & SOC)	0
Standard Operating Procedure	0
Jasa Konsultasi ISPS Code	0
Jumlah	603

Sektor Perhubungan

Helideck	0
Alat Angkat Angkut (SKB)	52
Jumlah	52

Sektor Migas

SKPI	43
Platform	4
Pressure Vessel	17
Crane	111
Pipeline	5
Rotating Equipment	13
Electrical Equipment	14
Storage Tank	15
Pressure Safety Valve	11
WPS & Welder Test	0
Surat Izin Memasuki Operasi Migas	7
PJIT Rig	0
NDT	0
Rigging	0
SIO Crane	0
Jumlah	240

Sektor Migas

NDT	2
Pressure Vessel Dan Boiler	21
Alat Angkat Angkut	110
Pipeline	0
Rotating Equipment	8
Electrical Equipment	18
Storage Tank	3
Pressure Safety Valve	2
WPS & Welder Test	1
NDT	4
Fire System	4
SMK 3	0
SIO Crane	0
Jumlah	173

Pengujian & Laboratorium

Testing & Laboratory

Di bidang pengujian BKI telah melaksanakan Destructive Test (DT) dan Non Destructive Test (NDT) dengan kegiatan, meliputi Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Uji Tarik dan Uji Takik.

In case of testing ,BKI has implemented Destructive Test (DT) and Non Destructive Test (NDT) by Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Pull Test and Notch Test.

PENGUJIAN & LABORATORIUM

Testing & Laboratory

Wire Rope Test	26
Gas Free Test	5
Vibration Sound Test	3
Holiday Detector Test	0
Crack Depth Test	16
Dye Penetrant Test	256
Magnetic Particle Test	156
Ultrasonic Test	1365
Radiography Test	441
Tensile Test	59
Bend Test	28
Hardness Test	15
Macro Test	3
Impact Test	15
Chemical Composition Analyst	31
NDT (MPI)	404
NDT (DPT)	72
Load Test	233
Hydrotest	83
Merger Test	504
DT	0
Jumlah	3715

Rekayasa Teknik

Engineering Design

Untuk kegiatan rekayasa teknik, BKI melakukan perhitungan teknik dan desain appraisal. Proyek yang ditangani adalah :

For engineering design, BKI performs engineering calculations and design Appraisal. Projects handled are:

Rekayasa Teknik	Volume Kegiatan
Design Appraisal And Supervision Mooring System	3
Design Appraisal And Supervision Platform	1
Ship Design	2
Consultant RKS & Rab QC Crane	0
Jumlah	6



Inspeksi & Supervisi Maritim

Marine Inspection & Supervision

Untuk kegiatan inspeksi dan supervisi marine, BKI telah menangani Survey Kondisi (pemeriksaan propeler, inventarisasi sistem perawatan kapal, evaluasi hasil pekerjaan perbaikan kapal), Perhitungan stabilitas & trim kapal, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Kalibrasi tangki, On/Off Hire Survey, Pembuatan gambar teknik, Penyusunan Hatch Cover Plan, Penyusunan Cargo Securing Manual dan Penyusunan Manual ISM Code.

In maritime inspection and supervision activities, BKI has handled Condition Survey (propeller inspection, an inventory of ship maintenance system, ship repair evaluation results), trim & stability calculation , Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, calibration tank, On / Off Hire Survey, technical drawings, Hatch Cover Plan, Cargo Securing Manual and ISM Code Manual.



Konsultansi,Supervisi & Marine
Consultancy, Supervision and Marine

New Building Supervision	13
Ship Repair And Modification Supervision	12
Ship Condition Survey	380
Insurance Survey	20
On And Off Hire Survey	2
Tank Calibration Survey	170
Towing And Lashing Survey	12
Stability Calculation	298
Floating Object Inspection	1
Draught Survey	7
Feasibility Study In Marine Industry	5
Environment Study	0
Inspection And Consultancy Of Land Transportation	1
Modification Ship Drawing	135
Technical Audit Of Ship Performance	3
Insulation Resistance Measurement/Megger Test	400
Noise Level Measurement	9
Vibration Measurement	2
Phase Sequence Measurement	0
Speed/RPM Measurement	1
Bollard Pull Test Pengujian Penambat Kapal/Pengikat Kapal	4
Towing Tank (Tempat Pengujian Kapal)	11
Kalibrasi Tangki Muat Kapal (Isi Muatan Tangkinya)	22
Ship Speed Trial (Kapal Cepat)	0
Ship Particulars (Pendataan Khusus Kapal)	0
Jumlah	1508



Pelatihan Publik

Public Training

BKI dalam setiap tahunnya juga menyelenggarakan pelatihan teknik, baik dalam bentuk inhouse training maupun public training, di antaranya :

BKI also routinely organizes technical training, both in-house training and public training. The training are :

Pendidikan Dan Pelatihan

Education and Training

Welding Inspector	5
Marine Surveyor	7
Crane Operator	5
Planned Maintenance System	0
Internal Auditor ISM-Code	10
Radiography Operator	1
Ship Automation Survey	0
Draught Survey	0
On And Off Hire Survey	0
Damage And Repair Survey	0
Industrial And Marine Stagging	1
Ship Security Officer	0
Towing And Lashing	0
Ship Condition	1
Rigging And Signalman	0
Company Security Officer (ISPS-Code)	24
ISPS PFSO	1
ISPS CSO	0
IMDG Code	0
Designated Person Ashore	0
SMK3 / HSE	0
Junlah	55

Umum

Sewa Peralatan	102
Sewa Personil	14
Junlah	116



Penelitian & Pengembangan

Research & Development

Sesuai dengan misi yang diemban, BKI juga melakukan riset dan pengembangan terutama untuk pengembangan Rules & Regulation sebagai standar teknis kapal serta mempublikasikannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan Rules & Regulation yang telah dilaksanakan tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Rules & Regulation BKI yang telah selesai meliputi :
 - Rules For Classification Surveys, Volume I – Edition 2011
 - Peraturan Klasifikasi and Survei, Jilid I – Edisi 2011
 - Rules for Dinamics Positioning Systems
 - Rules For The Environmental Service Systems
 - Guidelines For Machinery Condition Monitoring
 - Rules For Electrical Installation Volume IV Edition 2011
 - Guidelines for the Construction and Classification / Certification of Floating Production, Storage and Offloading Unit Edition 2011
 - Rules for Classifications and Contruction of Affshore Installation
 - Rules For The Classification and Surveys, Vol. 1 – Edition 2011
 - Rules for Structures, Vol. 2 – Edition 2011
 - Rules for Machinery Installations Vol. 4 – Edition 2011
 - Rules for Electrical Installations, Vol. 5 – Edition 2011
 - Rules for Mobile Offshore Unit, Vol. 6 – Edition 2011

In accordance with its mission statement, BKI also conducted research and development primarily for Rules & Regulation development as technical standard of ships and also published it. Activity of research & development of Rules & Regulation which has done in 2011 as follows :

- a. *Rules & Regulation BKI yang telah selesai meliputi :*
 - *Rules For Classification Surveys, Volume I – Edition 2011*
 - *Peraturan Klasifikasi and Survei, Jilid I – Edisi 2011*
 - *Rules for Dinamics Positioning Systems*
 - *Rules For The Environmental Service Systems*
 - *Guidelines For Machinery Condition Monitoring*
 - *Rules For Electrical Installation Volume IV Edition 2011*
 - *Guidelines for the Construction and Classification / Certification of Floating Production, Storage and Offloading Unit Edition 2011*
 - *Rules for Classifications and Contruction of Affshore Installation*
 - *Rules For The Classification and Surveys, Vol. 1 – Edition 2011*
 - *Rules for Structures, Vol. 2 – Edition 2011*
 - *Rules for Machinery Installations Vol. 4 – Edition 2011*
 - *Rules for Electrical Installations, Vol. 5 – Edition 2011*

- Rules for Fixed Offshore Installations, Vol. 7 – Edition 2011
- b. Melakukan presentasi bersama (joint presentation) BKI dan Korean Register (KR) terhadap peraturan klasifikasi & statutoria yang terbaru kepada para pemakai jasa BKI di Jakarta.
- c. Melakukan pengkajian bersama antara BKI dan NK terhadap aplikasi Rules FPSO/FSO.
- d. Terlibat dalam Working Group antar anggota asosiasi Asian Classification Society (ACS), meliputi WG WG Port State Control (PSC), WG Quality, WG Risk Based Design (RBD), WG Machinery Seaworthiness, WG Ship Recycle (SR), WG Goal Based Standard (GBS), WG Ballast Water Management (BWM) dan WG Green House Gas (GHG).
- *Rules for Mobile Offshore Unit, Vol. 6 – Edition 2011*
- *Rules for Fixed Offshore Installations, Vol. 7 – Edition 2011*

Hingga posisi akhir Desember 2011, BKI telah menerbitkan sejumlah Rules & Regulation, yaitu:

1. Rules for Classification and Surveys (Volume I- 2007);
2. Rules for Hull (Volume II- edition 2006);
3. Rules for Machinery Installation (Volume III-Edition 2007);
4. Rules for Electrical Installations (Volume IV-Edition 2007);
5. Rules for Materials (Volume V-Edition 2006);
6. Rules for Welding (Volume VI-Edition 2004);
7. Rules for Automation (Volume VII-Edition 2007);
8. Rules for Refrigerating Installations (Volume VIII-Edition 2001);
9. Rules for Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk (Volume IX-Edition 2005);
10. Rules for Ships Carrying Dangerous Chemicals In Bulk (Volume X-Edition 2002);
11. Rules for Inland Waterway vessels Chapter 1-Hull Construction (Edition 1996);
12. Rules for Inland Waterway vessels Chapter 2-Machinery Installations (Edition 1996);
13. Rules for Inland Waterway vessels Chapter 3-Electrical Installation (Edition 1996);
14. Rules for High Speed Vessels (Edition 1996);
15. Rules for Fibreglass Reinforced Plastic Vessels (Edition 1996);
16. Rules for Wooden Ship (Edition 1996);
17. Rules for Mobile Offshore Drilling Units and Special Purpose Units (Edition 1999);
1. *Rules for Classification and Surveys (Volume I- 2007);*
2. *Rules for Hull (Volume II- edition 2006);*
3. *Rules for Machinery Installation (Volume III-Edition 2007);*
4. *Rules for Electrical Installations (Volume IV-Edition 2007);*
5. *Rules for Materials (Volume V-Edition 2006);*
6. *Rules for Welding (Volume VI-Edition 2004);*
7. *Rules for Automation (Volume VII-Edition 2007);*
8. *Rules for Refrigerating Installations (Volume VIII-Edition 2001);*
9. *Rules for Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk (Volume IX-Edition 2005);*
10. *Rules for Ships Carrying Dangerous Chemicals In Bulk (Volume X-Edition 2002);*
11. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 1-Hull Construction (Edition 1996);*
12. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 2-Machinery Installations (Edition 1996);*
13. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 3-Electrical Installation (Edition 1996);*
14. *Rules for High Speed Vessels (Edition 1996);*
15. *Rules for Fibreglass Reinforced Plastic Vessels (Edition 1996);*
16. *Rules for Wooden Ship (Edition 1996);*
17. *Rules for Mobile Offshore Drilling Units and Special Purpose Units (Edition 1999);*

- 18. Rules for Stowage and Lashing of Containers (Edition 1999);
 - 19. Rules for Classification and Construction of High Speed Craft (Edition 2000);
 - 20. Rules for Offshore Mooring Chains (Edition 2000);
 - 21. Rules for Mooring and Loading Installations (Edition 2002);
 - 22. Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 1 : Rules For Classification and Survey- Edition 2002);
 - 23. Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 2 : Rules For Structures Machinery Installations - Edition 2002);
 - 24. Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 3 : Rules For Specific Type of Units and Equipment - Edition 2002);
 - 25. Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 4 : Rules For Machinery Installations - Edition 2002);
 - 26. Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 5 : Rules For Electrical Installations -Edition 2002);
 - 27. Rules for Floating Docks (Edition 2002);
 - 28. Rules for Fishing Vessels (Edition 2003);
 - 29. Rules for Oil Recovery Vessel (Edition 2005);
 - 30. Rules for Non Metalic Material (Edition 2006);
 - 31. Common Structural Rules for Tanker;
 - 32. Common Structural Rules for Bulk Carrier;
 - 33. Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers.
- 18. *Rules for Stowage and Lashing of Containers (Edition 1999);*
 - 19. *Rules for Classification and Construction of High Speed Craft (Edition 2000);*
 - 20. *Rules for Offshore Mooring Chains (Edition 2000);*
 - 21. *Rules for Mooring and Loading Installations (Edition 2002);*
 - 22. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 1 : Rules For Classification and Survey- Edition 2002);*
 - 23. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 2 : Rules For Structures Machinery Installations - Edition 2002);*
 - 24. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 3 : Rules For Specific Type of Units and Equipment - Edition 2002);*
 - 25. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 4 : Rules For Machinery Installations - Edition 2002);*
 - 26. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 5 : Rules For Electrical Installations -Edition 2002);*
 - 27. *Rules for Floating Docks (Edition 2002);*
 - 28. *Rules for Fishing Vessels (Edition 2003);*
 - 29. *Rules for Oil Recovery Vessel (Edition 2005);*
 - 30. *Rules for Non Metalic Material (Edition 2006);*
 - 31. *Common Structural Rules for Tanker;*
 - 32. *Common Structural Rules for Bulk Carrier;*
 - 33. *Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers.*

List of BKI's Regulation:

- 1. Regulation for The Testing of Engines Produced in Series (Edition of 1996);
- 2. Regulation for The Calculation of Diesel Engines Crankshaft (Edition of 1996);
- 3. Regulation for The Seating of Diesel Engines Installations (Edition of 1996);
- 4. Regulation for The Design, Construction and Testing of Pumps (Edition of 1996);
- 5. Regulation for Equipment on The Fire Fighting Ships (Edition of 1996);
- 6. Regulation for Construction, Equipment and Testing of Closed Fuel Overflow System (Edition of 1996);
- 7. Regulation for The Installation and Ventilation of Storage Batteries and The Construction of Battery

List of BKI's Regulation:

- 1. *Regulation for The Testing of Engines Produced in Series (Edition of 1996);*
- 2. *Regulation for The Calculation of Diesel Engines Crankshaft (Edition of 1996);*
- 3. *Regulation for The Seating of Diesel Engines Installations (Edition of 1996);*
- 4. *Regulation for The Design, Construction and Testing of Pumps (Edition of 1996);*
- 5. *Regulation for Equipment on The Fire Fighting Ships (Edition of 1996);*
- 6. *Regulation for Construction, Equipment and Testing of Closed Fuel Overflow System (Edition of 1996);*
- 7. *Regulation for The Installation and Ventilation of Storage Batteries and The Construction of Battery*

- Chargers (Edition of 1996);
8. Regulation for Electromagnetic Compatibility of Electrical Equipment (Edition of 1996);
 9. Regulation for Lighting (Edition of 1996);
 10. Regulation for Variable Frequency Ships Mains Operation (Variable Frequency Operation (Edition of 1996);
 11. Regulation for The Use of Computer and Computer Systems (Edition of 1996);
 12. Regulation for The Performance of Type Test, Part 1 : Procedure (Edition of 2002);
 13. Regulation for The Performance of Type Test, Part 2 : Test Requirements For Electrical / Electronic Equipment, Computer and Peripheral (Edition of 2002);
 14. Regulation for The Performance of Type Test, Part 3 : Test Requirements For Sealing Systems of Bulkhead and Deck Penetrations (Edition of 2002);
 15. Regulation for The Performance of Type Tests, Part 4 : Test Requirements for Electrical Machinery (Edition of 2002);
 16. Regulation for The Performance of Type Tests, Part 5 : Test Requirements for Mechanical Components and Equipment (Edition of 2004);
 17. Regulation for Mass Produced Engines (Edition of 1996);
 18. Regulation for The Construction and Survey of Lifting Appliances (Edition of 1998);
 19. Regulation for Construction, Repair and Testing of Freight Containers (Edition of 1999);
 20. Regulation for Assessment and Repairs of Defects on Propellers (Edition of 2000);
 21. Regulation for Constructions and Testing of Towing Gears (Edition of 2000);
 22. Procedure & Guidelines for The ISM-Code (Edition 2002)
 23. Regulation for The Life Saving Launching Appliances (Edition of 2001);
 24. Guidelines for Ocean Towage (Edition of 2001);
 25. Guidelines for The Explosion Protection of Electrical Equipment (Edition of 2001);
 26. Guidelines for Sea Trials of Motor Vessels (Edition of 2002 - English & Indonesian);
 27. Regulation for The Inspection of Anchor Chain Cables (Edition of 2002);
 28. Regulations for Redundant Propulsion and Steering Systems (Edition 2002);
- Chargers (Edition of 1996);
8. Regulation for Electromagnetic Compatibility of Electrical Equipment (Edition of 1996);
 9. Regulation for Lighting (Edition of 1996);
 10. Regulation for Variable Frequency Ships Mains Operation (Variable Frequency Operation (Edition of 1996);
 11. Regulation for The Use of Computer and Computer Systems (Edition of 1996);
 12. Regulation for The Performance of Type Test, Part 1 : Procedure (Edition of 2002);
 13. Regulation for The Performance of Type Test, Part 2 : Test Requirements For Electrical / Electronic Equipment, Computer and Peripheral (Edition of 2002);
 14. Regulation for The Performance of Type Test, Part 3 : Test Requirements For Sealing Systems of Bulkhead and Deck Penetrations (Edition of 2002);
 15. Regulation for The Performance of Type Tests, Part 4 : Test Requirements for Electrical Machinery (Edition of 2002);
 16. Regulation for The Performance of Type Tests, Part 5 : Test Requirements for Mechanical Components and Equipment (Edition of 2004);
 17. Regulation for Mass Produced Engines (Edition of 1996);
 18. Regulation for The Construction and Survey of Lifting Appliances (Edition of 1998);
 19. Regulation for Construction, Repair and Testing of Freight Containers (Edition of 1999);
 20. Regulation for Assessment and Repairs of Defects on Propellers (Edition of 2000);
 21. Regulation for Constructions and Testing of Towing Gears (Edition of 2000);
 22. Procedure & Guidelines for The ISM-Code (Edition 2002)
 23. Regulation for The Life Saving Launching Appliances (Edition of 2001);
 24. Guidelines for Ocean Towage (Edition of 2001);
 25. Guidelines for The Explosion Protection of Electrical Equipment (Edition of 2001);
 26. Guidelines for Sea Trials of Motor Vessels (Edition of 2002 - English & Indonesian);
 27. Regulation for The Inspection of Anchor Chain Cables (Edition of 2002);
 28. Regulations for Redundant Propulsion and Steering Systems (Edition 2002);

- 29. Guidelines for Inclining Test of Ships (Edition 2003);
- 30. Regulation for The Classification and Construction of Fibre Reinforced Plastic Workboat (Edition 2003);
- 31. Regulation for Ventilation Systems on Beard Seagoing Ships (Edition 2004);
- 32. Regulation for The Corrosion Protection and Coating Systems (Edition 2004);
- 33. Regulation for The Bridge Design on Seagoing Ships One Man Console (Edition 2004);
- 34. Guidelines for The Carriage of Refrigerated Containers on Board Ships (Edition 2004);
- 35. Regulation for Analysis Technique, Strength and Stability (Edition of 2005);
- 36. Guidelines for The Preparation of Damage Stability Calculation and Damage Control Documentation On Board (Edition of 2005);
- 37. Procedure & Guideline for ISPS Code (Edition of 2004);
- 38. Guidelines for Thickness Measurements of ship's plate (Edition of 2005);
- 39. Guidelines for Condition Assessment Scheme (CAS) (Edition of 2006);
- 40. Guidelines for Classification & Construction of Wing-In Ground Craft (WIG-Craft) (Edition 2006);
- 41. Guidance for Implementation Marpol 73/78 Annex VI (Edition 2006).
- 29. *Guidelines for Inclining Test of Ships (Edition 2003);*
- 30. *Regulation for The Classification and Construction of Fibre Reinforced Plastic Workboat (Edition 2003);*
- 31. *Regulation for Ventilation Systems on Beard Seagoing Ships (Edition 2004);*
- 32. *Regulation for The Corrosion Protection and Coating Systems (Edition 2004);*
- 33. *Regulation for The Bridge Design on Seagoing Ships One Man Console (Edition 2004);*
- 34. *Guidelines for The Carriage of Refrigerated Containers on Board Ships (Edition 2004);*
- 35. *Regulation for Analysis Technique, Strength and Stability (Edition of 2005);*
- 36. *Guidelines for The Preparation of Damage Stability Calculation and Damage Control Documentation On Board (Edition of 2005);*
- 37. *Procedure & Guideline for ISPS Code (Edition of 2004);*
- 38. *Guidelines for Thickness Measurements of ship's plate (Edition of 2005);*
- 39. *Guidelines for Condition Assessment Scheme (CAS) (Edition of 2006);*
- 40. *Guidelines for Classification & Construction of Wing-In Ground Craft (WIG-Craft) (Edition 2006);*
- 41. *Guidance for Implementation Marpol 73/78 Annex VI (Edition 2006).*



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Development

BKI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa klasifikasi menempatkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten pada posisi terdepan dalam upaya menghadapi dan memenangkan persaingan bisnis dengan para perusahaan kompetitor serta dalam upaya meningkatkan kepercayaan stakeholder atau kualitas pelayanan prima BKI. Prestasi kinerja usaha perusahaan yang telah dicapai dalam tahun 2011 tidak terlepas dari profesionalisme dan peningkatan kompetensi SDM yang dihasilkan dari pola pembinaan dan pengembangan SDM yang dilakukan secara terarah dan terpadu, sehingga prestasi kinerja usaha yang dicapai dalam tahun 2011 ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan produktifitas, sehingga Man Power Productivity (MPP) meningkat sebesar 19% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 552 juta per personil. SDM yang dimiliki BKI hingga posisi 31 Desember 2011 berjumlah 616 orang.

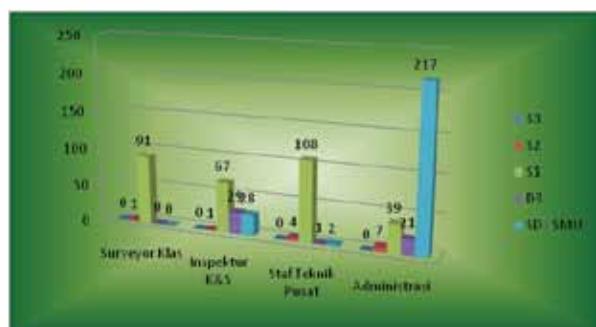
Mengingat aset pokok yang dimiliki oleh BKI adalah sumber daya manusia, maka BKI menyadari sepenuhnya dan berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM yang dimiliki melalui program diklat terpadu, dan khusus training bagi surveyor program diklat telah dibuat secara terpadu sesuai dengan ketentuan IACS-QSCS. Kompetensi yang dimiliki oleh personil teknik BKI sampai dengan Desember 2011 adalah :

BKI as a company which is engaged in the services classification puts human resources that are reliable and competent in the forefront of efforts to face the competition and win business with the company's competitors and stakeholders in an effort to boost confidence or BKI excellent service quality. Achievements of the company's business performance has been achieved in 2011 can not be separated from the professionalism and competency improvement of human resources resulting from patterns of human resource training and development carried out as directed and integrated, so that the achievement of business performance is achieved in 2011 is indicated by the increase in productivity, so that Man Power Productivity (MPP) increased by 19% over the previous year to IDR 552 million per personnel. BKI human resources held the position until December 31, 2011 amounted to 616 people.

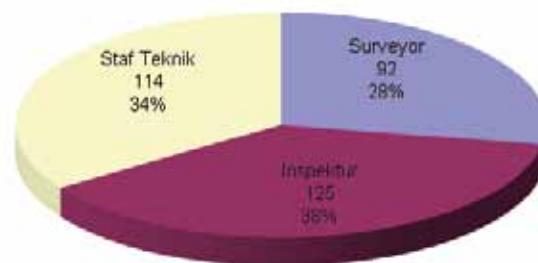
Given the main asset owned by BKI is human resources, BKI fully aware and committed to continually maintaining and improving the quality and competence of human resources through integrated education and training program, and specialized training for surveyor and training program was created in an integrated manner in accordance with the provisions of IACS-QSCS. Competencies possessed by BKI technical personnel up to December 2011 were:

Uraian	Jumlah
Bidang Klasifikasi	
1. Principal Surveyor (Class)	19
2. Senior Surveyor (Class)	74
3. Surveyor (Class)	71
4. Assistant Surveyor	37
Bidang Konsultansi & Supervisi	
1. Radiography Expert Level I	3
2. Radiography Expert Level II	8
3. NDT Level I	26
4. NDT Level II	59
5. Welding Inspector	182
6. Welding Inspector – AWS	4
7. Welding Engineering	2
8. AK3 Umum	2
9. Crane Inspector (Depnaker)	79
10. Crane Inspector (Migas)	68
11. Pipeline Inspector	25
12. Casing & Tubing Inspector	24
13. Tank Storage Inspector	42
14. Radiation Protection Officer	4
15. Offshore Pipeline Inspector	5
16. Cathodic/Corrosion Inspector	24
17. Sea Survival	38
18. Pembinaan Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Katup Pengaman	11
19. HUET	48
20. Pressure Vessel Safety	58
Bidang Sertifikasi	
1. Safety Auditor	71
2. Quality Auditor	102
3. ISPS Code	80
Sistem Informasi	63
Akuntan	37

Realisasi Turn Over SDM Sesuai Pendidikan Tahun 2011



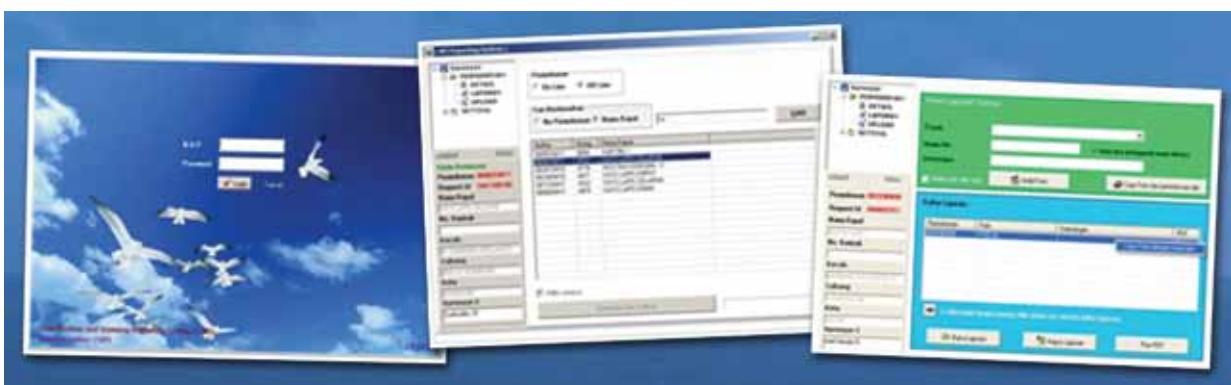
Posisi Tenaga Teknik tahun 2011



Teknologi Informasi

Information Technology

CLASSIFICATION and STATUTORY REPORTING SYSTEM / CSRS



Dalam meningkatkan pelayanan jasanya, BKI telah menyempurnakan sistem pelaporan survei secara on-line dari aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi ‘Terpadu’ menjadi aplikasi “Classification and Statutory Reporting System” (CSRS). Penyempurnaan yang telah dilakukan antara lain lebih fleksibel sesuai kebutuhan surveyor, lampiran dari laporan survei sudah diintegrasikan, aplikasi lebih user friendly (What You See Is What You Get), update form laporan survei lebih mudah dan seragam, update versi secara otomatis di masing-masing laptop surveyor dsb. Dengan aplikasi ini diharapkan terjadi percepatan pembuatan laporan survei termasuk pengiriman ke Kantor Pusat secara on-line. Dengan demikian, Kantor Pusat dapat segera memproses laporan survei tersebut tanpa harus menunggu hard copy dari surveyor lapangan.

In improving of services, BKI has modified a reporting system in on-line basis from previous application called “TERPADU” into new application called “Classification and Statutory Reporting System” (CSRs). Improvements that have been taken such as more flexible according to the needs of surveyors, the attachment of the survey report has been integrated, the application more user friendly (What You See Is What You Get), easy to update the survey report and uniformly, update version automatically to each surveyor’s laptop etc. With this application ,able to accelerate the process of preparing survey report including submit to Head Office in on-line basis. Thus, the Head Office could process the survey report promptly without waiting for a hard copy from the field surveyors.

Tanggung-jawab Sosial

Social Responsibility

Perusahaan pada tahun 2011 telah menyalurkan pinjaman dana sebesar Rp 1.584 juta untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dana tersebut berasal dari penyisihan laba, sebagaimana telah disebutkan dalam keputusan RUPS dan dari pengembalian pinjaman.

Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta khususnya pengusaha kecil dan koperasi serta mendorong koperasi dan usaha kecil sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya maupun masyarakat di sekitar.

In 2011, the company has granted fund loans amounting to IDR 1.584 million for the Partnership and Community Development Program. The funding comes from retain profit, as already mentioned in the decision of the RUPS and loan repayment.

The purpose of the Partnership and Community Development Program is to develop and create a healthy business climate and keep shaping the conditions that encourage mutual support between the BUMN, cooperatives and the private entrepreneurs ,especialy small entrepreneurs and to encourage cooperatives and small businesses as people's economic institutions capable of implementing, improving and develop their business more effectively and efficiently and can provide added value and greater benefits for its members and the community around.



Adapun sasarannya adalah terciptanya kesempatan usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi usaha kecil dan koperasi sampai ke masyarakat pedesaan, serta terselenggaranya sistem manajemen yang lebih rasional dan efisien yang diikuti dengan peningkatan kemampuan baik permodalan, personil, administrasi, keuangan maupun ke-mandirian wirausaha. Prioritas pembinaan tahun 2011 kepada usaha kecil baik perorangan maupun badan dan Koperasi (KUD) terutama KUD calon mandiri.

Jumlah realisasi dana yang terdistribusi pada tahun 2011 sebesar Rp 1.555 juta yang disalurkan kepada 5 wilayah binaan, yaitu :

The goal is the creation of business opportunities and greater job opportunities for small businesses and cooperatives to rural communities, as well as the implementation of the management system more rational and efficient, followed by an increase in both the ability of capital, personnel, administrative, financial and entrepreneurial independence. Development priority in 2011 to both individuals and small business entities and cooperatives (KUD), especially KUD independent candidate.

The disbursed amount of funds distributed in 2011 is IDR 1.555 million which is distributed to the five target areas, namely:

Wilayah	Anggaran	Realisasi
DKI Jakarta	400	220
DI Yogyakarta	300	255
Jawa Timur	300	220
Jawa Barat	250	160
Jawa Tengah	250	700
Jumlah	1500	1555



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Tata Kelola Perusahaan yang baik juga menjadi sarana perusahaan dalam mengembangkan asset dan akuntabilitas kepada para stakeholder.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berhak memperoleh seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan dan meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan. Pada tahun 2011, Perusahaan telah mengadakan RUPS Pengesahan RKAP 2011 pada tanggal 30 Desember 2010 di Jakarta, RUPS pertanggungjawaban Laporan Manajemen tahun 2010 pada tanggal 10 Juni 2011 di Jakarta.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan

Implementation of Good Corporate Governance gives great benefit to the overall Company performance. Good Corporate Governance is also a means for the company to develop assets, accountability to stakeholders and to maintain long-term value to stakeholders.

Shareholders' Annual General Meeting (AGM)

AGM is a Company Organ which holds the highest authority in the company and holds all authorities that are not submitted to Board of Directors or Board of Commissioners. AGM reserves the right to obtain all relevant information concerning the Company and ask the accountability of Board of Commissioners and Board of Directors relating to Company management. In 2011, the Company has conducted AGM related to RKAP 2011 endorsement on December 30, 2010 in Jakarta and AGM about Management Report 2010 accountability dated June 10, 2011 in Jakarta.

Board of Commissioners

Board of Commissioners is responsible to oversee and advise the Board of Directors in the interest of the Company, Shareholders and interested parties in general. Board of Commissioners is responsible to ensure that Board of Directors in any circumstances has the ability to carry out their duties. Board of Commissioners regularly monitor the effectiveness of policy implementation and decision-making process conducted by the Board of Directors to comply with company goals, and Share-

perusahaan, arahan Pemegang Saham dan anggaran Dasar Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk Komite-komite bila diperlukan. Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-155/MBU/2009 tanggal 28 Juli 2009, adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Capt. Drs. Abdul Gani, MM,MBA
2. Komisaris : Drs. Riyadi Widiasmoro, MSi
3. Komisaris : Liliek Mayasari, SE
4. Komisaris : Avian Muhtadi
5. Sekretaris Dekom : Susi Meyrista Tarigan, SE, AK, MSAK

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pada Tahun 2011, kegiatan Dewan Komisaris PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) secara garis besar sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 18(Delapan belas) kali, dimana 8 (Delapan) diantaranya dilakukan dengan Direksi, 1(satu) bersama-sama dengan Direksi dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono , 2 (Dua) bersama-sama dengan Direksi dan SPA Consulting dan sisanya adalah rapat internal Dewan Komisaris. Rapat dilakukan dalam rangka pembahasan kinerja perusahaan dan kegiatan korporasi serta terkait kegiatan pengawasan perusahaan. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dinamika rapat.
2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar, Keputusan dan arahan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Memberikan tanggapan, pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas kinerja perusahaan, kegiatan pengawasan Dewan Komisaris dan hal-hal lain yang dimintakan pendapat oleh Pemegang Saham.

holders directions.

In performing its duties, the Board of Commissioners have always adheres to the statutes and applicable regulations. Board of Commissioners in accordance with the procedures can use an independent and professional advice or forming committees when needed.

Board of Commissioners based on BUMN Ministerial Decree No. KEP-155/MBU/2009 on July 28, 2009, are as follows:

1. *President Commissioner : Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA*
2. *Commissioner : Drs. Riyadi Widiasmoro, MSi*
3. *Commissioner : Liliek Mayasari, SE*
4. *Commissioner : Avian Muhtadi*
5. *Commissioner Secretary : Susi Meyrista Tarigan, SE, AK, MSAK*

Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

In 2011, the activities of the Board of Commissioners of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in outline as follows:

1. *Board of Commissioners has conducted meetings 18 (eighteen) times, which the 8 (eight) of them carried out with the Board of Directors, 1 (one) with the Directors and KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, 2 (two) with the Directors and the SPA Consulting and the rest are internal meetings of the Board of Commissioners. Meetings conducted in the framework of the discussion of corporate performance and corporate activities and related activities of the company's control. Results of the meeting stated in the minutes of meetings and documented according to the dynamics of the meeting.*
2. *To supervise the administration policy, the course of administration by the Board of Directors include supervising the implementation of Annual Work Plan and Budget (RKAT) according to Anggaran Dasar, decisions and direction of the RUPS, as well as laws and regulations applicable*
3. *Provide feedback, opinions and advice to shareholders on corporate performance, activities and supervision of the Board of Commissioners and other things that the opinion requested by the Shareholders.*

4. Memberikan pendapat dan arahan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2011-2014 serta rencana perusahaan lainnya yang disiapkan Direksi, seperti perubahan struktur organisasi, penghapusan aktiva tetap perusahaan, proyek FLNG Masela, rencana pengembangan usaha di China dan kebijakan penanganan kegiatan klasifikasi di luar negeri serta usulan RKAP tahun 2012.
5. Memberikan persetujuan maupun rekomendasi atas perjalanan dinas Direksi ke luar negeri, realokasi dana investasi, penghapusan aktiva gedung Kantor Pusat 2 lantai, gedung Cabang Utama Tj. Priok serta kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, persetujuan Dewan komisaris atas fasilitas garansi bank, serta cuti tahunan Direksi
6. Mereview dan menindaklanjuti masukan serta rekomendasi dari Komite Audit diantaranya mengenai pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2011. Bersama dengan Komite Audit, melakukan review dan menerbitkan Piagam Komite Audit yang diperbaik sesuai Prinsip-Prinsip GCG dan review proses lelang gedung kantor pusat
7. Menghadiri kegiatan korporasi seperti customer meeting, Raker dan TOMSI tahun 2011 dan melakukan monitoring dengan kunjungan ke cabang/unit kerja yang perlu mendapat perhatian atas kinerja maupun program kerja strategisnya, sesuai program kerja Dewan Komisaris tahun 2011
8. Melaksanakan program pengembangan Dewan Komisaris melalui keikutsertaan dalam workshop tentang membangun Ketahanan Hukum Dalam Mengantisipasi Kriminalisasi Pengambilan Kebijakan di BUMN yang diadakan oleh Pusat Studi Investasi dan Keuangan serta seminar tentang Pemahaman Dasar Laporan Keuangan bagi Dewan Komisaris BUMN.
4. *Provide opinion and guidance on the Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2011 - 2014 and the other plan prepared by the Board of Directors , such as changes in organizational structure, corporate write-off of fixed assets, Masela FLNG project, a business development plan in China and the policy on the classification activities abroad as well as proposals RKAP 2012.*
5. *Approval and recommendation to the Board of Directors on business trips abroad, the reallocation of investment funds, write-off 2-story Head Office building, the Tj Priok Main Branch Office building , as well as write-off motorcycles and cars, the approval of the bank guarantee facility, and annual leave of Directors*
6. *Review and follow up on input and recommendations from the Audit Committee include the provision of KAP to audit the financial in 2011. Together with the Audit Committee, to review and publish an updated Charter of the Audit Committee in accordance Principles of GCG and the review process Head Office building auction*
7. *Corporate activities such as attending customer meetings, Raker and TOMSI in 2011 and conduct monitoring visits to the branch office that need attention on performance and strategic work program, according to the work program in 2011 of the Board of Commissioners*
8. *Implementing the BOC program development through participation in workshops on building Ketahanan Hukum Dalam Mengantisipasi Kriminalisasi Pengambilan Kebijakan di BUMN held by Pusat Studi Investasi dan Keuangan as well as seminars on Pemahaman Dasar Laporan Keuangan for the Board of Commissioners of BUMN*

Remunerasi Komisaris

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Komisaris atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan Perusahaan adalah sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2010 di Jakarta dan keputusan Direksi No. DU.165/KP.310/KI-11 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai berikut :

Remuneration of Commissioners

Remuneration is the reward given to the Commissioners for the role given to the management and supervision of the Company are in accordance with the Keputusan RUPS on June 25, 2010 in Jakarta and the decision of the Board of Directors No. DU.165/KP.310/KI-11 dated August 10, 2011 as follows:

Jabatan	Nama	Honorarium per bulan
Komisaris Utama	Capt. Drs. Abdul Gani, MM.MBA	14.420
Komisaris	Drs.Riyadi Widiasmoro, MSi	12.980
Komisaris	Liliek Mayasari, SE	12.980
Sek. Dekom	Susi Meyrista Tarigan,SE Ak, MSAk	5.410
Jumlah		45.790

Efektifitas Kerja Komisaris

Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat.

Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Risalah rapat ditanda-tangani Pimpinan rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pada tahun 2011 dewan komisaris telah melakukan rapat internal sebanyak 13 (Tiga belas) kali, dengan prosentase kehadiran sbb :

- Capt. Abdul Gani (Komisaris Utama) : 100 %
- Drs. Riyadi Widiasmoro (Komisaris) : 100 %
- Liliek Mayasari, SE, AK (Komisaris) : 100 %

Commissioner Work Effectiveness

Board of Commissioners met every 1 (one) month and at any time if deemed necessary to discuss various issues and business enterprise and evaluation of company performance. Call meeting of Board of Commissioners is made in writing by President Commissioner or by a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner. In a meeting call were included the agenda, date, time and place

All meetings chaired by the President Commissioner. In the case of President Commissioner is absent or unavailable, the meeting is headed by a Commissioner appointed by the President Commissioner.

All decisions taken at a meeting were taken with deliberation and consensus. In each meeting the minutes of the meeting which can describe the situation evolving, the decision making process, the arguments presented, the conclusions drawn and the statement of objections to the conclusion of the meeting if there is not unanimity of opinion.

Minutes of the meeting signed by the Chairman of the meeting and one member of the Commissioners appointed by and from among those present. Each member of the Commissioner is entitled to receive a copy of the minutes of meetings although does not attend the meeting.

In 2011 the board has conducted 13 (thirteen) times internal meetings, with the percentage of attendance as follows:

- *Capt. Abdul Gani (Commissioner): 100%*
- *Drs. Riyadi Widiasmoro (Commissioner): 100%*
- *Liliek Mayasari, SE, AK (Commissioner): 100%*

Dalam rapat internal tersebut, Dewan Komisaris juga mengundang Direksi sebanyak 8 (delapan) kali.

Direksi

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, mengurus dan mengelola bisnis untuk kepentingan Perusahaan yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Direksi mempunyai tugas utama :

- Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
- Menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sehat dalam perusahaan.
- Bertugas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS serta peraturan lainnya.
- Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Susunan Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-259/MBU/2010 tertanggal 06 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Capt. Purnama, MM
2. Direktur Keu. & Personalia : Edy Cahyono, ST, MSM
3. Direktur Teknik & Pengembangan : Ir. Ajatiman
4. Direktur Operasi & Pemasaran : Ir. Setudju Dangkeng, SE

Remunerasi Direksi

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengelolaan Perusahaan adalah sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2010 di Jakarta dan Keputusan Direksi DU .165/KP.310/KI-11 tanggal 10 Agustus 2011, sebagai berikut :

In internal meetings, the Board of Directors are also invited as many as 8 (eight) times.

Directors

Directors in good faith and responsibly, taking care of and manage the business for Company interest as big as possible. In performing their duties, the board due regard to balance the interests of all parties related to Company activities. Board of Directors acted very carefully, be cautious and consider about various important aspects which are relevant in performing their duties. Directors use the authority and resources owned by the Company solely for Company interest.

Directors have the primary duties:

- *Lead and manage the company in accordance with its aims and objectives.*
- *Improve efficiency and effectiveness of the company.*
- *Apply the practices of good corporate governance within the company.*
- *Assigned based on Company's statutes, the decision of AGM and other rules.*

Board of Directors based on Minister BUMN Decree No. KEP-259/MBU/2010 - December 6, 2010 as follows:

1. *President Director : Capt. Purnama, MM*
2. *Director of Monetary & Personnel : Edy Cahyono, ST, MSM*
3. *Director of Technical & Development : Ir. Ajatiman*
4. *Director of Operations & Marketing : Ir. Setudju Dangkeng, SE*

Remuneration of Directors

Remuneration is the reward which is given to the Directors for the role that given to the maintenance and management of the Company are in accordance with the Decision of the RUPS dated June 25, 2010 in Jakarta and the Decision of the Directors dated 10 Agusutus 2011 No DU.165/KP.310/KI-11 DU , as follows:

Jabatan	Nama	Honorarium per bulan	Tunjangan perumahan	Total Per Bulan
Dir.Utama	Capt. Purnama,MM	36.050	10.815	46.865
Dir.Keu& Personalia	Edy Cahyono ST, MSM	32.445	9.735	42.180
Dir.Teknik & Pengembangan	Ir. Ajatiman	32.445	9.735	42.180
Dir.Operasi & Pemasaran	Ir. Setudju	32.445	9.735	42.180
Jumlah		133.385	40.020	173.405

Selain Remunerasi diatas kepada Direksi juga diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional masing-masing 1 (satu) unit sesuai dengan azas kepentasan dan kemampuan perusahaan.

In addition to the above remuneration to the Directors were also given the facility operational service vehicles each 1 (one) unit in accordance with the principles of merit and ability of the company.

Efektifitas Kerja Direksi

Secara umum efektifitas dan kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Direksi mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.

Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan. Dalam panggilan rapat tersebut dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

Pada tahun 2011, Direksi melakukan rapat internal sebanyak 18 (Delapan belas) kali dan melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris sebanyak 8 (Delapan) kali, dengan prosentase kehadiran sebagai berikut:

- Capt. Purnama, MM : 100 %
- Edy Cahyono ST, MSM : 100 %
- Ir. Ajatiman : 100 %
- Ir. Setudju Dangkeng : 100 %

Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam hal dianggap perlu, Komisaris dapat berinisiatif menyelenggarakan Rapat Konsultatif dengan Direksi untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan.

Job effectiveness of the Board of Directors

In general, the effectiveness and performance of the Board of Directors determined based on the duties listed in the legislation in force, and Articles of Association and Shareholders' mandate.

Board of Directors meeting 1 (one) month and at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors.

Call a meeting of Directors is made in writing by a member of Board of Directors entitled to represent the Company. In the meeting call were included the agenda, date, time and place of the meeting.

In 2011, the Board of Directors conduct internal meetings as many as 18 (eighteen) times and conduct coordination meetings with the Board of Commissioners as many as 8 (eight) times, with the percentage of attendance as follows:

- Capt. Purnama, MM: 100%
- Edy Cahyono ST, MSM: 100%
- Ir. Ajatiman: 100%
- Ir. Setudju Dangkeng: 100%

Working relationship between Board of Commissioners and Directors

In case considered necessary, Board of Commissioners may initiate Coordination Meeting with Board of Directors to discuss relevant company's issues. Similarly,

Demikian pula bila dianggap perlu, Direksi dapat berinisiatif menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Komisaris untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan. Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris untuk memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dalam setiap Rapat Konsultatif tersebut dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Selama tahun 2011, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Konsultatif sebanyak 7 (tujuh) kali.

Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan dengan SK Komisaris Utama No. KU.002/Dekom.101/X/KI-09 tanggal 22 Oktober 2009 menyebutkan, Komite Audit sebagai organ Komisaris bertugas memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit :

Ketua : Drs. Riyadi Widiasmoro, MSi

Anggota : - Tri Ashadi SE, MM
 - Suwarno, SE

Komite Audit dalam tahun 2011 telah melaksanakan tugas sbb:

1. Memonitor Perkembangan proses Audit KAP atas audit laporan keuangan tahun 2010 serta menginformasikannya kepada Dewan Komisaris

if deemed necessary, Directors may initiate Coordination Meeting with Board of Commissioners to discuss relevant company's issues. In each meeting, information and data important for the understanding of Board of Commissioners will be given in writing before the meeting to ensure time availability for the Board to understand issues discussed. If necessary, Board of Directors can make a summary of material provided as long as they do not reduce the essential information that can influence in decision making.

In each consultative meeting will be made the minutes of meeting which can describe the situation evolving, decision-making process, arguments presented, conclusions drawn, and statement of objections to meeting conclusion when there is no opinion unanimity. During year 2011, Board of Directors and Board of Commissioners have held coordination meetings as many as 7 (seven) times.

Audit Committee

Duties and responsibilities of Audit Committee as contained in Charter of the Audit Committee established by SK Commissioner no. KU.002/Dekom.101/X/KI-09 dated October 22, 2009 mentioning, Audit Committee as an organ of Board of Commissioners is charged in providing recommendations to Board of Commissioners on the report or other matters submitted by Board of Directors to Board of Commissioners, in identifying the things require the attention of Board of Commissioners and perform other tasks related to the duties of Board of Commissioners.

The composition of the Audit Committee:

Chairman : Drs. Riyadi Widiasmoro, MSi

*Members : - Tri Ashadi SE, MM
 - Suwarno, SE*

Audit Committee in 2011 had been fulfill out the following tasks:

- 1. Monitor the development of the Audit KAP for the 2010 for financial statement audit and inform the BOC.*

2. Memberi pendapat dan masukan kepada Dewan Komisaris atas laporan manajemen tahun 2010, Laporan Manajemen Triwulan I/2011 dan Laporan Manajemen Triwulan II/2011 dan Laporan Manajemen Triwulan III/2011
3. Memberi pendapat dan masukan kepada Dewan Komisaris atas Revisi Draft RKAP 2012
4. Memberi pendapat dan masukan kepada Dewan Komisaris atas Draft Struktur Organisasi PT. BKI (Persero)
5. Mereview Piagam Komite Audit dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris
6. Mengikuti rapat internal Dekom membahas Draft Struktur Organisasi PT. BKI
7. Memberi pendapat dan masukan kepada Dewan Komisaris atas laporan keuangan audited 2011
8. Meeting dengan Dewan Komisaris, Direksi dan KAP membahas proses dan hasil audit KAP atas laporan keuangan 2010
9. Memberi pendapat dan masukan kepada Dewan Komisaris atas Draft RJPP 2011-2014
10. Melakukan pembahasan dengan KAP, Ka SPI dan Kadiv Keuangan berkenaan dengan tindak lanjut perbaikan isi Laporan Keuangan 2010 Audited sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi dan KAP
11. Memberikan komentar terhadap beberapa dokumen: Agreement ABS, MOU JME, Perjanjian Kop ESDM
12. Menghadiri cek posisi di Kantor Pusat dan Raker BKI di Yogyakarta
13. Memonitor beberapa cabang BKI bersama dengan Dewan Komisaris
14. Memberi pendapat dan masukan kepada Dewan Komisaris atas proses lelang gedung kantor pusat
15. Memberikan pendapat dan masukan atas usulan RKAP tahun 2012
16. Memberikan pendapat atas usulan realokasi dana investasi kendaraan bermotor menjadi pembelian tanah di Cigading
2. Give opinions and advice to the BOC for the 2010 management report, 1st -2011 Quarterly Management Report and 2nd -2011 Quarterly Management Report and 3rd - 2011 Management Report.
3. Give opinions and advice to the BOC on Revision Draft RKAP 2012.
4. Give opinions and advice to the BOC on Draft Organization Structure PT. BKI (Persero)
5. Reviewing the Audit Committee Charter and the proposed amendments to the BOC.
6. Held the internal meeting to discuss Draft Organization Structure PT. BKI
7. Give opinions and advice to the BOC on audited financial statements 2011
8. Meeting with BOC, Directors and KAP to discuss the process and results of KAP audit the financial statements 2010
9. Give opinions and advice to the BOC for 2011-2014 Draft RJPP
10. Conduct discussions with KAP, Ka SPI and Kadiv Keuangan regarding the content of the follow-up repair 2010 Audited Financial Statements in accordance with the BOC, BOD and KAP meeting.
11. Comment on some documents: ABS Agreement, MOU JME, Kop EMR Agreement
12. Attending the check positions at Head Office and Raker BKI in Yogyakarta.
13. Monitoring several branches together with the BOC.
14. Give opinions and advice to the BOC for the auction process of Head Office building
15. Provide opinions and input on the proposal of 2012 RKAP
16. Provide an opinion on the proposed reallocation of vehicles investment funds in to purchase land in Cigading

Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan telah memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubun-

Internal Control System

The company has been maintaining internal control system which ensures the reliability of financial accounting systems. Financial internal control system put in place to provide reasonable assurance in rela-

gannya dengan menjaga asset dari penyalah gunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam Perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja. Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga membentuk Satuan Jaminan Mutu (Satjamtu) sebagai penanggung jawab diterapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2008 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (Customer satisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous Improvement). Dalam mendukung aktivitas pengendalian internal, Perusahaan senantiasa menjamin independensi SPI dan Satjamtu dalam melaksanakan audit serta meningkatkan kompetensi para auditornya. SPI selama tahun 2011 telah melakukan audit operasional terhadap 14 (Empat belas) unit kerja, sedangkan Satjamtu telah melakukan audit terhadap 14 (Empat belas) unit kerja, meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi.

Auditor Eksternal

Sesuai keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2010 RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP yang akan bertindak sebagai Auditor Independen untuk melaksanakan audit atas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun Buku 2010. Selanjutnya, berdasarkan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG , Dewan Komisaris telah menunjuk KAP KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO TONO sebagai Auditor atas Laporan Keuangan PT. BKI tahun buku 2011.

Auditor eksternal tersebut terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran,

tion to the keeping of assets from misuse and unauthorized transfer of ownership, maintaining the validity of accounting records and the reliability of reliable financial information used by the Company those were published.

The implementation of tasks of internal control is the responsibility of all working units. The Company provided an Internal Audit Unit (IAU) as the unit responsible for the effectiveness of internal control system. The company also established the Quality Assurance Unit as the one which is responsible for the implementation of Quality Management System based on ISO standard requirements 9001:2000 as a part of its commitment to improve management of customer satisfaction and continuous improvement. In supporting internal control activities, the company has ensured the independence of ISU and Quality Assurance Unit in conducting audits and increased auditors' competence. SPI during year 2010 has conducted operational audits of 14 (fourteen) business units, while Quality Assurance Unit has conducted audits of 14 (fourteen) business units, including Head Office and Production Units.

External Auditor

In accordance with the AGM decision dated June 25, 2010, AGM gives authorization to Board of Commissioners to appoint the accounting firm that will act as an independent auditor to conduct an audit of annual reports and yearly calculation. BKI year 2010. Furthermore, based on audit result of the financial statements in fiscal year 2009 and as proposed by Board of Directors, Board of Commissioners approved re-appointment of Kanaka Puradiredja, Suhartono Accountant Office as auditor of BKI financial statement year 2011.

The external auditor is free from the influence of Board of Commissioners and Directors and interested parties within the Company, and company must record all necessary supporting data needed by external auditors so that enable the external auditor to provide his opinion about the fairness, reliability, and consistency

ketaat azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Tugas Auditor Eksternal adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan memberikan pendapat (opini) secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standart Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin proses penunjukan Auditor Eksternal dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen tanpa pengaruh Direksi dan pihak-pihak diluar Perusahaan. Besarnya jasa audit yang dibayarkan Perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2011 yaitu Rp. 102.850.000,- termasuk PPN 10%. Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan.

Integritas dalam berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG melandasi seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Seluruh jajaran Perusahaan telah mensosialisasikan GCG Code ini untuk mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing.

Perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, maupun perdata. Menjadi kewajiban setiap unit kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan. Perusahaan telah menetapkan kebijakan melarang anggota Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi administratif dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi bisnis

of Company's financial statement with Indonesian Financial Accounting Standard. The task of external auditor is to conduct an audit of company's financial statements and give an opinion independently about fairness and consistency of Company's financial statement with Financial Accounting Standards and applicable regulations. The Company guarantees the process of appointing external auditors and audit implementation was conducted independently without any influence of Board of Directors and parties outside the company. The amount of auditing services paid by the company for financial reporting year 2010 is Rp 102.850.000,- including VAT 10%. Kanaka Puradiredja, Suhartono Accounting Firm did not provide other consulting services to the company.

Integrity in business

Ethical standards in all business activities based on GCG principles underlie all activities of the company to run its business. All levels of the company have socialized this Code GCG to maintain honesty, transparency, impartiality, accountability, integrity and fairness in work processes and transactions in their respective environment.

The Company has implemented a monitoring function by using audits based on correct principles and generally accepted and always strive to be illegal, unfair and a violation of the norms and regulations can be subject to sanctions, both administrative and civil liability. It has been the responsibility for each business unit to constantly follow up on any audit findings submitted by the supervisory function. The Company has established a policy to prohibit Board of Commissioners, Directors and all employees and related parties engaged in transactions that violate the law and principles. When these transactions are proven to occur, then each party which is directly involved will be given administrative sanction and demand in accordance with applicable law. Understanding that violate the law and principles of GCG is used to describe any business transaction categorized unlawful or contrary to the integrity of the company. Such transactions are,

yang dikategorikan melawan hukum atau bertentangan dengan integritas Perusahaan. Transaksi tersebut, antara lain pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan telah melakukan hubungan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berusaha keras agar memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham. Perusahaan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan

Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestariaan lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan jangka panjang.

Perusahaan telah mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan telah mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut Perusahaan telah memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestariaan lingkungan.

Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk senantiasa melengkapi dan menyediakan alat, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja agar seluruh surveyor dan inspektor dapat bekerja aman dan selamat. Dalam praktiknya, Perusahaan memiliki HSE (Health, Safety & Environment) Manual sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian aspek Kesehatan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Kerja.

among others, giving or receiving bribes and gifts in an effort to influence decisions related to corporate business.

Relation with Shareholders

Company has made relation with the Shareholders in accordance with laws and regulations. Company always tries hard to give an optimal and sustainable contribution to the Shareholders. Company always tries to make sustainable growth.

Safety and Occupational Health and Environmental Conservation

Company always gives priority to safety, health and environmental conservation. The Company recognizes that the management of good occupational health and environmental responsibility is very important for long-term corporate success.

The Company has taken appropriate action to avoid accidents and health problems in the workplace. Company always makes sure that employees work in a safe and healthy workplace. For this purpose the Company has ensured that the asset, work location and other facilities, meet the applicable statutory regulations with respect to health and safety requirements and environmental conservation.

The Company also has an obligation to always complete and provide tools, facilities and safety and health equipment in order that all surveyors and inspectors can work securely and safely. In practice, the Company has HSE (Health, Safety & Environment) Manual as a reference in the implementation and control of Health, Safety and Environmental Protection Work aspects.

Pengadaan dan Hubungan dengan Rekanan

Perusahaan telah menerapkan proses pengadaan sesuai prinsip GCG, antara lain menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, kompetitif, fair dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Proses pengadaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengadaan barang dan jasa, Perusahaan memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas. Proses yang demikian akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk berkompetisi dalam proses pengadaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Dalam pemilihan rekanan untuk proses pengadaan tidak diperbolehkan menunjuk rekanan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, pejabat ataupun personil di BKI. Selain itu dalam pemilihan barang atau rekanan, diupayakan semaksimal mungkin untuk mempergunakan produk Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, efisien dan efektivitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar

Perusahaan tanggap dan memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal dalam wilayah operasi Perusahaan. Perusahaan telah menegakkan komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan.

The process of Procurement and Relationship with Partners

The Company has implemented a procurement process in accordance with GCG, among others, upholding the principles of openness, competitive, fair and accountable. The procurement process does not conflict with applicable legislation.

For goods and service procurement, the Company has clear, written rules to ensure that the implementation of the goods and service procurement in line with principles mentioned above. Such processes will provide maximum benefit for company interest and provide equal opportunity to all partners to compete in procurement process in accordance with their capabilities and their experience. In choosing a partner for the procurement process, it was not allowed to appoint a partner that could cause conflict of interest with Board of Commissioners, Directors, officers or personnel in BKI. Also in the selection of goods or partner, sought as maximally as possible to use the product in the country by staying consider aspects of quality, economical and financial aspects so that do not conflict with legislation.

Partnership with the Neighborhood Community

Company is responsive and paying attention to community issues, especially those who live in operation area. The Company has established a commitment that wherever the Company operates a good relationship with surrounding communities is a basic foundation for long term success of the Company. Realizing that each community has different characteristic, the company should try to understand and interact with surrounding communities and help people with a reasonable way by taking into account the ability of the Company and applicable regulations. Company ap-

Kemitraan dengan masyarakat sekitar telah dilaksanakan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Penerapan Teknologi

Perusahaan selalu berupaya, mengadopsi teknologi dan standar yang diakui dalam mengembangkan dan mempublikasikan Rules & Regulation BKI sebagai acuan bagi BKI melakukan pelayanan jasa survey dan sertifikasi. Penerapan Teknologi Informasi juga telah dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses produksi serta pelaporan keuangan dan sistem pelaporan lainnya.

Manajemen Risiko

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali Perusahaan maupun risiko yang berada diluar kendali Perusahaan. Perusahaan telah mengendalikan dan meminimalkan risiko-risiko yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehatihan (prudential management) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat ekternal, Perusahaan berusaha mengidentifikasi secara seksama dan mengevaluasi peluang terjadinya dan dampaknya terhadap Perusahaan. Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, dengan merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal Perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik analisis keuangan tertentu sedemikian rupa sehingga resiko yang mungkin timbul tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Hubungan dengan Pejabat Negara

Adalah kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pejabat Negara yang memiliki

preciates any partnership activities that contribute to the community and enhance Company's social value.

Technology Application

The Company always strives to adopt technology and standards that are recognized in developing and publish BKI Rules & Regulations as a reference for BKI to conduct survey and certification services. The application of information technology has also been developed in order to improve service and production process acceleration and financial reporting and other reporting system.

Risk Management

Company is fully aware that the company is not free from risk, whether risk is under control and the risks that are beyond the company's control. The Company has controlled and minimized the risk of internal activities by applying prudential management and risk management principles. Whereas external risks, the Company is carefully trying to identify and evaluate opportunities and their impact for the Company. Based on the basis of this identification, the Company made necessary efforts to minimize such risks, by designing contracts so that company is legally protected from unnecessary risks or to perform certain financial analysis techniques in such a way that risks that may arise does not reduce Company's value drastically. However, the Company is also aware of risks beyond the control of which can not be minimized its impact by the effort internally.

Relationship with State Officials

It is company policy to develop and maintain good relationships and effective communication with all levels of state officials who have authority in the field of

wewenang pada bidang operasi Perusahaan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan terandalkan mengenai aktivitas usaha dan operasional Perusahaan telah dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan, dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan Perusahaan telah melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga, baik didalam maupun diluar Perusahaan. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi.

Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama dari Perusahaan untuk menghargai kerjasama yang berkelanjutan dari pelanggan, rekanan, dan mitra usaha lainnya. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan seperlunya.

Keterbukaan Informasi

Perusahaan telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangannya kepada Pemegang Saham dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

company's operation within tolerance limits allowed by law.

Company Data and Information Confidentiality

Accurate and reliable records about company's business and operational activities has been maintained all times. Any payment of money, transfer of ownership, the completion of delivery services and other transactions should be reflected in full and in detail on accounting system and business records of the Company. All parties must disclose all relevant information and fully cooperate with internal and external auditors in compliance audit process or other investigation.

Company policy also prohibits Board of Commissioners, Directors and employees to disclose confidential information concerning the Company or its customers to third parties, both inside and outside the company. Considering that the disclosure of such confidential information could harm the Company or its customers and provide benefits to other parties, then the provision of confidential information should get the approval from Board of Directors.

The company also works with special data of customers, suppliers and business partners. This is a very important trust and must receive primary attention from the company to appreciate the continuing cooperation of customers, suppliers and other business partners. Therefore, no person may disclose confidential information to outside parties without approval of Directors or officers appointed by Board of Directors, or no person may disclose confidential information to others except as necessary based on service needs.

Information Disclosure

The Company has revealed important information in annual report and financial report to shareholders and relevant government agencies in accordance with applicable laws and regulations in timely, accurate, clear and objective.

Perusahaan menyampaikan informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui Website, Customer Meeting, Pertemuan Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I), Presentasi, BUMN online, Brosur, Company Profile, Annual Report dan Promosi di sejumlah media massa.

Karyawan dan Hubungan Industrial

Perusahaan telah mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi, serta program jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan mempunyai unit bisnis yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi karyawan serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan GCG. Direksi memperlakukan pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, kelompok, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja dan indikator lain yang bersifat objektif. Perusahaan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial, antara lain :

- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai.
- Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- Memberikan hak kepada pegawai untuk berkumpul dan berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.
- Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan.

Company submitted information to public, among others, through the website (www.klasifikasiindonesia.com), customer meetings, meetings Classification Consultancy Committee of Indonesia (K3I), presentation, online State Owned Companies, brochures, company profile, annual report, exhibition and promotion in a number of mass media.

Personnel and Industrial Relation

The company has developed its human resources in accordance with needs, vision and mission, and company's long-term program.

The Company has business units that operate in various regions with different religion, culture, traditions, customs, employees' condition and local regulations. Although sensitive to these differences, the Company has adopted the principles based on GCG provision. Directors treat employees fairly and free from bias due to differences in ethnicity, origin, group, sex, religion and origin of birth and matters unrelated to performance and objective other indicators. The Company has established several policies related to personnel and industrial relations, among others:

- *Provided good and safety working conditions for employees.*
- *Protected employees from all forms of possibility that endanger the safety and health in workplace.*
- *Gave employees a right to assemble and association in accordance with applicable legislation.*
- *Provide opportunities for employees to participate in education, training and further development in line with relevant competence and in accordance with the Company's needs both present and future.*
- *Ensured that employees received remuneration schemes, generally follow the applicable rules / regulations and in accordance with company's ability.*
- *Provide incentives and performance bonuses to employees based on performance.*
- *Board of Directors has full authority to act in strict accordance with applicable provisions and regulations to uphold GCG principles to employees who are proven to cause restlessness, violating the*

- Memberikan bonus dan insentif prestasi kepada pegawai sesuai kinerjanya.
- Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tegas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip GCG terhadap pegawai yang terbukti menimbulkan kerusakan, melanggar norma disiplin pegawai, dan merusak suasana kerja yang kondusif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan. Kewajiban Pegawai terhadap Perusahaan antara lain:

- Setiap pegawai wajib mentaati Peraturan Pokok Kepegawaian (Perpok), Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.
- Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
- Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.
- Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.
- Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungan kerjanya.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran BKI yang berkaitan dengan tugas pemasaran, drawing approval, pelaksanaan survey dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontak / perjanjian dan administrasi keuangan termasuk akuntansi, telah menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan pihak lain atau yang digunakan oleh Perusahaan. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan dan pegawainya.

norms of discipline of employees, and damaging conducive working atmosphere.

Employees also have various obligations that must be fulfilled to the Company, among others:

- *Every personnel shall obey the Principal Civil Service Regulation, Company values and all regulations issued by the Company.*
- *Every personnel shall prioritize company interest which relates directly or indirectly with their responsibilities.*
- *Every personnel shall mobilize all resources and efforts in implementing the job tasks entrusted to them.*
- *Every personnel shall maintain the property and good name of the Company.*
- *Every personnel who became a supervisor shall develop and provide an example of employees in work environment.*

False Statement, False Claims, and Conspiracy

Whole range of BKI related to marketing tasks, drawing approval, execution of survey and inspection, certification process, the making of contracts / agreements and financial administration including accounting, have realized the importance of making an accurate statement, and right claim to the Chairman, Government or to any other party. This includes any verbal or written statement submitted to the other party or used by the Company. Intentionality in submitting a statement or claim that is untrue or misleading or which involve any conspiracy with others to harm the other party could result in administrative punishment, criminal, civil liability for the relevant personnel and other parties involved, including partners of the Company and its employees.

Benturan Kepentingan

BKI mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi terjadinya pertentangan kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan dengan kepentingan Perusahaan. Benturan ini dapat melibatkan kepentingan pemakai jasa, instansi lain yang berkepentingan dengan jasa BKI, rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, atau calon karyawan) atau bahkan anggota masyarakat di tempat Perusahaan beroperasi.

Terdapat dua prinsip utama yang telah diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbukannya:

- Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan orang dan atau pihak lain yang terkait.
- Menghindari setiap aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan; aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan citra dan reputasi Perusahaan.

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survey / Inspeksi

BKI sebagai Perusahaan yang memprioritaskan aspek keselamatan telah menyadari bahwa hasil survey, laporan, dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik kapal, pemilik cargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas. Untuk itu seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Unit Produksi dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektor dan staf teknik Kantor Pusat selalu menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, keputusan hasil survey, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Conflict of Interest

BKI defines a conflict of interest as a situation of conflict of personal interest for commissioners, directors, or employees with company interest. This conflict can involve interest of service users, other agencies concerned with BKI services, partners, employees (retired, active or prospective employees), or even members of community in which it operates.

There are 2 (two) main principles that have been followed to prevent conflict of interests and are often caused further implications:

- *Not utilize the function in office for personal benefit or for benefit of people and or other related party.*
- *Avoid any activity outside agencies that can influence negatively on the independence and objectivity in decision-making consideration. Activity is certainly an activity that may conflict with job performance or that could harm the image and reputation of the Company.*

Conflict of Interest in Survey / Inspection Decision

BKI as a company that prioritizes the safety aspect has realized that the survey results, reports and certificates issued have implications for safety aspects required by parties concerned, including ship owners, cargo owners, insurance, shipbuilding, passengers, crew, Government , and public. For that all Directors, Heads of Division, Head of Unit, Head of Production Unit and Deputy, Head of Department, Head of Division, Surveyors, Inspectors and Headquarters technical staff always maintain their independence in decision making, decision recommending the survey results and preparing reports. In the event of a conflict of interest, then consideration of safety absolutely becomes priority in accordance with applicable rules and regulations.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan, atau mempunyai kepentingan finansial tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

- Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor dan pemasok yang berkompetisi,yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan.
- Meminta atau menerima uang, pemberian/hadiah, atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor dan pemasok yang berkompetisi.
- Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan, dan sebaliknya. Pemasok barang dan jasa/kontraktor yang diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan menghindari benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan Perusahaan.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain di luar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan. Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam setiap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan atau karyawan Pe-

Conflict of Interest in Goods Procurement

Board of Commissioners, Directors, Management and Employees must not participate in any procurement activity involving the company where the individual or family concerned have an interest or significant share ownership or has certain financial interest. As it meant by participating in procurement process are:

- *Invite, give approval or discuss future employment with contractors and suppliers who compete, which is any business entity which that in the future can be a competitor or winning a contract from the company.*
- *Solicit or accept money, gift or other things of value, either directly or indirectly from competing contractors and suppliers.*
- *Try to obtain or disclose information related to the procurement process and vice versa. Suppliers of goods and services (contractors) who are invited to participate in the procurement process must meet the requirements to avoid conflicts of similar interest as that imposed on Board of Commissioners, Directors, management and employees.*

Conflict of Interest by Side Activity

Board of Commissioners, Directors, management and employees may be allowed to do other activities outside working hours determined by the requirement that such activities do not cause conflict of interests with company interest and / or the activity does not reduce the ability to fulfill the tasks that have been mandated. Involvement in other activities outside the Company may not reduce the independence and objectivity in making decision or influence the effectiveness and timeliness of work completion of those employees. Each personnel must uphold the standards of performance, without exception, and wherever possible to act objectively and independently in each of their daily activities. If then the Directors and / or employees of the company felt the possibility of conflict of interest

rusahaan merasakan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direksi. Permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum karyawan yang bersangkutan menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultansi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut:

- Terdapat kemungkinan benturan kepentingan.
- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan di Perusahaan.
- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan.
- Aktivitas tersebut melebihi enam jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.
- Dapat mengganggu kepentingan Perusahaan dan atau tugas dan tanggung jawab pokok karyawan yang bersangkutan.

Penyelewengan, Penyimpangan dan Sejenisnya

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan serta senantiasa menerapkan prosedur yang wajib ditaati dan diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan dan penyimpangan.

Penyelewengan dan penyimpangan yang dimaksud adalah:

- Pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan.
- Melakukan ketidak-jujuran atau kebohongan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan.
- Melakukan penggelapan, penghilangan, atau pemindah-tanganan segala sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan pemalsuan atau manipulasi surat berharga Perusahaan seperti cek, giro, sertifikat, dan lain-lain.
- Menyalahgunakan asset Perusahaan.
- Melakukan pengalihan kas, surat berharga atau as-

in activities conducted, then the concerned shall notify it in writing to Board of Directors. The allowance to perform sideline activities must be submitted and approved by appointed authorized officer before the relevant employees run jobs or consultancy activities after work in the event of one or more of the following:

- *There is a possibility of conflict of interest.*
- *The activities outside the company come from the knowledge gained both directly and indirectly with the work within the company.*
- *Outside activities are activities that overlap with company working hours.*
- *Such activities exceed 6 (six) hours of work on a particular workday or more than 20 (twenty) hours of work on a particular work week.*
- *May interfere the company interest and / or duties and responsibilities of those employees.*

Fraud, irregularities and kinds

The Company has established a policy to prohibit any form of fraud and irregularities and continue to implement procedures that must be obeyed and followed related to finding, recognition, reporting, inquiry and investigation on suspicion of fraud and irregularities.

Fraud and irregularities referred are:

- *The violation of company rules.*
- *Conduct of dishonesty or deceit related to job duties.*
- *Conduct fraud, omission, or alienation of everything that could hurt the company directly or indirectly.*
- *Conduct fraud or manipulation of company's securities such as checks, demand deposits, certificates and others.*
- *Abuse of company assets.*
- *Transfer cash, securities or assets of the company*

- set Perusahaan untuk penggunaan atau keuntungan pribadi.
- Melakukan penanganan dan pelaporan transaksi bisnis dan keuangan Perusahaan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
 - Melakukan pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

for personal use or interest.

- *Conduct the handling and reporting of business and financial transaction of the company that do not comply with the procedures and regulations.*
- *Perform falsification of accounting records or Company's financial statement for personal interests or other interests that can harm the company either directly or indirectly.*

Kinerja Keuangan

Financial Performance

Laporan keuangan konsolidasi BKI yang telah diaudit dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laba Rugi

Revenue

Pendapatan Usaha perusahaan pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 18,73% dibandingkan dengan tahun 2010. Kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan usaha berasal dari pertumbuhan pendapatan segmen Klasifikasi & Statutoria sebesar 19,74% dan pendapatan segmen Konsultansi & Supervisi sebesar 16,96%.

Pendapatan netto tahun 2011 sebesar Rp 334,085 miliar atau 2,94% di bawah anggarannya Rp 344,210 miliar.

Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2011 sebesar Rp 267,297 miliar atau 4,19% di bawah anggarannya sebesar Rp 278,989 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 13,98% dibandingkan tahun 2010.

Laba Usaha

Realisasi laba usaha mencapai Rp 66,788 miliar (2,40%) dihadapkan dengan anggarannya sebesar Rp 65,221 miliar. Pertumbuhan laba usaha perusahaan pada tahun 2011 mencapai 39,99% dibandingkan laba usaha pada tahun 2010. Sehingga laba bersih setelah pajak mencapai Rp 51,360 miliar atau tumbuh 41,78% dari laba bersih tahun 2010.

BKI consolidated financial statement already audited in this Annual Report shall be prepared based on the generally applicable accountancy standards in Indonesia.

Profit Loss

Revenue

The company's operating revenue in 2011 increases by 18.73% compared to 2010. Contribution to revenue growth comes from Classification & Statutory segment by 19.74% and Consultation & Supervision segment by 16.96%.

Net income in 2011 amounted Rp 334.978 billion or 2.68% below its budget of Rp 344.210 billion.

Operating Expenses

Realization of operating expenses in 2011 is Rp 267.297 billion or 4.19% below its budget of Rp 278.989 billion and increases by 13.98% compared to 2010.

Operating Income

Realization of operating income is Rp 66,788 billion (2.40%) compared to budget of Rp 65,221 billion. The increase in company's operating income in 2011 reaches 39.99% compared to 2010. Therefore, earning after tax reaches Rp 51,360 billion or grows 41.78% compared to 2010.

Operating Ratio sebesar 80,01% atau 1,04% di bawah anggaran sebesar 81,05%.

Grafik :

Net Revenue (2007-2011)

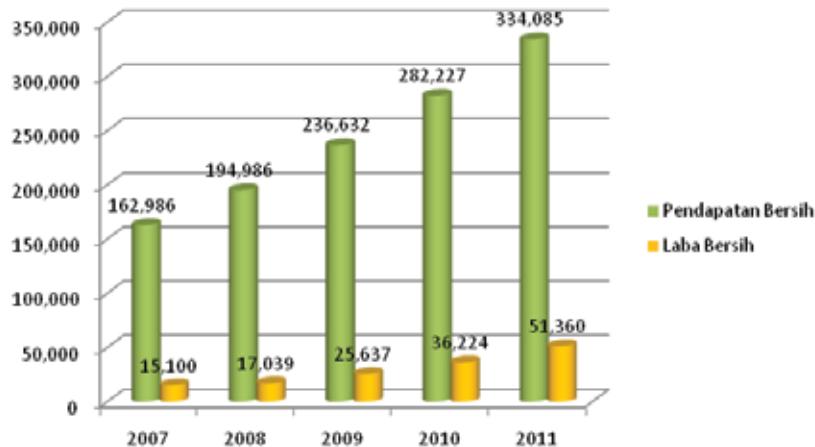
Net Profit (2007-2011)

Operating Ratio is 80.01% or 1.04% below its budget of 81.05%.

Grafik :

Net Revenue (2007-2011)

Net Profit (2007-2011)



Rasio Keuangan

a. Rasio Likuiditas

- Rasio lancar tahun 2011 sebesar 293,33% lebih tinggi dari rasio lancar tahun 2010 sebesar 325,98%.
- Rasio kas tahun 2011 sebesar 97,30% dan tahun 2010 sebesar 117,01%. Ini menunjukkan ada peningkatan dalam penyediaan kas untuk pembiayaan operasional dan atau pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

b. Solvabilitas

Total Debt to Equity Ratio tahun 2011 sebesar 32,98% dan tahun 2010 sebesar 26,59%. Mengingat hutang yang ada tidak menimbulkan beban bunga (hanya hutang transaksi operasi / dagang), maka adanya hutang tersebut sangat mendukung dalam penyediaan modal kerja serta berpeluang meningkatkan laba perusahaan.

c. Return on Investment Ratio (ROI)

Return on Investment Ratio tahun 2011 sebesar 36,04% dan tahun 2010 34,94%.

Financial Ratio

a. Liquidity Ratio

- Current ratio is 293.33% which higher than current ratio in 2010 (325.98%).
- Cash ratio is 97.30% in 2011 and 117.01% in 2010. This shows that there is increase in available cash for operational financing and or short term liabilities payment.

b. Solvability

Total Debt to Equity Ratio in 2011 is 32.98% and in 2010 was 26.59%. Considering that the existing loans do not accrue interest expense (only operating / commercial transaction loans), they will really support in making working capital available and providing opportunity to increase company's income.

c. Return on Investment Ratio in 2011 is 36.04% and in 2010 is 34,94%.

d. Aktivitas**• Total Asset Turn Over**

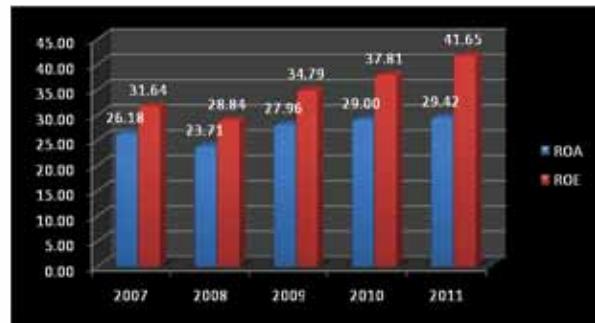
Perputaran asset pada tahun 2011 untuk meraih pendapatan adalah sebesar 1,52 kali atau turun 0,2 kali dari TATO tahun 2010 sebesar 1,72 kali.

• Collecting Period

Rata-rata hari pencairan piutang tahun 2011 selama 89 hari atau 12 hari lebih lambat dari tahun 2010 sebesar 77 hari.

Dari rasio-rasio di atas terlihat bahwa likuiditas Perusahaan tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini disebabkan upaya melakukan efisiensi dalam menggunakan dana untuk membiayai operasional dan investasi. Ditinjau dari solvabilitas menunjukkan kondisi financial Perusahaan cukup aman dengan hutang-hutangnya dijamin modal sendiri serta Perusahaan mampu meningkatkan laba.

ROA (2007-2011)

**d. Activities****• Total Asset Turn Over**

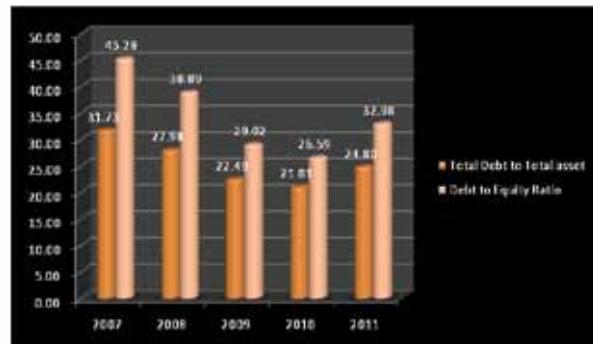
Total Asset Turn Over in 2011 is 1.52, decreasing from 2009 which was 1.72.

• Collecting Period

Collecting period in 2011 is 89 days or 12 days slower than in 2010 which was 77 days.

From the above ratios, it seems that company's liquidity in 2011 increases compared to 2010. This result from the efforts to utilize fund in more efficient way for operational and investment. Viewed from solvability aspect, it is considered that the financial condition of the company is sufficiently safe because the company's loans are equity secured and company can increase its income.

*Total Debt to Total Asset (2007-2011)
Debt to Equity Ratio (2007-2011)*

**Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Kriteria penilaian Perusahaan didasarkan pada SK Menteri Negara BUMN RI no. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. Materi yang dinilai mencakup :

- Aspek keuangan
- Aspek operasional
- Aspek administrasi

Company's Health Level

Criteria used to evaluate company's health level is in accordance with Decree of State Minister for SOE no. Kep-100/MBU/2002 dated 4 June 2002. The materials to be evaluated include :

- Financial aspect*
- Operational aspect*
- Administrative aspect.*

Description	2007	2008	2009	2010	2011
ASSETS					
Current Assets	53.767	58.094	67.338	98.429	152.024
Fixed Assets	35.923	45.812	59.299	66.687	77.549
Other Assets	1.640	1.821	1.686	2.011	2.720
TOTAL ASSETS	91.330	105.727	128.323	167.127	232.293
LIABILITIES					
Short Term Liability	26.743	26.466	24.992	30.195	51.827
Long Term Liability	2.232	3.139	3.957	4.913	5.780
Equity	62.354	76.122	99.373	132.019	174.686
TOTAL LIABILITIES	91.330	105.727	128.323	167.127	232.293

Key Performance Indicator (KPI) year 2011

No	Indicator	Formulation	Weight	Target	Real.	R/T	Score	KPI Score
1.	<i>Labor Productivity</i>	<i>Revenue/Number of Workers</i>	10	<i>Min. 571</i>	542	95	90	9
2.	<i>Preparation of Standard Costing Product / Service</i>	<i>Completion Standard Costing Production / Services</i>	10	<i>Maks. 6 month</i>	<i>6 month</i>	100	100	10
3.	<i>Development of Rules / Regulations</i>	<i>Completion of the Rules / Regulations</i>	10	<i>Min. 5</i>	6	100	100	10
4.	<i>Revenue Growth</i>	<i>Operating Revenues in 2011 / Operating Revenues in 2010</i>	15	<i>Min. 120,00</i>	118	99	98	14,7
5.	<i>Operating Ratio</i>	<i>Cost of services / Operating Revenues</i>	15	<i>Maks. 59</i>	58,10	102	105	15,75
6.	<i>Profit Margin (PM)</i>	<i>Profit Before Tax / Income</i>	15	<i>Min. 18,80</i>	20,50	109	123	18,38
7.	<i>Collecting Period</i>	<i>Accounts Receivable / Net Revenue X 365 days</i>	15	<i>Maks. 66</i>	89	74	51	7,65
8.	<i>The Development of SDM</i>	<i>Primary Education and Training Program</i>	10	<i>Min. 27</i>	28	104	110	11
		Weight Total	100					96,48

Dewan Komisaris, Direksi dan Staf

Board of Commissioner, Director and Staff

Board of Commissioner

Chairman	:	Abdul Gani
Commissioner	:	Riyadi Widiasmoro
	:	Liliek Mayasari
	:	Avianto Muhtadi

Board of Director

President Director	:	Purnama SM
Technical & Development Director	:	Ajatiman
Operating & Marketing Director	:	S. Dangkeng
Finance & Personnel Director	:	Edy Cahyono

Staff

Head of Planning Unit	:	Taufik Hidayat
Head of Internal Control Unit	:	Asep Sutrisna
Head of Quality Assurance Unit	:	Bambang Tri Suharto
Head of R&D Unit	:	Saifuddin Wijaya

Technical Staff

Head of Survey Division	:	Zilzal HM
Head of Statutory Division	:	Joeliantoro
Head of Machinery & Electrical Division	:	Agus Widjaja
Head of Hull & Material Division	:	Hadi Soetrisno
Head of C&S Division	:	Arsalnan Latief
Head of Class Admission Dept.	:	Rahmadi
Head of Class Maintenance Dept.	:	Heintje Angganois
Head of Monitoring & Register Dept.	:	Agung Wicaksono
Head of Solas & Marpol Dept.	:	Arief Budi Permana
Head of Load Line & Cargo Gear Dept.	:	Ery Dani Sampurno
Head of Machinery Dept.	:	Sugeng Yulianto
Head of Electrical Dept.	:	Agus Salim
Head of Industrial Service	:	Salvinus Patangke
Head of Hull Dept.	:	Sunaryoko
Head of Welding & Material Dept.	:	Romy Lesmana
Head of C&S Marketing Dept.	:	Herry Sudrajat
Head of Control of C&S Prod. Dept	:	Agung Prihanto

Administration Staff

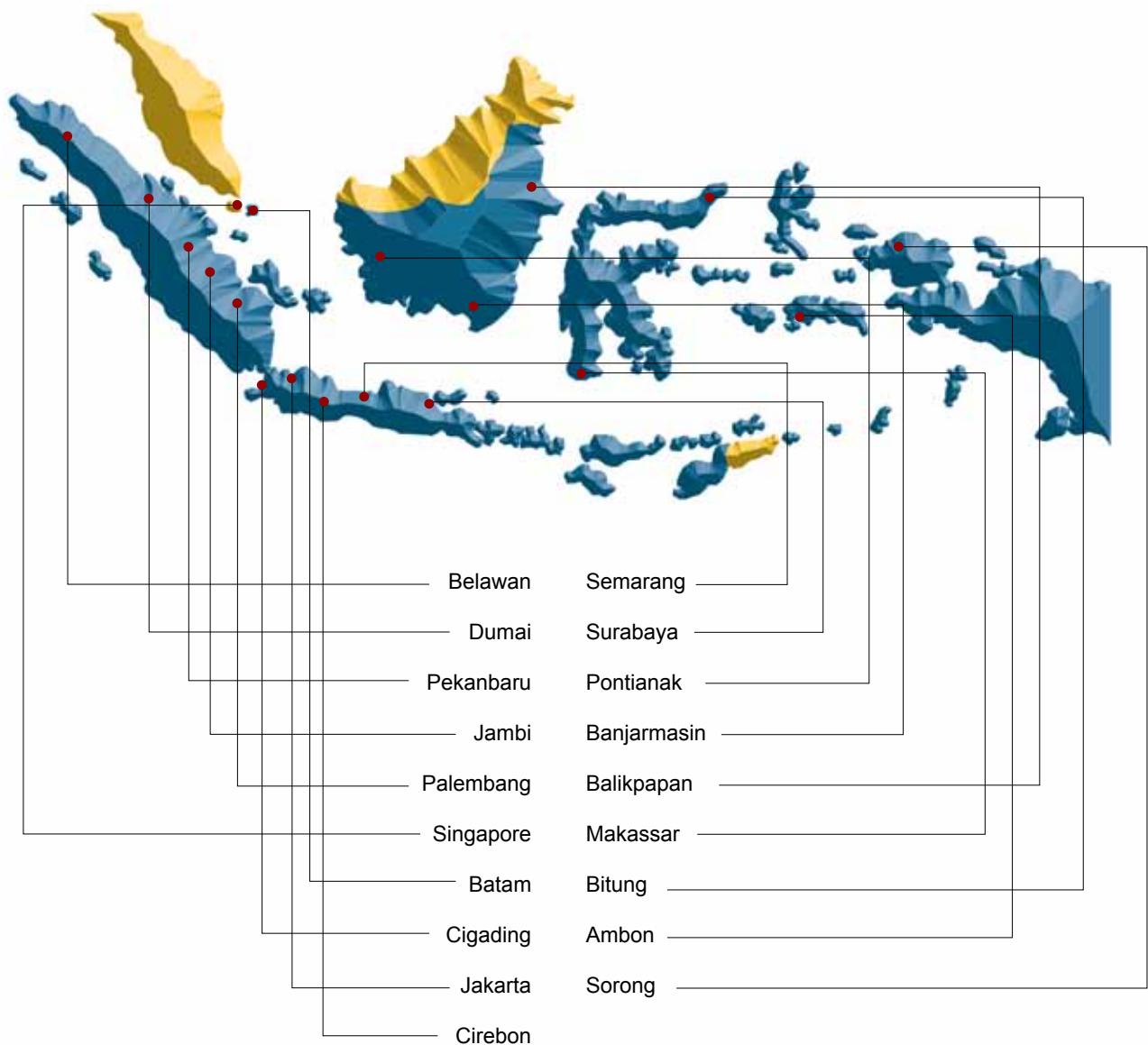
Head of Finance Division	:	Herman Yuska
Head of Personnel & GA Division	:	Priyo Santosa
Head of Accounting Dept.	:	R. Sudaryo
Head of Financial Adm. Dept.	:	Risa Afriana R.
Head of Personnel & Training Dept.	:	Nasaruddin
Head of General Affair Dept	:	Koko Kusnadi
Head of Legal & Public Relations Dept.	:	Yuniati
Head of Information System Dept.	:	Diding Suwandi
Head of Program & Budgeting Dept.	:	Sudirman

Branch Manager

Head of Ambon Branch Office	:	Sigit Prastowo
Head of Balikpapan Branch Office	:	Pardy Abbas
Head of Banjarmasin Branch Office	:	Farid Rahman Rahim
Head of Belawan Branch Office	:	Ridwan Djajanto
Head of Batam Branch Office	:	Nurdin Gading
Head of Bitung Branch Office	:	Doni Tri Susilo
Head of C&S Unit	:	Yansen Miri
Head of Cigading Branch Office	:	Endro Djoko Saputro
Head of Cirebon Branch Office	:	Manggarseta Djatnika
Head of Dumai Branch Office	:	Andi Solihin Rizal
Head of Jambi Branch Office	:	Benni Hermawan
Head of Makassar Branch Office	:	Syarif Nuhung
Head of Palembang Branch Office	:	Syamsul Bahri
Head of Pontianak Branch Office	:	Azhar
Head of Pekanbaru Branch Office	:	Rusdin Halludin
Head of Semarang Branch Office	:	Alfonsus Susilarso
Head of Singapore Branch Office	:	Arief Nurtjahyo
Head of Sorong Branch Office	:	Misbahudin Aidy
Head of Surabaya Branch Office	:	I Nyoman Gde Arimbawa
Head of Tanjung Priok Branch Office	:	Mohammad Cholil

Jaringan Operasional

Operation Network



Daftar Kontak

List of Contact

Ambon

Jl. Raya Pelabuhan, Komplek Pelabuhan, Ambon
97216
Telephone. (0911) 349607
Facsimile. (0911) 352745
E-mail : bkab@klasifikasiindonesia.com

Balikpapan

Jl. MT. Haryono No. 8 Ring Road Balikpapan 76111
Telephone. (0542) 876637, 876641, 876642, 876643
Facsimile. (0542) 876639, 876645
E-mail : bkibp@klasifikasiindonesia.com

Banjarmasin

Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin 70117
Telephone. (0511) 3350175, 3358311, 3350893
Facsimile. (0511) 3350175
E-mail : bkjb@klasifikasiindonesia.com

Batam

Graha BKI Jl. Yos Sudarso Kav. 5, Batam 29421
Telephone. (0778) 433388, 429023-24, 451288
Facsimile. (0778) 429020, 429021
E-mail : bkibm@klasifikasiindonesia.com

Belawan

Jl. Veteran No. 218, Belawan 20411
Telephone. (061) 6941025, 6941276, 6941157
Facsimile. (061) 6941276
E-mail : bkibn@klasifikasiindonesia.com

Bitung

Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet, Bitung 95516
Telephone. (0438) 38720, 38721
Facsimile. (0438) 21282
E-mail : bkibt@klasifikasiindonesia.com

Cigading

Jl. Gerem Raya No. 1 KM 5, Pulau Merak, Cilegon 42438
Telephone. (0254) 573955, 573417
Facsimile. (0254) 571007
E-mail : bkicg@klasifikasiindonesia.com

Cirebon

Jl. Tuparev KM 3, Cirebon 45153
Telephone. (0231) 205266
Facsimile. (0231) 205266
E-mail : bkicn@klasifikasiindonesia.com

Dumai

Jl. Arifin Ahmad No. 40 Kel. Tangkerang Tengah,
Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru 28282
Telephone. (0761) 7662160, 7662170
Facsimile. (0761) 7662180
E-mail : bkidm@klasifikasiindonesia.com

Jambi

Jl. Raden Bahrun No. 11 RT 11 RW 04 Kel. Sungai
Putri, Kec. Telanai Putra Jambi
Telephone. (0741) 671107
Facsimile. (0741) 671108
E-mail : bkjb@klasifikasiindonesia.com

Makassar

Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar 90115
Telephone. (0411) 311993, 315460
Facsimile. (0411) 315460
E-mail : bkims@klasifikasiindonesia.com

Palembang

Jl. Perintis Kemerdekaan, 5 Ilir, Palembang 30115
Telephone. (0711) 713171, 717151, 713712, 713680
Facsimile. (0711) 7662173
E-mail : bkijp@klasifikasiindonesia.com

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad No. 40 Kel. Tangkerang Tengah
Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru 28282
Telephone. (0761) 7662160, 7662170
Facsimile. (0761) 7662180
E-mail : bkipr@klasifikasiindonesia.com

Pontianak

Jl. Gusti Hamzah No. 211, Pontianak 78116
Telephone. (0561) 739579, 743107
Facsimile. (0561) 739579, 743107
E-mail : bkirk@klasifikasiindonesia.com

Semarang

Jl. Pamularsih No. 12 Semarang 50148
Telephone. (024) 7610399, 7610744
Facsimile. (024) 7610422
E-mail : bkism@klasifikasiindonesia.com

Singapore

150 Changi Road #02-01 Aguthrie building – Singapore
Telephone. (065) 68830651, 68830643, 68830634
Facsimile. (065) 63393631
E-mail : bki_sb@pacific.net.sg

Surabaya

Jl. Kaliangket No. 14, Surabaya 60165
Telephone. (031) 3295448, 3295449, 3295450,
3295451, 3295465
Facsimile. (031) 3294520, 3205451
E-mail : bkisb@klasifikasiindonesia.com

Sorong

Jl. Jenderal Sudirman No. 140, Sorong 98414
Telephone. (0951) 322600
Facsimile. (0951) 323870
E-mail : bkisr@klasifikasiindonesia.com

Tanjung Priok

Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta
14320
Telephone. (021) 4301017-18-19, 4301703, 4300993,
4353291-92, 43933021
Facsimile. (021) 4301702, 497020
E-mail : bktp@klasifikasiindonesia.com

Unit Konsultansi & Supervisi

Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta
14320
Telephone. (021) 4301017-18-19, 4301703,
4300993, 4353291
Facsimile. (021) 43900972, 4300139
E-mail : bkiks@klasifikasiindonesia.com